



*Profil Statistik*  
**Gender**  
*Kota Denpasar*  
**Tahun 2019**



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR  
*Bekerjasama Dengan*  
PUSAT STUDI WANITA DAN PERLINDUNGAN ANAK  
UNIVERSITAS UDAYANA



# **PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2019**

Oleh

**NI LUH ARJANI**

**NI MADE WIASTI**

**I WAYAN SUWENA**

**NI LUH NYOMAN KEBAYANTINI**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**PROFIL STATISTIK GENDER  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2019**

Oleh :

NI LUH ARJANI

NI MADE WIASTI

I WAYAN SUWENA

NI LUH NYOMAN KEBAYANTINI

Cover /Tata letak:

MDR, Kt

Diterbitkan oleh:

**SWASTA NULUS**

Jl. Tukad Batanghari VI.B No. 9 Denpasar-Bali

Telp. (0361) 241340

Email: swastanulus@yahoo.com

Cetakan Pertama:

2019, xviii + 160 hlm, 16 x 23 cm, Calibri, 12

**ISBN 978-623-7559-29-0**

**Hak Cipta pada Penulis.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



## SAMBUTAN

### Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



#### **Om Swastyastu,**

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha- Nya penyusunan buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan sebagai

dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat.

Tersusunnya buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2019, tidak lepas dan adanya komitmen dari pemerintah Kota Denpasar untuk mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Oleh Karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Walikota Denpasar serta semua pihak yang telah memfasilitasi sampai terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kota Denpasar.

**Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om**

Denpasar, Agustus 2019  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Denpasar



**Ir. I Gusti Agung Laksmi Dharmayanti, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600505 198603 2 025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan karena berkat *asung kerta wara nugraha Ida Sanghyang Widi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa Buku Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk memperoleh data-data tentang keterlibatan laki-laki dan perempuan berbagai sektor pembangunan. Dalam konteks ini hal yang ingin diketahui adalah teridentifikasinya berbagai isu gender yang masih terjadi di Kota Denpasar.

Melalui pendataan ini diharapkan para perencana yang berkopeten dapat menggunakan data ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan isu gender yang masih terjadi di Kota Denpasar.

Penyusunan buku ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar bekerja sama dengan Pusat Studi Wanita dan Perlindungan Anak (PSWPA) Universitas Udayana. Mengikuti kata pepatah “ tiada gading yang tak retak” maka demikian juga halnya dengan hasil pendataan ini tidak lepas dari kekurangan baik dalam analisisnya maupun dalam penyajian datanya.. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini tim penyusun tidak lupa mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam buku ini. Melalui kesempatan ini juga tim penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam melakukan penyusunan buku ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembangunan Kota Denpasar khususnya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender diberbagai bidang pembangunan.

Tim Penyusun

## EKSEKUTIF SUMMARY

Sampai saat ini persoalan gender dan pemberdayaan perempuan masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal ini secara nyata tampak dari kondisi ketimpangan gender yang masih terjadi pada berbagai indikator pembangunan seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang politik. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan gender tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius. Lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Development Gols (MDGs) yang kemudian lanjut ke sustainable development goals (SDGs). Ini berarti bahwa permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi tantangan global bagi semua elemen masyarakat baik pemerintah maupun swasta.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih terjadi, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah kota Denpasar, menganggap penting mempublikasikan data terpilah berdasarkan



jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dalam bentuk buku Statistik Gender. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Selain itu, eksistensi buku yang mempublikasikan data gender secara lengkap menjadi dasar untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknik analisis gender. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan buku statistik gender Kota Denpasar menjadi sangat penting terutama untuk membantu para perencana dalam menyusun perencanaan yang responsif gender.

Secara lengkap buku ini memaparkan berbagai indikator pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dari hasil kajian yang dilakukan tampak bahwa masih terjadi kesenjangan gender pada beberapa indikator pendidikan. Secara umum APK, APS dan APM di semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan kesenjangan gender yang signifikan. Siswa laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan siswa perempuan baik pada jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA namun kesenjangan tidak terlalu menonjol. Masih ada 4 siswa putus sekolah di SD dan 1 di SMP. Kesenjangan gender masih tampak jelas pada keberadaan guru baik di TK, SD maupun SMP yang didominasi oleh perempuan.

Di Bidang kesehatan: Masih terjadi angka kematian bayi dan balita di tahun 2018 sebanyak 13 orang yang terdiri dari 6 bayi perempuan dan 7 bayi laki-laki. Masih ada bayi yang berstatus gizi buruk dan gizi kurang. Sudah tersedia 83 pojok ASI yang tersebar diberbagai tempat. Kesenjangan gender masih tampak pada keberadaan dokter, dokter umum dan dokter gigi lebih banyak perempuan sementara dokter spesialis didominasi oleh laki-laki. Di Bidang Ekonomi, Kesenjangan gender yang masih menonjol tampak pada keberadaan Tenaga penyuluh pertanian yang didominasi laki-laki. Demikian juga TPAK perempuan masih lebih rendah dari TPAK laki-laki. Tenaga kebersihan,

tenaga pertamanan dan juru parkir masih didominasi oleh laki-laki. Di sector pariwisata kesenjangan gender masih terjadi di usaha perhotelan baik sebagai pemilik maupun sebagai karyawan didominasi oleh laki-laki.

Di Sektor Publik. Kesenjangan gender masih tampak di sector public baik dalam jumlah PNS guru dan non guru maupun tenaga honorer dan THL yang masih didominasi oleh laki-laki. Demikian juga dalam hal jabatan structural terutama eselon II dan III persentase perempuan lebih kecil dari laki-laki. Di legislatif (DPRD) kesenjangan gender masih sangat menonjol, demikian juga pada kepengurusan partai didominasi oleh laki-laki. Di yudikatif terutama hakim, polisi, advokat dan notaris masih menunjukkan kesenjangan gender yang cukup signifikan. Sampai saat ini kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya masih menyasar kaum perempuan, demikian juga persoalan gepeng sampai saat ini masih belum bisa diatasi. Para gepeng yang berkeliaran di Kota Denpasar sebagian besar adalah perempuan ibu rumah tangga dan anak-anaknya.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>SAMBUTAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	5
1.3 Manfaat .....	6
1.4 Jenis dan Sumber Data .....	6
1.5 Analisis Data .....	7
<b>BAB II DEFINISI BEBERAPA KONSEP</b> .....	8
2.1 Statistik Gender .....	8
2.2 Konsep Gender .....	9
2.3 Kesetaraan Gender (KG) .....	10
2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG) .....	12
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KOTA DEANPASAR</b> .....	14
3.1 Letak Geografis .....	14
3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar .....	18
3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelarasannya .....	20
3.4 Visi dan Misi .....	23
3.4.1 Visi .....	23
3.4.2 Misi .....	24
3.5 Sistem Pemerintahan .....	24
3.6 Kondisi Demografi .....	26
3.7 Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan .....	29
3.8 Indek Pemberdayaan Gender (IDG) .....	31
3.9 Indek Pembangunan Gender (IPG) .....	32
<b>BAB IV PENDIDIKAN</b> .....	36
4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) .....	37
4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	39
4.3 Jumlah Siswa .....	42

4.3.1	Jumlah Siswa PAUD -----	43
4.3.2	Jumlah Siswa SD -----	44
4.3.3	Jumlah Siswa SMP-----	45
4.3.4	Jumlah Siswa SMA dan SMK -----	46
4.3.5	Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan -----	47
4.4	Jumlah Siswa Putus Sekolah -----	49
4.4.1	Siswa Putus Sekolah SD/Mi -----	50
4.4.2	Angka Putus Sekolah SMP -----	51
4.5	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan-----	52
4.5.1	Jumlah Sekolah-----	52
4.6	Keberadaan Guru -----	53
4.7	Keberadaan Kepala Sekolah -----	55
4.7.1	Kepala Sekolah Dasar (SD) -----	56
4.7.2	Kepala Menengah Pertama (SMP) -----	57
4.8	Guru yang Tersertifikasi -----	58
4.8.1	Guru SD yang Tersertifikasi -----	59
4.8.2	Guru SMP yang Tersertifikasi-----	60
<b>BAB V</b>	<b>KESEHATAN -----</b>	<b>62</b>
5.1	Jumlah Kelahiran -----	63
5.2	Kematian Bayi-----	65
5.3	Pemberian ASI Eksklusif -----	68
5.4	Status Gizi Balita-----	70
5.5	Pojok ASI -----	72
5.6	Imunisasi-----	74
5.7	Jumlah Dokter -----	77
5.8	Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan Reproduksi dan Mental-----	81
5.9	Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih-----	83
<b>BAB VI</b>	<b>EKONOMI -----</b>	<b>86</b>
6.1	Kegiatan Utama Penduduk -----	88
6.2	Penduduk Usia 15--59 Tahun Menurut Jenis Kelamin-----	90
6.3	Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas -----	92
6.4	Tenaga Penyuluh Pertanian -----	96

6.5	Partisipasi Angkatan Kerja -----	98
6.6	Tenaga Kerja Asing Pendetang-----	99
6.7	Tenaga Kebersihan dan Pertamanan -----	101
6.8	Juru Parkir -----	105
6.9	Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata-----	108
6.10	Tenaga Kerja Restoran dan Rumah Makan-----	112
6.11	Pemilik Usaha Salon Kecantikan -----	113
<b>BAB VII</b>	<b>SEKTOR PUBLIK -----</b>	<b>115</b>
7.1	Eksekutif -----	116
7.1.1	PNS menurut Golongan Kepangkatan ----	116
7.1.2	Pegawai Non PNS-----	119
7.1.3	Pegawai Yang Mengikuti Diklat-----	122
7.1.4	PNS Berdasarkan Unit Kerja-----	124
7.1.5	PNS Menurut Eselon-----	125
7.2	Legislatif-----	129
7.2.1	Keanggotaan DPRD-----	130
7.2.2	Pimpinan Partai Politik -----	131
7.2.3	Anggota Panwaslu-----	135
7.2.4	Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) -----	138
7.3	Lembaga Yudikatif -----	140
<b>BAB VIII</b>	<b>LAIN LAIN -----</b>	<b>142</b>
8.1	Alat/Cara KB yang Digunakan -----	142
8.2	Kekerasan-----	145
8.3	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) -----	151
<b>BAB IX</b>	<b>PENUTUP -----</b>	<b>156</b>
9.1	Simpulan -----	156
9.2	Rekomendasi-----	157
<b>Daftar Pustaka</b>	-----	<b>159</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 3.1	Luas Tanah di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (Ha), Tahun 2018 ----- 16
Tabel 3.2	Jumlah Desa/Kelurahan & Banjar / Lingkungan per Kecamatan Dirinci Menurut Dinas & Pakraman Tahun 2018----- 25
Tabel 3.3	Persentase Penduduk dan Sex Ratio menurut Jenis Kelamin Kelompok Umur Penduduk Kota Denpasar, 2018----- 27
Tabel 3.4	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Berstatus Kawin Menurut Jenis Kelamin, 2018 ----- 30
Tabel 4.1	APM pada Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 – 2017/2018----- 38
Tabel 4.2	APK menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 - 2017/2018----- 40
Tabel 4.3	Jumlah Siswa PAUD menurut jenis Kelamin 2017-2018----- 43
Tabel 4.3	Jumlah Siswa SD menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2018----- 45
Tabel 4.5	Jumlah Siswa SMP menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2018----- 46
Tabel 4.6	Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2018----- 47
Tabel 4.7	Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2016/2017 – 2017/2018----- 48
Tabel 4.8	Jumlah Siswa SD/Mi yang Putus Sekolah menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2018 ----- 50
Tabel 4.9	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan 2018----- 51
Tabel 4.10	Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun yang Putus Sekolah di Kota Denpasar,2018 ----- 52

Tabel 4.11	Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 – 2017/2018-----	53
Tabel 4.12	Jumlah Guru SD Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jans Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 -----	54
Tabel 4.13	Jumlah Kepala Sekolah SD Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	56
Tabel 4.14	Jumlah Kepala Sekolah SMP Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	58
Tabel 4.15	Jumlah Guru SD yang sudah Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 -	59
Tabel 4.16	Jumlah Guru SMP yang sudah Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016/2017-----	60
Tabel 4.17	Persentase Guru yang Tersertifikasi Tahun 2018 --	61
Tabel 5.1	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 dan 2018-----	64
Tabel 5.2	Jumlah Angka Kematian Bayi dan Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018 -----	67
Tabel 5.3	Asi Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-----	69
Tabel 5.4	Status Gizi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin tahun 2018-----	71
Tabel 5.5	Pojok Asi di Kota Denpasar Tahun 2018-----	74
Tabel 5.6	Cakupan Imunisasi Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	76
Tabel 5.7	Jumlah Dokter Umum yang ada di Kota Denpasar Tahun 2017 dan 2018-----	79
Tabel 5.8	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi (IDI) yang ada di Kota Denpasar Tahun 2018-----	80

Tabel 5.9	Lembaga Penyedia Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi dan Mental Tahun 2018 -----	82
Tabel 5.10	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2017 Dan 2018 -----	84
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 59 tahun) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	91
Tabel 6.2	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan 2018-----	93
Tabel 6.3	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar-----	96
Tabel 6.4	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 -----	97
Tabel 6.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2018-----	98
Tabel 6.6	Tenaga Kerja Asing Pendetang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 -----	100
Tabel 6.7	Jumlah Tenaga Kebersihan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-----	102
Tabel 6.8	Jumlah Petugas Kebersihan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	103
Tabel 6.9	Jumlah Tenaga Pertamanan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 -----	104
Tabel 6.10	Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelantaran menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017 dan 2018-----	106
Tabel 6.11	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar tahun 2018 -----	109
Tabel 6.12	Jumlah Pemilik Hotel di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017/2018 -----	111
Tabel 6.13	Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Restoran dan Rumah Makan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-----	112
Tabel 6.14	Usaha Salon Kecantikan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	114



Tabel 7.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2018-----	117
Tabel 7.2	Komposisi Pegawai Non PNS menurut Jenjang di Kota Denpasar Tahun 2018-----	119
Tabel 7.3	Jumlah Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat menurut Jenis Kelamin Di Kota Denpasar Tahun 2018-----	120
Tabel 7.4	Proporsi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin -----	122
Tabel 7.5	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2018-----	124
Tabel 7.6	Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Kepegawaian di Kota Denpasar Tahun 2017 dan 2018-----	126
Tabel 7.7	Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017-2018-----	127
Tabel 7.8	Proporsi Keanggotaan DPRD menurut Partai Periode 2014-2019 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar -----	131
Tabel 7.9	Jumlah Pimpinan Partai Politik (Parpol) menurut Nama Partaidan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	132
Tabel 7.10	Jumlah Petugas Partai Politik (Parpol) menurut Nama Partaidan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	134
Tabel 7.11	Jumlah Anggota Panwaslu Pileg, Pilpres dan Pilkada di Kota Denpasar Tahun 2018-----	136
Tabel 7.12	Jumlah Anggota Banwaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	136
Tabel 7.13	Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar 2018-----	138

Tabel 7.14	Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut Kelamin di Kota Denpasar 2018-2019 -----	139
Tabel 7.15	Prosentase Profesi Sektor Penegak Hukum menurut Jenis Profesi dan Jenis Kelamin Tahun 2018-----	140
Tabel 8.1	Jumlah Perempuan Pernah Kawin Usia 15 - 49 yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan -----	143
Tabel 8.2	Korban dan Pelaku Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 -----	146
Tabel 8.3	Ciri – Ciri Pelaku dan Korban Kekerasan menurut Umur di Kota Denpasar Tahun 2018-----	148
Tabel 8.4	Bentuk-Bentuk Kekerasan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2017/2018-----	149
Tabel 8.5	Presentase Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017 dan 2018 ---	151
Tabel 8.6	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin Yang terjaring dan Telah di Bina di Pulangkan ke daerah asal, Tahun 2017 dan 2018 -----	152
Tabel 8.7	Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 -----	154

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Peta Kota Denpasar -----	15
Gambar 3.2 Lambang Kota Denpasar -----	21
Gambar 3.3 Indek Pemberdayaan Gender Kota Denpasar tahun 2014 dan 2015-----	32
Gambar 3.4 Perkembangan IPG Kota Denpasar dan Bali Tahun 2014 dan 2015-----	34
Gambar 4.1 Presentase Angka Partisipasi Murni SD/MI- SMP/MTs dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar -----	39
Gambar 4.2 Presentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017/2018-----	41
Gambar 4.3 Presentase Siswa SD- SMA/SMK Menurut Jenis Kelamin di Denpasar Tahun 2018 -----	49
Gambar 4.4 Presentase Guru SD Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 ---	55
Gambar 4.5 Presentase Kepala Sekolah SD Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 -----	56
Gambar 5.1 Presentase Kelahiran Menurut jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2017, dan 2018-----	65
Gambar 5.2 Presentase Rumah Tangga dan Akses Air Bersih Tahun 2017 dan 2018-----	85
Gambar 6.1 Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan yang Dilakukan 2018-----	95
Gambar 6.2 Presentase Data Tenaga Kerja Asing Pendetang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	100
Gambar 7.1 Presentase Pegawai negeri Sipil menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2018-----	118

Gambar 7.2	Persentase Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018-----	121
Gambar 7.3	Presentase PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin -----	123
Gambar 7.4	Presentase Anggota Panwaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 -----	137
Gambar 8.1	Persentase Korban dan Pelaku Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018 -----	147

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur menjadi impian semua orang. Kondisi yang demikian ini juga menjadi tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 yakni terwujudnya bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJP Nasional 2005-2025) disebutkan bahwa salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran tercapainya Indonesia maju, mandiri, dan adil adalah tercapainya sasaran berupa terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan kualitas hidup kaum perempuan yang ditunjukkan dengan semakin tingginya partisipasi perempuan di sektor publik.

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini persoalan gender dan pemberdayaan perempuan masih belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Hal ini secara nyata tampak dari kondisi ketimpangan gender yang masih terjadi pada berbagai indikator pembangunan seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang politik. Kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan gender tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius. Lebih-lebih saat ini permasalahan gender sudah menjadi isu global dengan

dimasukkannya dalam kesepakatan Millenium Development Gols (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam *Millenium Summit* yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah menyepakati 8 goals dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015. Salah satu dari delapan goals tersebut yakni goals ke tiga adalah Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini berarti bahwa setiap negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut harus mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan di tahun 2015. Hasil evaluasi dari target MDGs tahun 2015 kesetaraan gender ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal, maka target ini dilanjutkan ke *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan target capaian di tahun 2030. Ini berarti bahwa setiap negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut harus mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan di tahun 2030.

Upaya untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah lebih dari tiga dasa warsa. Perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan gender (KPP, 2005;4).

Secara resmi penanganan masalah perempuan dan gender dilakukan sejak didirikannya lembaga khusus pemberdayaan perempuan pada tahun 1978 yang saat itu bernama Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (Men.UPW). Melalui lembaga Negara ini pemerintah Indonesia melaksanakan aksi penanggulangan permasalahan Perempuan dan gender yang banyak terjadi di

masyarakat. Kuatnya komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sudah tampak sejak pemerintah meratifikasi konvensi ILO No. III melalui Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957. Payung hukum ini menggariskan pengupahan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama nilainya. Kemudian pada tahun 1984 Pemerintah RI juga telah meratifikasi *Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Berbagai kebijakan dan strategi pembangunan juga telah ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat, seperti *Women in Development (WID)*, *Women and Development (WAD)*, *Gender and Development (GAD)* dan *Gender Mainstreaming (GM)*. Pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Melalui instrumen yuridis ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender.

Instruksi Presiden di atas kemudian mendapat respon yang positif dari jajaran pemerintahan di daerah, termasuk di Provinsi Bali khususnya pemerintah Kota Denpasar. Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar dalam mendukung kebijakan pemerintah dan program pemberdayaan perempuan, pada tahun 2001 di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah dibentuk lembaga khusus yang menangani masalah peningkatan peranan perempuan, yaitu Biro Bina Kesejahteraan dan

Pemberdayaan Perempuan (BKPP), yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon II. Sementara itu, di kota telah dibentuk pula lembaga serupa setingkat eselon dua. Saat ini, lembaga yang menangani masalah pemberdayaan perempuan di tingkat Provinsi Bali adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan untuk di Kota Denpasar urusan pemberdayaan perempuan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan (KBPP), dan sejak tahun 2017 telah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB). Dengan adanya lembaga khusus yang menangani persoalan gender dan perempuan, maka akan lebih mudah dan lebih terfokus dalam mengaplikasikan program-program dan strategi pengarusutamaan gender, serta upaya-upaya lain dalam mengatasi persoalan gender, perempuan dan perlindungan anak.

Tampaknya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, belum mampu berhasil maksimal dalam mengatasi persoalan gender. Hal ini terbukti bahwa sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan



sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia pada umumnya dan Provinsi Bali serta Kabupaten/kota, sejak tahun 2001 mulai mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dalam bentuk buku Profil Statistik Gender, dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Keberadaan buku yang mempublikasikan data gender secara komprehensif menjadi dasar untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknik analisis gender. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan profil statistik gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting terutama dalam membantu para perencana dalam menyusun perencanaan yang responsif gender.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan buku Statistik Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya. Penulisan Statistik Gender ini dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperlihatkan isu gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan dapat menemukan isu-isu gender yang ada pada masing-masing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya

akan dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu yang ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat cepat terwujud.

### **1.3. Manfaat**

Secara khusus manfaat dari penyusunan buku Statistik Gender Kota Denpasar ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender. Hal ini pada akhirnya akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga kesenjangan gender lebih cepat bisa diatasi. Dan ini berarti akan mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang menjadi visi dari pembangunan pemberdayaan perempuan.

### **1. 4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data ada berbagai macam, diantaranya adalah data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang ditampilkan dalam buku ini adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang dipublikasikan ini sebagian besar berupa data primer yang diambil dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Suvei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Selain dari BPS, data juga bersumber

dari berbagai instansi terkait seperti dari Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Pariwisata dan lain-lain.

### **1.5. Analisis Data**

Seperti telah diuraikan di atas bahwa sebagian besar data yang ada dalam buku statistik gender ini adalah menampilkan data kuantitatif/ data angka-angka yang diperoleh dari berbagai sumber. Penampilan data kuantitatif ini akan menjadi lebih bermakna jika apa yang ada dibalik pemunculan data angka itu dianalisis secara mendalam. Analisis yang mendalam dilakukan dengan cara menarasikan secara lengkap atau menganalisis secara kualitatif data yang ada pada setiap tabel. Dalam analisis ini akan diberikan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat, namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

## BAB II

# DEFINISI BEBERAPA KONSEP

Ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan terkait dengan penyusunan buku ini. Hal ini penting dijelaskan guna memperoleh persamaan persepsi bagi yang membaca atau yang memakai buku ini. Definisi konsep yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

### 2.1 Statistik Gender

Dalam pengertian yang lebih luas, **statistik** dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang menggambarkan (berkaitan) dengan suatu masalah tertentu. umumnya suatu data diikuti atau dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Statistik Gender yang dimaksudkan dalam hal ini adalah statistik yang mengandung isu gender, seperti terefleksikan dari kesenjangan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam isu yang spesifik. Statistik Gender merupakan hasil analisa lebih lanjut dari Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin. Sementara PBB mendefinisikan bahwa Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti dalam situasi perempuan dan laki-laki disemua aspek kehidupan (PBB, 2006).

Data terpilah menurut jenis kelamin dan umur memberikan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki disemua kelompok umur dan diberbagai aspek kehidupan. Data terpilah menurut jenis kelamin, tidak selalu mengandung isu gender. Akan tetapi data terpilah menurut jenis kelamin merupakan unsur dasar

yang harus ada untuk mengungkapkan isu gender, yaitu suatu isu yang muncul karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin. Isu gender ini selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses pembangunan.

Statistik gender merupakan dasar analisis untuk menilai perbedaan dalam situasi perempuan dan laki-laki dan bagaimana kondisi mereka berubah atau tidak. Dengan cara ini, statistik gender meningkatkan kesadaran dan memberikan dorongan untuk adanya perubahan. Statistik gender juga diperlukan untuk penelitian untuk mendukung pengembangan dan pengujian penjelasan dan teori-teori untuk memahami lebih baik bagaimana gender beroperasi di masyarakat. Semua manfaat ini membentuk dasar untuk mengembangkan kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih besar. Selain itu, statistik gender diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengembangan kebijakan (<https://www.kemenpppa.go.id/lib>)

## 2.2 Konsep Gender

Sampai saat ini persoalan gender masih menjadi isu global, terbukti masih menjadi salah satu target capaian SDGs di tahun 2030. Berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan, namun selama ini masih banyak yang mengartikan gender itu sama dengan perempuan. Istilah gender sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru, tetapi istilah ini sudah ada sejak mulai munculnya adam dan hawa di dunia ini, namun demikian sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu dan paham tentang istilah tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini penting dijelaskan definisi dari konsep gender agar para pembaca dapat memahaminya. Istilah gender sebenarnya berasal dari bahasa asing (inggris), yaitu *gender*. Dalam kamus bahasa Inggris, gender diartikan sebagai jenis kelamin. Karena diadopsi dari bahasa Inggris, dalam kamus bahasa

Indonesia, gender sampai kini juga masih diartikan sebagai jenis kelamin/seks (Depdikbud, 2001:353).

Secara konseptual, istilah seks berbeda dengan gender. Istilah gender diketengahkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan konstruksi budaya atau buatan masyarakat. Karena merupakan buatan manusia, maka gender itu akan mempunyai sifat antara lain: berbeda antar budaya, dapat berubah sesuai perkembangan jaman dan dapat digantikan atau dipertukarkan.

Berbeda halnya dengan **Seks** atau jenis kelamin. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Setiap manusia yang lahir pasti mempunyai jenis kelamin, kalau dia lahir laki-laki maka ia akan dilengkapi dengan penis dan testis, sedangkan kalau ia lahir perempuan maka akan dilengkapi dengan vagina. Jenis kelamin ini merupakan anugrah Tuhan sehingga tidak bisa dipertukarkan kepemilikannya dan bersifat abadi dan kodrati, universal dan statis. Karena jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda maka mereka juga mempunyai fungsi kodrati yang berbeda. Kalau perempuan karena ia memiliki alat reproduksi berupa rahim dan sel telur maka ia mempunyai fungsi: menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui dengan ASI dan menopause (5 M). Sementara laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, testis, sperma, yang berfungsi untuk alat reproduksi sehingga secara kodrati mempunyai fungsi untuk membuahi sel telur perempuan.

### **2.3 Kesetaraan Gender (KG)**

Kesetaraan Gender (KG) merupakan visi dari pembangunan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu kesetaraan dan keadilan gender (KKG) menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah

dilakukan pemerintah untuk mewujudkan KKG, namun sampai saat ini masih banyak terjadi ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender di masyarakat. Bentuk- bentuk ketidakadilan gender di masyarakat adalah marginalisasi gender, subordinasi gender, diskriminasi gender, kekerasan, dan beban berat. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang antara lain karena adanya ideologi gender yang berkembang di masyarakat yang meletakkan peran perempuan pada sektor domestik dan laki-laki pada sektor publik yang kemudian diikuti adanya pelebelan terhadap laki-laki dan perempuan seperti laki-laki kuat, perkasa dan lain-lain, sementara perempuan lemah, lembut, tidak rasional dan lain-lain.

Budaya patriarkhi yang cenderung merugikan perempuan, karena perempuan diletakkan pada posisi inferior sementara laki-laki superior. Hal ini menyebabkan adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Faktor geografis dan ekonomi juga bisa mempengaruhi munculnya ketimpangan gender di bidang pendidikan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga Pemerintah Indonesia mengusahakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan, seperti dinyatakan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Kesetaraan Gender (KG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung satu konsep, yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Angka 1.3 dan 4 Lampiran Inpres No.9 Tahun 2000). Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan

berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya.

## **2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan pemberdayaan perempuan, salah satunya adalah melalui strategi pengarusutamaan gender. Istilah Pengarusutamaan Gender (PUG) ini mulai diwacanakan pada konferensi Wanita Sedunia keempat yang diselenggarakan di Beijing tahun 1995, istilah "*Gender Mainstreaming*" (GM) tercantum di "*Beijing Platform of Action*". Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi itu secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan GM ini di negara/tempat masing-masing. Di Indonesia jauh sebelum strategi GM ini diwacanakan, upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan. Namun secara normatif baru dituangkan dalam GBHN sejak tahun 1978.

Meskipun sudah lebih dari tiga dasa warsa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada beberapa aspek pembangunan di masyarakat kita masih tetap terjadi seperti halnya di bidang pendidikan. Untuk mencapai kesetaraan gender (KG), maka pemerintah Indonesia melalui GBHN tahun 1999 menyatakan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan kebijakan nasional yang harus diemban oleh lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun begitu usaha untuk mencapai KG ternyata masih mengalami hambatan dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh perempuan. Oleh karena itu akhirnya disepakati perlu adanya strategi yang tepat agar dapat menjangkau keseluruhan instansi pemerintah, swasta, masyarakat kota, desa dan sebagainya. Strategi



tersebut dikenal dengan istilah “Pengarusutamaan Gender” (*Gender Mainstreaming*). Strategi ini dicetuskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000.

Pengarusutamaan gender (PUG) diartikan sebagai suatu strategi untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Jadi secara singkat PUG merupakan upaya untuk memasukkan atau mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu komponen kunci bagi keberhasilan PUG adalah kemampuan para perencana atau penentu kebijakan menyusun atau merumuskan kebijakan yang responsif gender dalam artian dalam menyusun perencanaan/ program/ kegiatan, mampu mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan laki-laki dan perempuan. Dengan strategi pengarusutamaan gender ini, program pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih sensitiv atau responsif gender. Hal ini pada gilirannya akan mampu menegakkan hak-hak laki-laki dan perempuan atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.

## **BAB III**

# **GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR**

### **3.1 Letak Geografis**

Kota Denpasar merupakan salah satu dari sembilan daerah kabupaten/kota yang terletak di wilayah Pulau Bali. Denpasar, selain menjadi Ibu Kota Daerah Tingkat II Kota Denpasar, juga menjadi Ibu Kota Daerah Tingkat I Provinsi Bali. Sebagian besar keadaan wilayah Kota Denpasar merupakan daerah dataran serta di sebelah tepi selatan dan sebagian daerah di sebelah tepi timur merupakan daerah pantai atau pesisir.

Secara administratif batas-batas wilayah Kota Denpasar, yaitu (1) sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Badung, (2) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Badung, (3) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Badung, dan (4) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar.

Pulau Bali terletak di sekitar 8 derajat di sebelah selatan katulistiwa menyebabkan sepanjang tahun Kota Denpasar beriklim tropis, dengan suhu cuaca sekitar 23 derajat Celsius. Sebagaimana keadaan di daerah-daerah lainnya di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Bali maka Denpasar juga mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau.

Ditinjau dari tata letak topografisnya, Kota Denpasar terletak di antara 08 35' 31" – 08 44' 49" Lintang Selatan dan 115 10' 23" – 115 16' 27" Bujur Timur. Keadaan topografi Kota Denpasar, posisinya miring ke arah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0—75 meter di atas permukaan laut. Semakin ke arah utara letak wilayahnya tampak semakin tinggi walaupun ketinggiannya agak tidak merata. Sebaliknya, semakin ke arah selatan letak wilayahnya semakin rendah karena paling ujung berbatasan dengan bibir pantai, antara lain Pantai

Padang Galak, Pantai Sanur, Pantai Pesanggaran, dan Pantai Serangan. Morfologi wilayah Kota Denpasar yang landai dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar antara 0—5%, tetapi di bagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15% (<https://od/scribd.com>). Untuk lebih jelasnya batas-batas dan topografi Kota Denpasar dapat dilihat gambar 3.1 di bawah ini.

**Gambar: 3.1 Peta Kota Denpasar**



Wilayah Kota Denpasar yang luasnya 12.861,00 Ha atau 128,61 Km<sup>2</sup> tidak memiliki daerah pegunungan dan perbukitan. Dengan demikian, luas wilayah Kota Denpasar sekitar 2,18 persen dari luas Provinsi Bali termasuk tambahan reklamasi Pantai Serangan seluas 380

Ha. Keadaan lahan di Kota Denpasar relatif bagus karena lahan pertaniannya termasuk kategori lahan subur serta wilayah pesisirnya yang potensial untuk sumber penghidupan penduduknya. Bahkan, relatif banyak wilayah pesisir, di mana pantainya berkembang menjadi obyek wisata, antara lain pantai Padanggalak, Sanur, Mertasari, dan Serangan.

Lahan pertanian sawah di Kota Denpasar yang masih bertahan sampai sekarang ini, dapat ditanami secara intensif sepanjang tahun karena didukung oleh aliran air sungai yang memadai. Di wilayah Kota Denpasar terdapat sungai besar bernama Tukad Badung yang sementara ini tidak pernah kering. Selain itu, juga terdapat sungai-sungai yang lain di mana penggunaan airnya dikelola oleh lembaga tradisional bernama *subak*. Pimpinan *subak* disebut *pekaseh* bertugas untuk mengatur pemanfaat air sunyai (irigasi) kepada petani yang menjadi *warga subak* di wilayah kerja *subak* yang bersangkutan. Untuk lebih jelaslah pemanfaat lahan di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1: Luas Tanah di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (Ha), Tahun 2018**

No	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah (Ha)
1	Denpasar Utara	760.00	83.00	2.382.00	3.225.00
2	Denpasar Timur	690.00	164.00	1.377.00	2.231.00
3	Denpasar Selatan	800.00	263.00	3.936.00	4.999.00
4	Denpasar Barat	242.00	0.00	2.164	2.406.00
	Kota Denpasar	2.492.00	510.00	9.859.00	12.861.00

Sumber : BPS, Kota Denpasar Dalam Angka 2018

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Denpasar Selatan merupakan wilayah terluas di Kota Denpasar, yaitu sekitar 4.999,00 Ha (49,99 Km<sup>2</sup>) atau 39,12 persen dari luas Kota

Denpasar. Luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan lebih dari dua kali lipat luas Kecamatan Denpasar Timur (2.231,00 Ha) dan juga dua kali lipat luas Kecamatan Denpasar Barat (2.406,00 Ha). Luas wilayah Kecamatan Denpasar Utara menduduki peringkat ke dua, yaitu sekitar 3.225,00 Ha atau 32,25 Km<sup>2</sup> (24,59 persen dari luas Kota Denpasar).

Lahan sawah yang masih tersisa di Kota Denpasar sementara ini sekitar 2.492 Ha. Data ini menunjukkan bahwa lahan sawah di Kota Denpasar yang tersisa relatif sedikit sehingga dapat diduga bahwa warga Kota Denpasar relatif sedikit menekuni profesi sebagai petani jika dibanding dengan perofesi yang lain. Demikian pula, tanah yang bukan sawah, hanya seluas 510.00 Ha. Di sisi lain, justru lahan yang luasnya paling tinggi berupa bukan pertanian. Lahan yang bukan pertanian ini antara lain berupa tanah yang dimanfaatkan untuk perumahan (tempat tinggal), perkantoran, pertokoan, supermarket, hotel, lapangan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.

Data tentang pemanfaatan lahan di Kota Denpasar mereprestasi-kan bahwa penyempitan lahan pertanian di Bali pada beberapa dasa warsa terakhir ini tidak terbendung. Fakta Ini menunjukkan jual-beli tanah di Denpasar belum dapat tertanggulangi. Jual-beli tanah di Bali pada umumnya, khususnya di Kota Denpasar dapat diketahui melalui beberapa media, yaitu pemasangan iklan di surat kabar, internet, majalah, dan pemasangan tulisan di lokasi tanah tersebut yang dijual oleh pemiliknya. Hal inilah yang menyebabkan bermunculan pemukiman-pemukiman baru yang dibangun diareal-areal tanah pertanian, tanah tegalan, pesisir, dan tanah pinggir-pinggir sungai. Bahkan, tampak juga adanya pemukiman di mana bangunannya kumuh akibat dari kurang terkontrolnya pengalihan fungsi lahan. Selain itu, terjadi juga sewa menyewa tanah kepada para migran yang mengadu nasib di Kota Denpasar sehingga menjamurnya munculnya pemukiman-pemukiman baru.

Dalam konteks mengatasi alih fungsi lahan di Bali, Rumawan (Bali Post, 27 Juli 2019: 1) menyarankan, yaitu dengan pembangunan rumah susun. Ditegaskan, tuntutan tempat bermukim atau rumah pasti semakin tinggi. Pulau Bali jumlah penduduk mencapai lebih dari 4 juta jiwa, sedangkan Kota Denpasar saja jumlah penduduknya 1 juta jiwa. Fakta menunjukkan, terjadilah alih fungsi lahan meningkat terus pada tiga tahun terakhir ini dengan rincian, yaitu di tahun 2015 sekitar 496 Ha, tahun 2016 sekitar 625 Ha, dan tahun 2017 sekitar 900 Ha.

Kota Denpasar yang disebut-sebut kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia setelah Makassar. Hari jadi Kota Denpasar adalah 27 Februari 1992 (<https://id.m.wikipedia.org>). Hampir di sepanjang jalan yang menghubungkan keempat kota kecamatan dalam kondisi baik, bahkan sebagian besar sudah di-offmic sehingga arus lalu lintas sehari-harinya berjalan lancar, namun pada hari-hari kerja, terutama pada saat pagi dan sore beberapa ruas jalan di Kota Denpasar kadang-kadang mengalami kemacetan.

### 3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar

Ditinjau dari segi historisnya, Kota Denpasar mempunyai riwayat yang relatif panjang yang pada akhirnya menjadi Ibu Kota Daerah Tingkat II Kota Denpasar dan menjadi Ibu Kota Provinsi Bali. Asal usul kata *denpasar* berasal dari dua suku kata, yaitu *den* dan *pasar*. Kata *den* berarti utara dan kata *pasar* berarti pasar atau *peken*. Sesuai dengan asal-usul katanya, *denpasar* berarti di utara pasar yang sekaligus juga menunjukkan lokasi puri yang saat itu menjadi pusat orientasi penduduk berada di sebelah utara pasar (Salain dalam Wiasti, 2010; 52).

Ditinjau dari segi ruang (*space*), pada awalnya Kota Denpasar menjadi pusat Kerajaan Badung, yang pada mulanya merupakan sebuah taman. Taman ini disebut-sebut bukanlah sekadar taman

karena taman ini merupakan kesayangan Raja Badung Kyai Jambe Ksatria yang beristana di Puri Jambe Ksatria di Pasar Satria sampai ke utara, yang sampai sekarang pasar ini masih tetap ajeg.

Selain itu, taman ini dilengkapi pula dengan tempat peraduan yang diperuntukkan khusus bagi tamu-tamu yang datang dari luar Badung. Taman itu terletak di sebelah utara pasar, tepatnya di rumah jabatan Gubernur Bali, sekarang bernama Jaya Sabha. Awalnya pasar terletak di lapangan Puputan Badung sekarang, tapi pada zaman Belanda pasar itu dipindah ke dekat Tukad Badung sehingga dikenal sebagai Pasar Badung. Oleh karena itu, Kota Denpasar merupakan perkembangan dari wilayah kerajaan yang saat itu Puri Denpasar menjadi pusat pemerintahannya.

Pada tahun 1779 terjadi konflik antara Kyai Jambe Ksatria dengan I Gusti Ngurah Rai. Padahal, I Gusti Ngurah Rai tak lain orang kepercayaan Kyai Jambe Ksatria, terutama dalam hal permainan aduan ayam. Konflik ini berujung pada terbunuhnya Kyai Jambe Ksatria. Pascaterbunuhnya Kyai Jambe Ksatria, kekuasaan dilimpahkan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Pelimpahan kekuasaan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan menandai berakhirnya kekuasaan Puri Jambe Ksatria. Peralpnya, I Gusti Ngurah Made Pemecutan mendirikan istana baru di Taman Denpasar. Istana baru itulah dinamai Puri Denpasar dan di-pelaspas pada tahun 1788. I Gusti Ngurah Made Pemecutan pun dinobatkan sebagai Raja Denpasar I. Tahun 1788 inilah sebagai tonggak kelahiran Kota Denpasar (Sujaya: <http://www.balebengong.net>).

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan selanjutnya pada tahun 1958 Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintah-an Provinsi Bali sekaligus menjadi ibu kota. Pada awalnya Kota Denpasar dijadikan sebagai kota Administratif dengan fokus orientasi pada urusan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, dengan

dijadikannya sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Badung dan sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, maka tidak bisa dipungkiri menjadi pusat orientasi berbagai aspek kehidupan dari berbagai penjuru wilayah pemerintahan sehingga secara pasti mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya maupun demografinya.

Selain sebagai pusat pemerintahan, secara otomatis Kota Denpasar juga menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pariwisata yang pada awalnya secara keseluruhan wilayahnya di bagi menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan kota administratif ini dari berbagai sektor begitu pesat, maka tidak mungkin ditangani oleh pemerintahan sebatas pemerintahan yang berstatus kota administratif. Oleh karena itu, selanjutnya sesuai dengan perkembangan kota serta berbagai pertimbangan antara provinsi Bali dan Kabupaten Badung sepakat untuk meningkatkan status kota administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Setelah kota Denpasar dirubah statusnya, yaitu dari kota administratif menjadi Kota Denpasar berarti juga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan kota. Selanjutnya dijelaskan mengenai Lambang Kota Denpasar serta visi dan misinya dalam menjalani pemerintahan periode 2014—2019.

### **3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasan**

Masing-masing daerah tingkat II kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali telah memiliki lambang tersendiri. Lambang Kota Denpasar berbentuk segi lima sama sisi sebagai berikut.



**Gambar 3.2: Lambang Kota Denpasar**



*Sumber: Denpasar dalam Angka 2018*

Warna dasar segi lima sama sisi pada lambang Kota Denpasar, yaitu berwarna biru laut, sedangkan garis pinggirnya berwarna hitam. Pita berwarna putih pada bagian bawahnya tertulis motto “PURADHIPA BHARA BHAVANA”, yang mengandung arti, yaitu “kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat”. Di dalam segi lima sama sisi tersebut, terdapat pula lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang Kota Denpasar. Adapun unsur-unsur lambang yang dimaksud sebagai berikut.

1. Segi lima sama sisi
  - a) Dasarnya berbentuk segi lima sama sisi berarti bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
  - b) Warna dasar biru laut melambangkan keagungan.
  - c) Garis pinggir berwarna putih melambangkan kesucian/budi luhur, dan warna hitam melambangkan kekuatan.

2. *Padmasana Jagatnatha*

- a) Melambangkan alam semesta tempat suci untuk pemujaan *Ida Sanghyang Widhi Wasa*.
- b) Jagatnatha dapat pula diartikan sebagai tempat pemerintahan atau penguasa. Jadi *Jagatnatha* dalam hal ini diartikan sebagai Denpasar merupakan pusat pemerintahan.
- c) Warna kuning emas pada Pura Jagadnatha melambangkan tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

3. Keris

- a) Melambangkan jiwa/melintas keperwiraan yang lazim disebut jiwa keperwiraan.
- b) Keris juga melambangkan bahwa Kota Denpasar sebagai kota perjuangan.
- c) Warna hitam dalam keris melambangkan ketegasan.

4. Candi Bentar

- a) Melambangkan kebudayaan, yakni Kota Denpasar memiliki kebudayaan yang bersifat khas.
- b) Candi bentar juga diartikan sebagai pintu gerbangnya Provinsi Bali.

5. Tangga yang berjumlah tiga buah

Melambangkan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar selalu berlandaskan konsep TRI KAYA PARISUDHA.

6. Lingkaran bunga teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan asta dala atau asta beratha.

7. Padi Kapas serta rantai (gelang) 2 (dua) melambangkan

- a) Padi yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27.
- b) Rantai (gelang) berjumlah dua buah melambangkan bulan dua (Februari).

- c) Kapas dengan bunga berjumlah 9 (Sembilan) buah dan daun dua helai melambangkan tahun 92. Dengan demikian, padi, kapas, serta rantai sebagai pengikat padi kapas melambangkan bahwa Kota Denpasar lahir pada tanggal 27 Februari 1992.

### **3.4 Visi dan Misi**

Kota Denpasar yang dipimpin oleh Walikota sebagai pucuk pimpinan didalam melaksanakan roda pemerintahan merumuskan program-program pembangunan dan kebijakan-kebijakannya. Penyusunan program-program dan kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan dengan mengacu kepada visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon yang terpilih menjadi Walikota (Walikota dan Wakilnya). Visi dan misi ini mengarahkan pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut.

#### **3.4.1 Visi**

Rumusan visi Kota Denpasar adalah “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan.” Rumusannya ini mengandung makna yang mendalam sesuai dengan potensi Kota Denpasar, baik di bidang sosial, budaya, agama, maupun lingkungan alam dan fisiknya.

Relevan dengan rumusan visi Kota Denpasar, secara historis Bali mengalami upaya penguatan budaya agar dapat disuguhkan kepada wisatawan, pertama melalui proyek pemerintahan kolonial Belanda, yang disebut Balinisering, Kedua, sejak 1970-an pemerintah Bali mengembang-kan pula konsep pariwisata budaya (Paramarta, 2013: 107). Dengan demikian, dalam upaya Bali tetap *ajeg* maka dirumuskan visi Kota Denpasar sebagaimana tersebut di atas.

### 3.4.2 Misi

Relevan dengan rumusan visi tersebut di atas maka dirumuskan misi Kota Denpasar sebagai berikut.

- a) Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan budaya Bali.
- b) Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif.
- c) Mewujudkan pemerintah yang Baik (*good governance*) melalui penegakan supremasi hukum (*law enforcement*).
- d) Meningkatkan pelayanan public menuju kesejahteraan masyarakat (*welfare society*).
- e) Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan.

### 3.5 Sistem Pemerintahan

Dalam upaya mengefektifkan roda pemerintahan maka wilayah administrasi Kota Denpasar dibagi menjadi empat kecamatan. Adapun keempat kecamatan yang dimaksud, yaitu (1) Kecamatan Denpasar Selatan, (2) Kecamatan Denpasar Timur, (3) Kecamatan Denpasar Barat, dan (4) Kecamatan Denpasar Utara. Masing-masing kecamatan tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai pucuk pimpinan yang bernama camat.

Secara fungsional dan struktural di masing-masing camat terbagi menjadi beberapa desa dinas/kelurahan, dan desa adat. Pucuk pimpinan di level desa dinas bernama perbekel atau kepala desa, sedangkan di level kelurahan bernama lurah dan di level desa adat bernama *bendesa*. Selanjutnya, di level desa secara fungsional dan struktural dibagi lagi menjadi *banjar dinas* dan *banjar adat*.

Dalam konteks ini, di Bali pada umumnya dan di Kota Denpasar khususnya di level pemerintahan di tingkat desa dan *banjar* telah terjadi pemisahan penanganan di bidang kedinasan dan bidang adat.

Demikian pula, di level *banjar*, ada disebut *banjar adat* dan *banjar dinas*. Walaupun demikian, dalam menjalani kewajiban sehari-hari antara desa dinas dan desa adat serta antara *banjar* dinas dan *banjar* adat bersinergi, baik secara intern maupun ekstern. Tabel 3.3 berikut ini mencantumkan secara lengkap cakupan wilayah Kota Denpasar.

**Tabel 3.2: Jumlah Desa/Kelurahan & Banjar / Lingkungan per Kecamatan Dirinci Menurut Dinas & Pakraman Tahun 2018**

Kecamatan	Letak Ibu Kota Kecamatan	Desa			Banjar	
		Dinas	Kelurahan	Adat	Dinas	Adat
Denpasar Utara	Desa Dauh Puri Kaja	8	3	10	102	59
Denpasar Timur	Kelurahan Kesiman	7	4	12	87	89
Denpasar Selatan	Kelurahan Sesetan	4	6	11	105	92
Denpasar Barat	Kelurahan Padangsambian	8	3	2	112	119
Jumlah		27	16	35	406	359

Sumber : BPS, Kota Denpasar Dalam Angka 2018

Di Bali pada umumnya dan khususnya Kota Denpasar, terbentuknya kelurahan merupakan pengembangan dari desa setempat. Misalnya, Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan yang sebelumnya terdiri atas 28 *banjar*, kemudian pada awal tahun 1980-an dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu 14 *banjar* di bagian timur statusnya menjadi kelurahan, sedangkan 14 *banjar* di sebelah barat statusnya menjadi Desa Pemogan.

Sampai pada tahun 2018 pengembangan desa menjadi kelurahan dapat disebut cukup pesat karena jumlah kelurahan di Kota Denpasar sudah mencapai 16 kelurahan. Kecamatan Denpasar Selatan

yang memiliki kelurahan paling banyak, yaitu 6 kelurahan dan 6 desa dinas, sedangkan Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat masing-masing memiliki 3 kelurahan dan 8 desa dinas. Sementara ini, Kecamatan Denpasar Timur memiliki 4 kelurahan dan 7 desa dinas.

Sebagaimana yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu di bawah pemerintahan desa/kelurahan terdapat dusun/lingkungan. Namun di Bali, dusun/lingkungan disejajarkan dengan *banjar*, yaitu banjar dinas, sehingga di Bale Banjar papan namanya tertulis Dusun/*Banjar* jika dusun itu merupakan wilayah kerja pemerintah desa. Jika, *banjar* merupakan wilayah kerja sebuah kelurahan maka di papan namanya ditulis lingkungan/*banjar*.

### 3.6 Kondisi Demografi

Denpasar yang menjadi ibu kota daerah tingkat II Kota Denpasar dan menjadi Ibu Kota Daerah Tingkat I Provinsi Bali telah menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perekonomian, pusat pariwisata di Bali. Hal ini menjadi faktor penarik para migran, baik yang berasal dari Pulau Bali maupun luar Pulau Bali yang datang dan tinggal di kota Denpasar dengan berbagai kepentingan. Di antara migran tersebut relatif banyak juga yang memiliki tempat tinggal di Kota Denpasar dan akhirnya menjadi penduduk di kota ini.

Ditinjau dari pendekatan identitas, dapat dibedakan dengan jelas atribut-atribut yang melekat pada seseorang yang membedakan seseorang apakah penduduk asli Bali maupun tidak asli Bali. Atribut yang paling menonjol, yaitu pada umumnya dari nama lengkapnya. Oleh karena itu, penduduk Kota Denpasar bersifat heterogen. Heterogenitas yang menonjol penduduk Kota Denpasar dapat ditinjau berdasarkan atas beberapa indikator, antara lain suku, bahasa, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Di Denpasar, penduduknya tidak saja merupakan suku Bali, tetapi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian,

dalam percakapan sehari-hari acapkali terdengar dialek-dialek atau logat yang berbeda-beda. Misalnya, logat Bali, logat Jawa, logat NTT yang relatif mudah dikenali di Kota Denpasar. Demikian pula, di kalangan orang yang merasa berasal dari satu suku acapkali pula menggunakan bahasa daerahnya untuk bercakap-cakap dengan sesama teman-temannya. Selanjutnya, tabel 3.3 di bawah ini menunjukkan penduduk Kota Denpasar menurut jenis kelamin dan sex rasionya berdasarkan kelompok umurnya.

**Tabel 3.3: Persentase Penduduk dan Sex Ratio menurut Jenis Kelamin Kelompok Umur Penduduk Kota Denpasar, 2018**

Kelompok Umur	2018				Sex Ratio	
	L	%	P	%	2017	2018
0 – 4	39,500	8.26	31,800	7.07	103.70	124.21
5 – 9	36,800	7.70	35,100	7.81	105.68	104.84
10 - 14	35,800	8.056	34,100	7.59	103.24	112.90
15- 19	37,700	7.89	39,600	8.81	95.04	95.20
20 – 24	49,000	10.25	49,000	10.90	99.58	100
25 – 29	50,700	10.61	48,300	10.75	105.68	104.97
20 – 34	45,600	9.54	41,400	9.21	108.56	110.14
35 – 39	39,900	8.35	38,700	8.61	103.12	103.10
40 – 44	39,600	8.28	36,500	8.12	108.56	108.49
45 – 49	33,100	6.92	30,000	6.67	110.96	110.33
50 – 54	25,900	5.42	23,100	5.14	112.39	112.12
55 – 59	17,400	3.64	16,200	3.60	107.74	107.41
60 – 64	10,800	2.26	10,100	2.24	108.42	106.93
65 – 69	6,500	1.36	6,600	1.46	100	98.48
70 – 74	3,500	0.73	4,000	0.89	92.11	87.5
75 tahun +	3,300	0.69	4,700	1.04	68.89	70.21
Jumlah	475,100	100.00	449,200	100.00	100.06	106.37

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2020

Sesuai dengan komposisi angka-angka pada tabel 3.3 di atas, jika ditinjau dari segi umurnya ternyata kelompok umur penduduk

yang berusia 20—29 tahun persentasenya paling tinggi dibandingkan dengan kelompok umur yang lainnya,. Selanjutnya, ditinjau persentase jumlah penduduk yang berumur 0—18 tahun menunjukkan relatif tinggi persentasenya. Penduduk yang berusia 0—18 tahun dikategorikan berusia anak-anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak. Namun, jika dilihat posisinya dalam tabel 3.3 di atas, pengelompokan umur ini termasuk pula penduduk yang berusia 19 tahun.

Berdasarkan atas pengelompokan umur, penduduk yang berusia 60 tahun ke atas digolongkan penduduk yang berusia lanjut, menunjukkan persentasenya yang tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, jika diakumulasi penduduk yang berusia anak-anak dan berusia lanjut yang dikategorikan sebagai usia yang masih ketergantungan kepada usia penduduk produktif menunjukkan jumlah yang relatif rendah. Ini artinya penduduk Kota Denpasar didominasi oleh penduduk yang berusia produktif.

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2017 jika ditinjau dari jenis kelaminnya tidak menunjukkan perbedaan jumlah yang mencolok. Namun, dari perspektif gender, jumlahnya penduduk Kota Denpasar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Dari segi kuantitatif, pertumbuhan penduduk Kota Denpasar selama satu tahun terakhir ini, yaitu tahun 2017—2018 cukup penting diperhatikan karena jumlahnya menjadi bertambah secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 berjumlah 933.100, dengan rincian: 466.700 laki-laki dan 466,400 perempuan. Kemudian, di tahun 2018 jumlah penduduk Kota Denpasar menjadi 924.300, dengan rincian, 475.100 laki-laki dan 449.200 perempuan. Dengan demikian, ditinjau dari rasio jenis kelaminnya peningkatan jumlah pendudukan bila ditinjau dari persentasenya terjadi peningkatan dari 68,89 menjadi 70,21. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kota Denpasar perlu mendapat perhatian dari



pemerintah dengan melakukan penertiban penduduk, supaya implikasi peningkatan jumlah penduduk itu dapat diketahui dan dikendalikan. Dengan melakukan penertiban penduduk akan dapat diketahui apakah terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kota Denpasar disebabkan oleh kelahiran atau peningkatan jumlah penduduk pendatang. Pada kenyataannya, relatif banyak pula penduduk pendatang yang mengadu nasib ke Kota Denpasar dan menetap di sini sehingga menimbulkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh kesempatan kerja.

### **3.7 Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan**

Dalam kehidupan orang Bali, status perkawinan merupakan suatu saat yang amat penting karena dengan perkawinan secara resmi atau pernikahan barulah ia dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat. Kemudian, sesudah itulah ia memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang warga komunitas dan kelompok kerabatnya masing-masing (Bagus, 1979: 2670). Ditegaskan, perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan di antara warga seklen, atau setidaknya-tidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta karena menganut adat perkawinan endogami.

Sementara ini, secara nasional Pemerintah Indonesia mengatur jenjang umur seseorang yang dipandang ideal untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin di Kota Denpasar.

**Tabel 3.4: Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Berstatus Kawin Menurut Jenis Kelamin, 2018**

Karakteristik	Umur (Tahun)	Status Perkawinan				Jumlah
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
Laki - Laki	10 – 14	38.75	58.19	1.05	2.01	100.00
	15 – 49	39.99	58.82	0.85	0.34	100.00
Perempuan	10 – 14	33.63	59.08	1.52	5.77	100.00
	15 – 49	32.29	64.63	1.42	1.65	100.00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2018

Data pada tabel 3.4 di depan menunjukkan bahwa relatif banyak tercatat penduduk berjenis kelamin laki-laki (58.19%) maupun perempuan (59.08%) berstatus kawin yang berumur 10—14 tahun. Data ini menunjukkan ternyata di Kota Denpasar terdapat masih relatif banyak yang menikah di bawah umur. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai umur penduduk yang dipandang ideal menikah, yaitu apabila berumur 27—28 tahun bagi penduduk laki-laki, sedangkan penduduk perempuan berumur 25—26 tahun.

Di antara penduduk laki-laki dan perempuan yang berumur 10—14 tahun yang pernah berstatus kawin sebelumnya, ternyata ada yang berstatus duda dan janda, Di kalangan penduduk laki-laki yang berstatus duda, ada yang cerai hidup (1,05%) dan cerai mati (2,01%), sedangkan yang berstatus janda, ada pula yang cerai hidup (1.52%) dan cerai mati (5.77%). Yang menarik di sini, yang berstatus janda didominasi dengan status perceraian mati. Ini berarti, ia menjanda karena suaminya meninggal dunia. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam upaya untuk mengungkap mengapa penduduk perempuan yang berstatus janda karena suaminya meninggal dunia. Dengan demikian, diperlukan

informasi atau data yang lebih mendalam sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan.

Sementara ini, penduduk laki-laki yang berumur berumur 15—49 tahun, yang tercatat sudah menikah sekitar 58,82%, sedangkan di pihak penduduk perempuan yang sudah menikah sekitar 64,63 %. Selain itu, penduduk berumur 15—49 tahun masih ada yang belum menikah, yaitu sekitar 39,99% bagi penduduk laki-laki dan sekitar 32,29% bagi penduduk perempuan. Di lain pihak, penduduk yang sudah pernah menikah berumur 15—49 tahun ada berstatus cerai, yaitu cerai hidup dan cerai mati, namun persentasenya relatif kecil. Walaupun demikian, diperlukan informasi atau data yang lebih mendalam juga untuk mengungkap mengapa terjadi perceraian itu, baik di kalangan penduduk yang termasuk kelompok umur 10—14 tahun maupun 15—49 tahun. Pada umumnya, seseorang yang melakukan perkawinan atau pernikahan secara resmi biasanya mengharapkan dan mendoakan rumah tangganya langgeng dan sejahtera selama hayat masih di kandung badan.

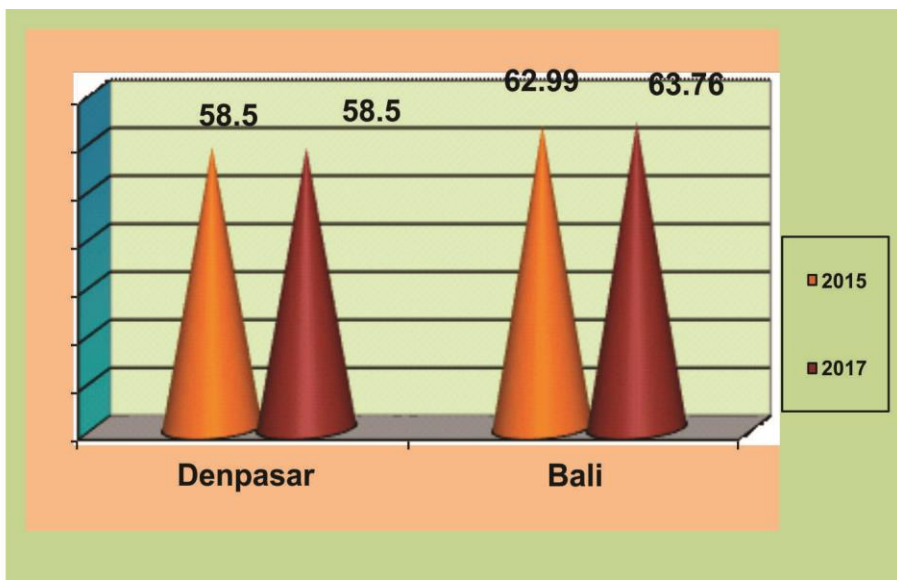
### **3.8 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indek pemberdayaan gender merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana sumbangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Indek pemberdayaan gender atau disingkat IDG terdiri dari tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh nonpertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

Terkait dengan indek pemberdayaan gender di Kota Denpasar tampaknya masih relatif rendah yakni baru mencapai 58,50 pada tahun 2015 dan angka ini belum mengalami perubahan di tahun 2017

artinya belum terjadi perubahan. Jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Bali tampaknya IDG Kota Denpasar masih lebih rendah. Rendahnya angka IDG ini kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya peran perempuan yang terlibat di parlemen atau di DPRD Kota Denpasar yang hanya mencapai angka 2,22 tahun 2015 maupun tahun 2017.

**Gambar: 3.3** **Indek Pemberdayaan Gender Kota Denpasar tahun 2015 dan 2017**



Sumber: <https://denpasarkota.bps.go.id/>

### 3.9. **Indek Pembangunan Gender (IPG)**

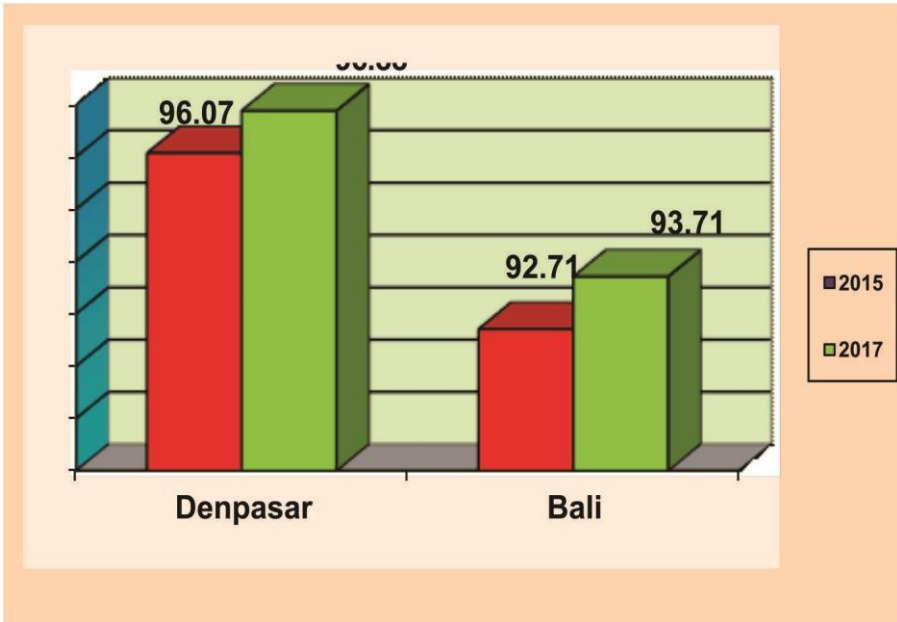
Pembangunan Manusia Indonesia menurut kesetaraan gender menunjukkan tren perbaikan. Ini tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada 2018 yang berada di level 90,99 dari skala 0-100. Indeks tersebut naik 0,03 poin persentase dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, IPG mendekati 100 mengindikasikan

semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (<https://databoks.katadata.co.id/>).

Indek pembangunan gender (IPG) merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan menuju kesetaraan gender. Semakin tinggi angka IPG suatu daerah menunjukkan bahwa kesetaraan gender dari daerah tersebut semakin bagus. Jika dilihat dari definisinya Indek Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG sebagai indek komposit juga memiliki komponen-komponen pembentuk yang turut menentukan nilai dari IPG itu sendiri. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. Oleh karena itu, pada gambar berikut akan disajikan perkembangan IPG di Kota Denpasar tahun 2015 dan tahun 2017. perbandingan dengan Bali selama dua tahun.

Gambar: 3.4 Perkembangan IPG Kota Denpasar dan Bali Tahun 2015 dan 2017



Sumber: <https://denpasarkota.bps.go.id>.

Dari data pada gambar 3.2 di atas tampak bahwa angka IPG Kota Denpasar tahun 2017 naik 0,81 poin dibandingkan tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan gender di beberapa aspek yang terkait dengan indikator IPG seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi disparitas gendernya semakin mengecil. Untuk mengetahui jawaban yang pasti entah indikator mana yang mempengaruhinya tentu perlu dilakukan kajian lebih jauh. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan kondisi IPG Provinsi Bali, IPG Denpasar masih berada di atas IPG Bali. Ini menandakan kondisi kesetaraan gender di Denpasar masih lebih bagus dibandingkan Bali secara keseluruhan. Dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada praktiknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundangundangan yang dihasilkan oleh negara maupun lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan ekonomi

## BAB IV

# PENDIDIKAN

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha mengadakan perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) manusia secara teratur sejak lahir sampai mati. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa.

Dalam kaitannya dengan belajar, pendidikan dapat pula dimaksud adalah usaha mengubah perilaku orang lain, sedangkan belajar diartikan sebagai usaha aktif seseorang untuk mengubah perilakunya sendiri. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pendidikan dan belajar merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan (Sudarta, 1988). Dengan demikian maka sudah dipastikan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi itu, dapat dicapai melalui mekanisme pendidikan tersebut.

Dalam akselerasi pembangunan di segala bidang (ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan) di negeri ini umumnya dan di Kabupaten Karangasem khususnya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Dinyatakan oleh Sinaga dan Sri Hadiati (2001), Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai suatu daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula disebut tenaga atau kekuatan (energi atau *power*) yang melekat pada manusia, dalam arti mempunyai kompetensi, yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).



Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Amanat ini mengandung makna bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun dewasa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III Pasal 4 Ayat (1) juga dinyatakan bahwa pendidikan diadakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada Bab IV Pasal 5 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berikut ini akan dibahas mengenai keadaan pendidikan, dilihat dari analisis gender terhadap beberapa indikator pendidikan di Kota Denpasar.

#### **4.1 Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sukses tidaknya upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. APM diartikan sebagai suatu perbandingan antara jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk usia Sekolah Dasar (SD) 7 sampai dengan 12 tahun, penduduk usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13 sampai dengan 15 tahun dan penduduk usia Sekolah Menengah Atas (SMA) 16 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan pengertian itu dapat diambil contoh, APM SD merupakan perbandingan antara jumlah siswa SD dengan jumlah penduduk usia 7 sampai 12 tahun.

Keadaan APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/Mts.) tampak sebagai berikut.

**Tabel: 4.1 APM pada Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 – 2017/2018**

Tingkatan Sekolah	2016/2017		2017/2018	
	L	P	L	P
SD/MI	87,32	86,46	89,59	87,93
SMP/MTs	79,58	74,73	81,17	76,91
Rata-rata	83,45	80,59	85,38	82,42

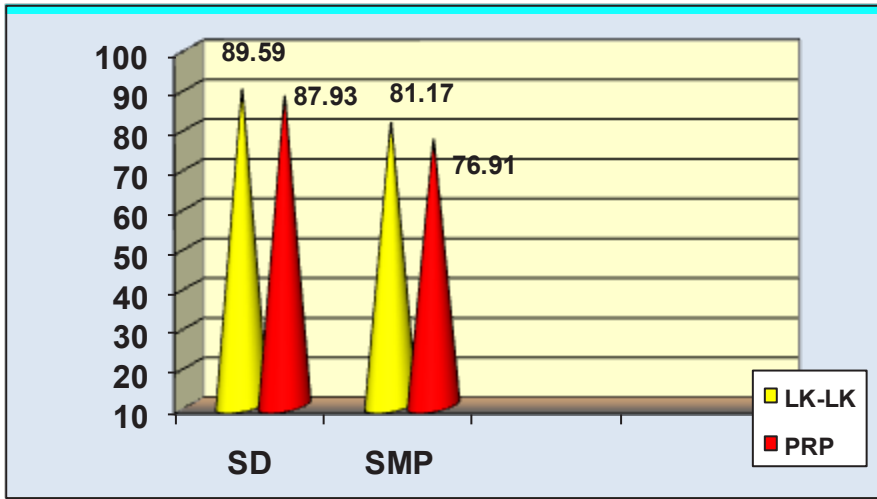
Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Denpasar tahun 2018 yang tertuang pada tabel 4.1 ini terungkap bahwa secara umum angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 – 2017/2018 tampak cukup menggembirakan karena rata-rata APM pada jenjang pendidikan tersebut mengalami peningkatan, tetapi kurang menggembirakan karena belum mencapai angka 100%. APM pada jenjang pendidikan SD/MI adalah yang tertinggi yakni 85,38% laki-laki dan 82,42% untuk perempuan (2017-2018).

Sementara itu jika ditinjau dari perspektif gender rata-rata APM perempuan di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs sedikit lebih rendah dibandingkan PM laki-laki. Kondisi tersebut kurang baik dan memerlukan perhatian semua pihak terkait untuk dicari penyebabnya sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Terlebih-lebih jika dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun bagi penduduk.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik maka perbandingan APM per jenjang pendidikan tahun 2018 tampak seperti gambar 4.1. Berdasarkan data yang tercantum pada gambar 4.1 dapat dipahami sebagai berikut .APM di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD-SMA masih di bawah 100%. Rata-rata APM yang masih di bawah 100 pada jenjang pendidikan SD-SMA perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai penyebab rendahnya APM tersebut. Berdasarkan hasil kajian itu, sangat dimungkinkan untuk merumuskan alternatif pemecahannya secara lebih tepat, sehingga dapat memberikan hasil secara lebih baik.

**Gambar: 4.1 Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI-SMP/MTs dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

#### 4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi siswa/murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan usia

mereka, maka digunakanlah Angka Partisipasi Kasar (APK) tersebut. APK diartikan sebagai proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Selain Angka Partisipasi Murni (APM) sebagaimana diuraikan di atas angka partisipasi kasar (APK) adalah indikator lain yang dipakai untuk mengukur partisipasi penduduk di bidang pendidikan. APK tingkat SD sebagai contoh, dihitung dengan rumus jumlah penduduk yang bersekolah di SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun dikalikan 100. APK pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 – 2017/2018 dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel : 4.2 APK menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 - 2017/2018**

Tingkatan Sekolah	2016/2017		2017/2018	
	L	P	L	P
SD/MI	98,03	96,88	98,14	96,19
SMP/MTs	107,72	103,03	103,34	99,04
Rata-rata	102.87	99.95	100,74	97,62

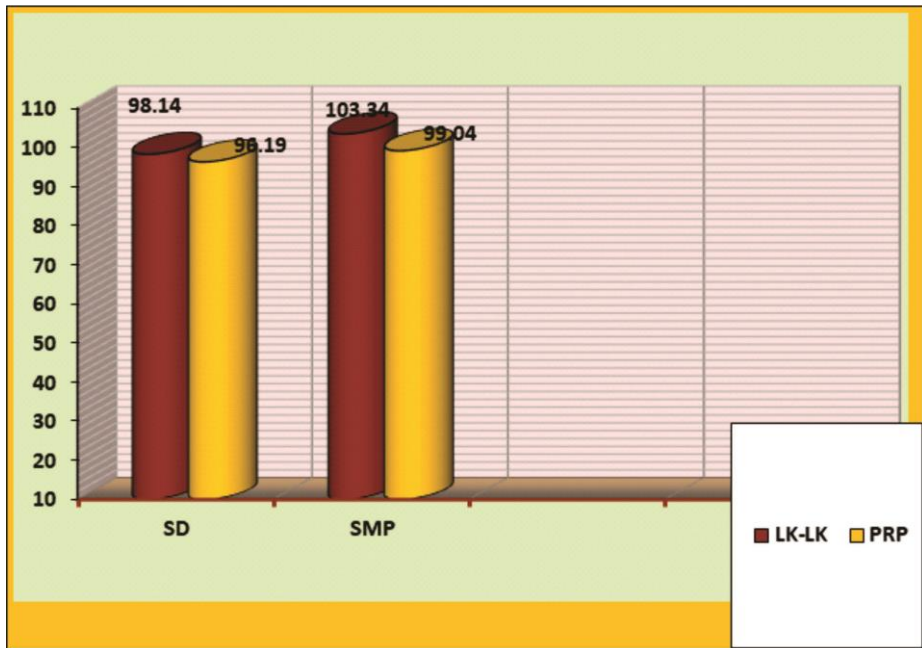
Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan data dari Profil Pendidikan Kota Denpasar tahun 2018 yang dituangkan pada tabel di atas tampak bahwa secara umum rata-rata APK pada semua jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 – 2017/2018 cukup tinggi bahkan melebihi angka 100% yaitu 102,87% (2016/2017), dan sedikit mengalami penurunan, yakni 97,62 % (2017/2018) untuk laki-laki. Secara keseluruhan rata-rata APK yang cukup proporsional antara laki-laki dan perempuan.

Tetapi jika ditinjau dari perspektif gender kondisi APK SD/MI dan SMP/MTs di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 – 2017/2018 APK laki-laki jauh lebih tinggi daripada APK perempuan yaitu 102,87% : 99,95% dan 100,74% : 97,62%. Hal menjadi menarik untuk ditelusuri, mengingat pada jenjang pendidikan tersebut tidak dikenakan biaya (terkait dengan program wajib belajar 9 tahun) tetapi mengapa APK perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Jika digambarkan secara umum perbandingan APK anak laki-laki dan perempuan berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2016/2017 – 2017/2018 dapat dilihat seperti pada grafik berikut ini.

**Gambar: 4.2 Persentase Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017/2018**



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Dari data yang tertuang pada gambar 4.2 dapat diketahui beberapa hal penting sebagai berikut. APK tingkat SD sampai SMA di Kota Denpasar pada tahun 2018 melebihi angka 100% terutama untuk anak laki-laki di SMP dan SMA. Ini artinya bahwa di SMP dan SMA masih ada anak laki-laki yang duduk di kelas tertentu tidak sesuai umurnya. Bisa jadi melebihi usia sepantasnya yang kemungkinan karena tidak naik kelas, tetapi bisa juga karena percepatan.

### **4.3 Jumlah Siswa**

Siswa adalah pelajar yang duduk di meja belajar setrata sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah ke atas (SMA). Siswa-siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dalam dunia pendidikan. Siswa atau pesetra didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri (Kompas,1985).

Upaya untuk meningkatkan jumlah siswa pada semua jenjang pendidikan selalu dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah melalui program wajib belajar sembilan tahun yang bertujuan untuk mendorong semua penduduk minimal berpendidikan SD- SMP. Di samping itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan suatu bangsa, khususnya di bidang pendidikan dapat dilihat juga dari jumlah siswa pada semua jenjang pendidikan. Jumlah siswa juga menunjukkan capaian dari niat dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh penduduk. Terkait dengan jumlah siswa sekolah pada semua jenjang pendidikan yang tercatat di Kota Denpasar dijelaskan sebagai berikut.

### 4.3.1 Jumlah Siswa PAUD

Taman kanak-kanak atau disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), yaitu usia sampai dengan 6 tahun. Usia anak masuk TK adalah 4-5 tahun dan menyelesaikan pendidikan di usia 6 tahun. Jenjang pendidikan di TK adalah TK 0 Kecil (TK Kecil) dan TK 0 Besar (TK Besar). Pada umumnya para orang tua zaman sekarang terutama di daerah perkotaan telah memiliki kesadaran dan partisipasi yang sangat tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya di TK.

Jumlah siswa PAUD menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2017-2018 dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini.

**Tabel: 4.3 Jumlah Siswa PAUD menurut jenis Kelamin 2017-2018**

NO	Kecamatan	2017			2018		
		L	P	Jlh	L	P	Jlh
1	Denpasar Barat	2,378	2,297	4,675	2.768	2.683	5.451
2	Denpasar Selatan	1,645	1,397	3,042	2.855	2.629	5.484
3	Denpasar Timur	1,795	1,658	3,453	2.091	2.024	4.115
4	Denpasar Utara	2,088	1,076	4,064	2.631	2.372	5.003
	Jumlah	7.906	7.428	15.334	10.345	9.708	20.053

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Jika dicermati tabel 4.3 di atas tampak jelas bahwa keseluruhan jumlah siswa PAUD menurut jenis kelamin dan kecamatan tahun 2017-2018 sebanyak 20.053 orang, atau mengalami kenaikan sebanyak sebanyak 4.719 orang (20,84%) tahun 2018. Siswa TK terbanyak ada di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan (5.481 orang) dan terkecil di

Kecamatan Denpasar Timur (4.115 orang). Perbandingan siswa laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan yakni Laki-laki 10.345 orang dan Perempuan 9.708 orang. Ini menunjukkan kondisi yang cukup berimbang.

Ada satu hal penting yang mesti diperhatikan dalam kaitan dengan Sekolah Taman Kanak-kanak, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran. Sistem pembelajaran di TK tidak jauh berbeda dengan di SD, SMP, SMA, yaitu menekankan kecerdasan intelektualitas. Padahal berdasarkan kurikulum TK, pendidikan dan pengajaran di TK seharusnya yang lebih ditekankan adalah pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. ([Id.wikipedia.org/./Taman\\_kanak-kanak](http://id.wikipedia.org/./Taman_kanak-kanak)). Kedua, yang perlu dipikirkan dan ditindaklanjuti adalah memberikan porsi pembelajaran yang berimbang antara bidang sosial dengan bidang sains. Pembelajaran sosial seperti bagaimana anak-anak bisa berbagi makanan atau cerita, berterima kasih, bertenggang rasa, bermain dan makan bersama, dan lain-lain sangat penting dalam pembentukan karakter. Dengan demikian anak-anak sejak dini telah belajar tentang nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dapat mengemukakan pendapat, menghargai barang dan atau orang lain.

#### **4.3.2 Jumlah Siswa SD**

Siswa adalah anak usia sekolah yang berpartisipasi aktif mengikuti pendidikan formal persekolahan sesuai dengan penjenjangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jumlah siswa SD menurut jenis kelamin dan kecamatan 2017-2018 di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.



**Tabel: 4.4 Jumlah Siswa SD menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2018**

NO	Kecamatan	TOTAL		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	12.207	11.206	23.413
2	Kec. Denpasar Selatan	11.239	10.190	21.429
3	Kec. Denpasar Timur	9.269	8.209	17.478
4	Kec. Denpasar Utara	10.599	9.771	20.370
	Jumlah	43.314	39.376	82.690

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Tabel 4.4 yang dikutip dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar menggambarkan secara keseluruhan jumlah siswa SD tahun 2018 sebanyak 82.690 orang dengan rincian laki-laki 43.314 orang dan perempuan 39.376 orang. Secara rinci jumlah siswa SD terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Barat yakni 23.413 orang, dan terkecil ada di Kecamatan Denpasar Timur yakni sebanyak 17.478 orang. Dilihat dari perspektif gender perbandingan, siswa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ini berarti terjadi kesenjangan gender pada siswa perempuan, yang perlu dicari faktor penyebabnya.

### 4.3.3 Jumlah Siswa SMP

Jika dibandingkan dengan siswa sekolah Dasar (SD) jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP di Kota Denpasar pada tahun 2018 jumlahnya jauh lebih kecil. Secara rinci jumlah siswa SMP di Kota Denpasar pada tahun 2018 seperti terpapar pada Tabel 4.21 berikut ini.

**Tabel: 4.5 Jumlah Siswa SMP menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2018**

NO	Kecamatan	TOTAL		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	3.913	3.628	7.541
2	Kec. Denpasar Selatan	5.334	4.820	10.154
3	Kec. Denpasar Timur	3.189	3.028	6.217
4	Kec. Denpasar Utara	7.151	6.548	13.699
5.	Jumlah	19.587	18.024	37.611

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Dari tabel 4.5 di atas tampak bahwa secara keseluruhan jumlah siswa SMP di Kota Denpasar tahun 2018 adalah 37.611 orang dengan perbandingan siswa laki-laki 19.587 orang dan perempuan 18.024 orang. Sementara itu jumlah siswa SMP terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Utara yaitu 13.699 orang dan terendah di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 6.217 orang. Jika dilihat dari perspektif gender secara umum tampaknya masih tetap didominasi oleh siswa laki-laki. Oleh karena itu pada jenjang pendidikan ini tampaknya belum mencerminkan terjadinya kesetaraan gender, tetapi tidak terlalu menonjol.

#### **4.3.4 Jumlah Siswa SMA dan SMK**

Anggapan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan biasanya jumlah siswa akan semakin menurun. Hal ini terjadi pula di Kota Denpasar dimana jumlah siswa di jenjang pendidikan SMA dan SMK jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa SD dan SMP. Secara rinci kondisi siswa SMA dan SMK di Kota Denpasar seperti terlihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

**Tabel : 4.6 Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2018**

NO	Kecamatan	TOTAL		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	5.409	5.085	10.494
2	Kec. Denpasar Selatan	4.978	4.654	9.632
3	Kec. Denpasar Timur	3.363	3.190	6.553
4	Kec. Denpasar Utara	4.668	4.306	8.974
5	Jumlah	18.418	17.235	35.653

Sumber : Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar 2018

Dari table 4.6 tampak bahwa secara keseluruhan jumlah siswa SMA/MA/SMK di Kota Denpasar tahun 2018 sebanyak 35.653 orang. Siswa SMA/MA/SMK ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, dan terbanyak berada di Kecamatan Denpasar Barat yakni 10.494 orang, dan terkecil yaitu 6.553 orang ditemukan di Denpasar Timur. Jika dilihat perbandingan berdasarkan jenis kelamin, tampak masih tetap didominasi oleh siswa laki-laki, dengan perbandingan 18.418 laki-laki: 17235 perempuan. Ini berarti terjadi ketidakseimbangan gender pada siswa perempuan sama dengan kondisi pada jenjang pendidikan SMP yang diuraikan sebelumnya. Kondisi ini tampaknya perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait agar bisa dicarikan solusi terbaik.

#### **4.3.5 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pada uraian sebelumnya memang telah dijelaskan jumlah siswa per jenjang pendidikan di Kota Denpasar. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan utuh maka pada table berikut akan

dijelaskan jumlah siswa pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Kota Denpasar periode 2016/2017-2017/2018.

**Tabel: 4.7 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, 2016/2017 – 2017/2018**

Tingkatan Sekolah	2016/2017			2017/2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
SD	45.500	42.047	87.547	32.277	30.050	62.327
SMP	20.906	19.402	40.308	17.673	16.558	34.231
SMA	9.371	9.922	19.293	18.418	17.235	35.653
Jumlah	75.777	71.371	147.148	68.368	63.843	132.211

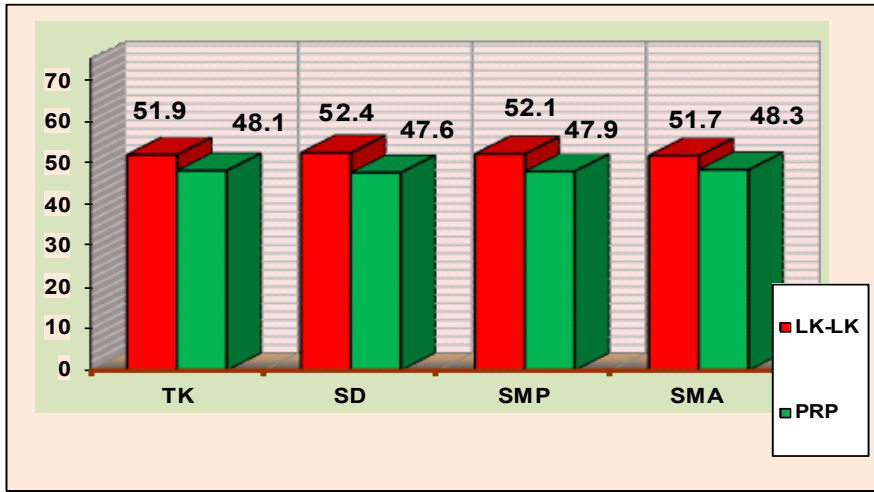
Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa selama 2 tahun terakhir 2016/2017 -2017/2018 secara keseluruhan jumlah siswa pada semua jenjang pendidikan di Kota Denpasar mengalami penurunan sebanyak 142.937 orang, yakni dari 147.148 orang (2016/2017) menjadi 132.211 orang (2017/2018). Jumlah siswa tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD, dan terendah SMA (2016/2017) dan SMP (2017/2018). Kondisi ini menegaskan bahwa jumlah siswa sangat terkait dengan jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan tampak jumlah siswa semakin menurun.

Berdasarkan jenis kelamin, tampak jumlah siswa laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan, dengan perbandingan laki-laki 75.381 orang dan perempuan 66.886 orang. Pertanyaannya mengapa hal ini terjadi, dan jawabannya tentu harus dilakukan pendalaman melalui penelitian untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat.

Secara umum perbandingan persentase siswa laki-laki dan perempuan dari jenjang pendidikan SD – SMA di Kota Denpasar seperti terlihat pada gambar berikut.

**Gambar: 4.3 Persentase Siswa SD- SMA/SMK Menurut Jenis Kelamin di Denpasar Tahun 2018**



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

#### 4.4. Jumlah Siswa Putus Sekolah

Salah satu tujuan Program Wajib Belajar 9 tahun adalah guna mengikis anak putus sekolah. Tetapi sampai saat ini tidak semua siswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar dan sukses, termasuk juga siswa yang ada di Kota Denpasar. Ternyata masih ada juga siswa yang mengalami nasib kurang beruntung, yakni putus sekolah (*drop out*). Data mengenai angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kota Denpasar tahun 2018 diuraikan berikut ini.

#### 4.4.1 Siswa Putus Sekolah SD/Mi

Sudah bisa dipastikan bahwa di semua daerah termasuk di Kota Denpasar tidak semua siswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar dan sukses, tetapi masih ditemukan siswa putus sekolah. Siswa putus sekolah adalah siswa yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan formal sampai tingkat terakhir pada jenjang pendidikan tertentu, yakni jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Penyebab putus sekolah yang dialami oleh sejumlah siswa di antaranya kesulitan ekonomi rumah tangga (hidup di bawah garis kemiskinan), kurangnya kesadaran peserta didik dan kurangnya perhatian orang tua siswa atau peserta didik. Data mengenai angka putus sekolah di Kota Denpasar pada tahun 2018 akan dijelaskan pada uraian berikut.

**Tabel: 4.8 Jumlah Siswa SD/Mi yang Putus Sekolah menurut jenis Kelamin dan Kecamatan 2018**

NO	Kecamatan	2018	
		L	P
1	Kec. Denpasar Barat	2	0
2	Kec. Denpasar Selatan	0	0
3	Kec. Denpasar Timur	0	0
4	Kec. Denpasar Utara	0	2
5	Jumlah	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Data pada Tabel 4.8 tersebut menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Denpasar secara keseluruhan berjumlah 4 orang tersebar di dua kecamatan (Denpasar Barat dan Utra), masing-masing berjumlah 2 orang, terdiri atas siswa laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang. Tergolong kecil memang, tetapi sekecil apapun angka putus

sekolah tersebut, tetap perlu mendapat penanganan dari pihak-pihak terkait secara lebih serius, agar nantinya bisa dicapai kondisi nihil angka putus sekolah.

#### 4.4.2 Angka Putus Sekolah SMP

Angka siswa SMP putus sekolah di Kota Denpasar tahun 2018 cukup menggembirakan. Hanya satu orang siswa SMP/Mts di Kota Denpasar tahun 2018 yang mengalami putus sekolah. Secara rinci angka siswa SMP putus sekolah di Kota Denpasar tahun 2018 disajikan pada tabel 4.9 berikut.

**Tabel: 4.9 Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan 2018**

NO	Kecamatan	2018	
		L	P
1	Kec. Denpasar Barat	0	0
2	Kec. Denpasar Selatan	0	0
3	Kec. Denpasar Timur	1	0
4	Kec. Denpasar Utara	0	0
	Jumlah	1	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah siswa SMP/MTs di Kota Denpasar sebanyak 1 orang ditemukan di Kecamatan Denpasar Timur berjenis kelamin laki-laki. Secara gender dapat dikatakan kondisi siswa SMP putus sekolah cukup seimbang. Meski angka ini sangat kecil tetapi sebaiknya tetap ditelusuri dan dicari penyebabnya untuk menemukan solusi yang tepat sehingga Kota Denpasar bebas siswa putus sekolah.

Secara keseluruhan siswa putus sekolah berumur 7-18 yang bersekolah di SD dan SMP di Kota Denpasar Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel : 4.10 Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun yang Putus Sekolah di Kota Denpasar,2018**

NO	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Denpasar Utara	0	2	2	0	0	0
2	Denpasar Timur	0	0	0	1	0	1
3	Denpasar Selatan	0	0	0	0	0	0
4	Denpasar Barat	2	0	2	0	0	0
	Jumlah	2	2	4	0	0	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

#### 4.5 Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Di era sekarang dengan penyediaan anggaran pendidikan 20% seharusnya tidak ada alasan lagi untuk mengatakan kurangnya anggaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Oleh karena salah satu indikator pendukung keberhasilan pendidikan di suatu daerah adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan sarana penting untuk menciptakan suasana proses belajar mengajar yang baik, sehingga tercapai peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang diinginkan. Berikut akan diuraikan ketersediaan fasilitas pendidikan SD dan SMP di Kota Denpasar

##### 4.5.1 Jumlah Sekolah

Berkaitan dengan jumlah sekolah di Kota Denpasar selama 2 tahun terakhir periode 2016/2017-2017/2018 dipaparkan pada table 4.26 berikut. Melalui tabel tersebut dapat diketahui dari beragam



jenjang pendidikan, terutama jenjang pendidikan formal SD/ sederajat, SLTP/ Sederajat, SLTA/ Sederajat, dan SMK, dan SD/ Sederajat. Secara rinci jumlah sekolah di Kota Denpasar disajikan pada table berikut.

**Tabel: 4.11 Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2016/2017 – 2017/2018**

Pendidikan	2016/2017	2017/2018
TK	294	295
PAUD	455	455
TPA	28	28
SD/ Sederajat	230	240
SLTP/ Sederajat	66	69
SLTA/ Sederajat	34	34
SMK	32	34
Jumlah	1.139	1.155

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Tabel 4.26 menggambarkan bahwa secara keseluruhan sekolah pada beragam jenjang pendidikan di Kota Denpasar berjumlah 1.139 buah (2016/2017) dan mengalami sedikit kenaikan (0,70%) menjadi 1.155 buah (2017/2018). Jumlah sekolah terbanyak ada pada kelompok PAUD, dan terkecil pada jenjang pendidikan SMA/ Sederajat dan SMK. Untuk TPA di Kota Denpasar juga tersedia sebanyak 28 buah selama ma 2 tahun. Keberadaan failitas sekolah ini menegaskan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin sedikit jumlah sekolah, juga berkorelasi dengan jumlah siswa.

#### 4.6 Keberadaan Guru

Keberadaan (eksistensi) guru adalah salah satu unsur yang secara kuantitas dan kualitas, memegang peranan penting. Oleh karena

kualitas peserta didik, banyak ditentukan oleh guru melalui peranan yang harus dijalankannya. Betapa besar dan pentingnya peranan guru dalam dunia pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut berbagai unsur yang terlibat di dalamnya juga harus memiliki kualitas yang baik.

Maju mundurnya satu Negara sangat ditentukan oleh maju mundurnya kualitas hasil pendidikan atau kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi, banyak ditentukan oleh guru yang jumlah dan mutunya memadai. Jika kualitas sumber daya manusia yang bermutu tinggi dapat diciptakan bagi seluruh rakyat Jepang, maka pembangunan apa saja di negeri ini akan sukses, termasuk pembangunan militer, pertahanan dan keamanan. Demikianlah jawaban Kaisar Jepang, yang akhirnya direspon baik dan diapresiasi oleh seluruh peserta sidang.

Mengenai jumlah guru SD dari jenjang pendidikan SMA sampai S2 di Kota Denpasar tahun 2018 akan diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 4.12 Jumlah Guru SD Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

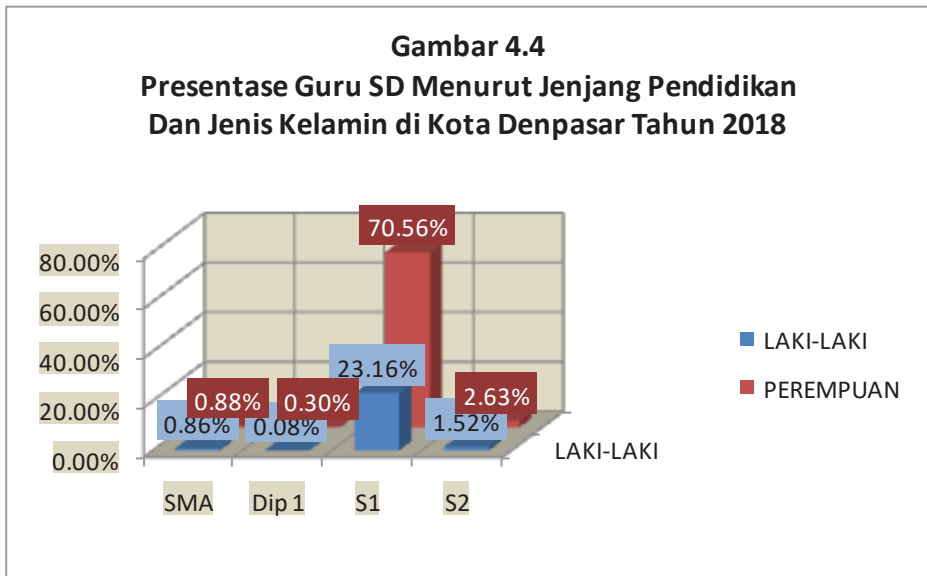
Kecamatan	Jenjang Pendidikan							
	SMA		Dip 1		S1		S2	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Denpasar Utara	8	5	1	7	200	633	12	18
Denpasar Timur	7	8	1	1	182	529	6	26
Denpasar Selatan	10	9	-	-	230	657	18	23
Denpasar Barat	6	10	1	3	226	734	19	28
Jumlah	31	32	3	11	838	2.553	55	95

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Jika dicermati tabel di atas tampak bahwa secara keseluruhan guru SD yang ada di Kota Denpasar tahun 2018 sebanyak 3.618 orang. Dengan kualifikasi pendidikan S1 adalah yang terbanyak yakni 3.391 orang, dan yang terkecil adalah dengan pendidikan D1 sebanyak 14

orang. Guru SD dengan kualifikasi pendidikan tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, tetapi di Denpasar Selatan terjadi kekosongan guru SD dengan kualifikasi pendidikan D1 tahun 2018.

Secara gender guru SD pada semua jenjang pendidikan tampak didominasi oleh guru perempuan. Hal ini menegaskan bahwa anggapan tentang pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan perempuan karena ada unsur mendidik, mengasuh, mengemong sebagaimana yang diamanatkan pada peran gender tampaknya masih berlaku.



Sumber : Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

#### 4.7. Keberadaan Kepala Sekolah

Pucuk pimpinan (*top leader*) pada setiap sekolah disebut kepala sekolah. Kepala sekolah inilah yang bertugas untuk membimbing,

mengarahkan dan menggerakkan bawahannya menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan. Maju mundurnya suatu sekolah, banyak ditentukan oleh kreativitas dan aktivitas kepala sekolah. Berikut akan diuraikan keberadaan kepala sekolah pada di Kota Denpasar tahun 2018.

#### 4.7.1 Kepala Sekolah Dasar (SD)

Keberadaan kepala sekolah tentu sangat terkait dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan yang ada di suatu daerah. Di Kota Denpasar dengan jumlah siswa SD tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya tentu jumlah kepala SD juga adalah yang terbanyak. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang kepala SD di Kota Denpasar tahun 2018.

**Tabel: 4.13 Jumlah Kepala Sekolah SD Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

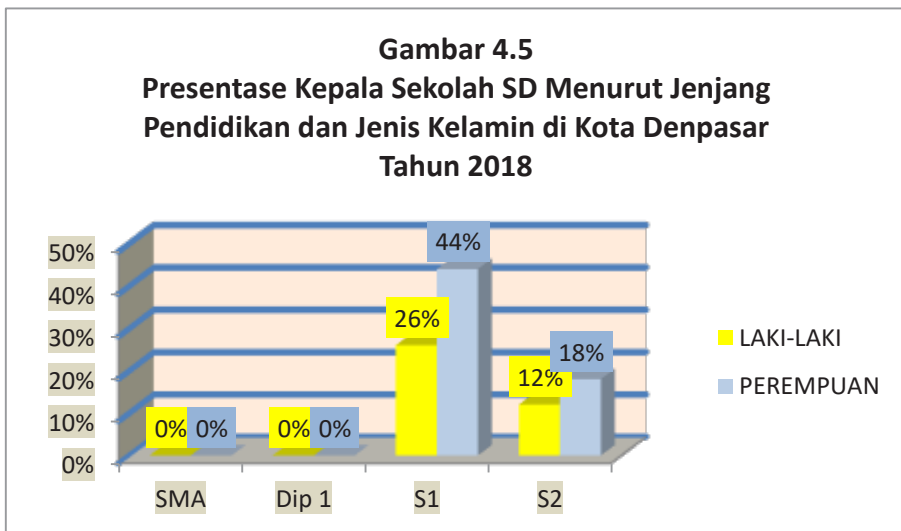
Kecamatan	Jenjang Pendidikan								
	SMA		Dip		S1		S2		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
Denpasar Utara	-	-	-	-	13	21	10	9	53
Denpasar Timur	-	-	-	-	16	20	4	10	50
Denpasar Selatan	-	-	-	-	14	30	5	12	61
Denpasar Barat	-	-	-	-	14	25	8	9	56
Jumlah	--	-	-	-	57	96	27	40	220

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, 2018

Mencermati tabel 4. 29 tampak bahwa secara umum jumlah kepala sekolah SD di Kota Denpasar tahun 2018 sebanyak 220 orang. Kepala SD ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, tertinggi ada di Denpasar Selatan sebanyak 61 orang dan terendah di Denpasar Timur 50 orang. Secara keseluruhan kualifikasi pendidikan

mereka disominasi oleh S1 sebanyak 153 orang dan S2 sebanyak 67 orang.

Ditinjau dari perspektif gender tampaknya kepala SD ini didominasi oleh perempuan. Ini berarti masih tetap terjadi kesenjangan gender yang sangat menjolok pada kepala SD laki-laki yang jauh lebih rendah daripada guru perempuan. Hal ini menjadi menarik dan perlu digali faktor penyebabnya untuk kemudian dicarikan solusinya.



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

#### 4.7.2 Kepala SMP

Jika dibandingkan dengan kepala sekolah SD, keberadaan kepala SMP di Kota Denpasar jumlahnya jauh lebih kecil. Secara terperinci data ini bisa dilihat pada tabel 4.30 berikut ini.

**Tabel: 4.14 Jumlah Kepala Sekolah SMP Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

Kecamatan	Jenjang Pendidikan								
	SMA		Dip		S1		S2		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
Denpasar Utara	-	-	-	-	5	2	8	5	20
Denpasar Timur	-	-	-	-	6	3	2	1	12
Denpasar Selatan	-	-	-	1	6	9	6	2	23
Denpasar Barat	-	-	-	-	5	4	3	1	13
Jumlah	-	-	-	1	22	18	19	9	68

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Mencermati tabel 4.23 di atas secara keseluruhan jumlah kepala SMP di Kota Denpasar sebanyak 68 orang jauh lebih kecil dari kepala SD. Persebaran kepala SMP di Kota Denpasar tidak jauh berbeda dengan keberadaan kepala SD, di mana terbanyak ada di Denpasar Selatan sebanyak 23 orang, dan terkecil di Kecamatan Denpasar Timur 12 orang. Kualifikasi pendidikan menunjukkan kepala SMP tertinggi berpendidikan S1 sebanyak 40 orang dan D1 1 orang.

Analisi gender menunjukkan kepala SMP di Kota Denpasar terjadi pergeseran didominasi oleh laki-laki dengan perbandingan 41 L: 28 P. Ini menandakan terjadi kesenjangan gender pada kepala SMP perempuan.

#### 4.8 Guru yang Tersertifikasi

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai profesionalitas para guru. Melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Guru dan Dosen diamanatkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan sehat jasmani dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian diharapkan dicapai seorang guru yang baik yakni guru yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional, baik sebagai pendidik maupun

sebagai pengajar atau pelatih. Dalam hal ini sangat penting artinya standar mutu profesional guru untuk menjamin proses pembelajaran yang baik dan hasil yang bermutu dari proses tersebut. Berdasarkan pemikiran yang terkandung di dalam amanat tersebut, setiap guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik, hanya diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu yang telah digariskan dalam undang-undang tersebut. Berikut akan dijelaskan jumlah guru yang tersertifikasi pada beragam jenjang pendidikan di Kota Denpasar.

#### 4.8.1 Guru SD yang Tersertifikasi

Sampai dengan tahun 2016/2017, jumlah guru SD yang tersertifikasi di Kota Denpasar, dapat diketahui sebagaimana tersaji pada Tabel 4.31

**Tabel: 4.15 Jumlah Guru SD yang sudah Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2016/2017**

NO	Kecamatan	2016/2017		
		L	P	JLH
1	Denpasar Utara	126/ 22.19	373/ 25.27	499
2	Denpasar Timur	136/ 23.94	332/ 22.49	468
3	Denpasar Selatan	162/ 28.52	366/ 24.80	528
4	Denpasar Barat	114/ 25.35	405/ 27.44	549
	JLH	568/ 27.79	1476/ 27.21	2044

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar tahun 2016/2017 yang tertuang pada tabel 4.8 secara keseluruhan jumlah guru yang tersertifikasi sebanyak 2.044 orang. Guru yang tersertifikasi ini terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Barat, dan terkecil berada di Denpasar Timur. Jumlah guru SD yang sudah tersertifikasi sebanyak

2.044 orang ini secara gender cukup berimbang dengan perbandingan L 568/27.79% : P 1.467/27.21%, ini berarti tidak terjadi ketimpangan gender.

#### 4.8.2 Guru SMP yang Trsertifikasi

Guru SMP yang tersertifikasi di Kota Denpasar sampai dengan tahun 2017/2018 secara keseluruhan berjumlah 2.256 orang. Guru yang tersertifikasi tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, tertinggi berada di Denpasar Utara sebanyak 809 orang, dan terendah di Denpasar Timur sebanyak 316 orang. Jumlah guru yang sudah tersertifikasi tersebut tampak didominasi oleh guru perempuan, namun hal ini belum bisa dikatakan terjadi ketimpangan gender pada guru laki-laki karena memang jumlah guru perempuan lebih banyak daripada guru laki-laki. Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel: 4.16 Jumlah Guru SMP yang sudah Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017/2018**

NO	Kecamatan	2017/2018		
		L	P	JLH
1	Denpasar Utara	363	446	809
2	Denpasar Timur	115	201	316
3	Denpasar Selatan	274	406	680
4	Denpasar Barat	178	273	451
	JLH	930	1.326	2.256

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Secara keseluruhan para guru yang tersertifikasi di Kota Denpasar tahun 2018 adalah guru dengan status pegawai negeri (PNS) dan bukan pegawai negeri (nonPNS). Secara rinci para guru PNS dan NonPNS tersebut dijelaskan pada tabel berikut.



**Tabel: 4.17 Persentase Guru yang Tersertifikasi Tahun 2018**

No	Guru	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	TK	0	16	16
2	SD	20	42	62
3	SMP	6	14	20
Total		26	72	98

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas tampak guru yang tersertifikasi tahun 2018 pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP, baik dengan status PNS dan non PNS secara keseluruhan berjumlah 98 orang, dengan rincian, guru PNS berjumlah 56 dan non PNS 42 orang. Guru yang terbanyak tersertifikasi adalah guru SD 62 orang, dan terkecil adalah guru TK 16 orang. Jumlah guru yang tersertifikasi sangat didominasi oleh guru perempuan dengan perbandingan 72 P : 26 L, ini berarti terjadi ketimpangan gender yang sangat menonjol pada guru laki-laki, yang bisa diduga karena memang jumlah guru laki-laki lebih sedikit atau karena faktor lain yang perlu digali lebih dalam.

## BAB V

# KESEHATAN

Perjalanan pembangunan di Indonesia telah menciptakan berbagai pembaharuan demi menuju kesejahteraan masyarakat. Setiap tindakan pembangunan yang dilakukan, dilaksanakan untuk mendukung kecerdasan dan kemakmuran rakyat banyak. Salah satunya melalui pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas tertulis bahwa tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Di Indonesia, metode pembangunannya kita kenal dengan istilah pembangunan nasional. Pada Pembangunan Nasional, terdapat lima aspek komponen yang menjadi tujuan akhir, yaitu (1) kemakmuran di bidang material, (2), kesejahteraan fisik dan rohaniah, (3) kebahagiaan, (4) masyarakat, bangsa yang berkeadilan sosial dan (5) kesejahteraan mental, yaitu kaitannya dengan peningkatan pendidikan melalui penambahan pengetahuan dan keterampilan.

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dari suatu kesejahteraan. Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesehatan jasmani, rohani, dan sscial, yakni keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Oleh karena itu hidup sehat menjadi impian semua orang. Seseorang dinyatakan sehat tidak hanya dilihat dari kondisi fisik dan mentalnya ada dalam keadaan baik, tetapi juga dilihat dari apakah orang tersebut dapat menerima dan diterima secara sosial oleh masyarakat di wilayah tempat tinggalnya <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan>.

WHO (Suwiyo, 2002: 490) merumuskan kesehatan sebagai *a state of complete of physical, mental, social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity*. Artinya, sehat itu adalah keadaan fisik,

mental, dan sosial seseorang secara utuh ada dalam kondisi baik dan tidak sekadar bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Agar tercapai derajat kesehatan yang optimal maka berbagai upaya harus dilakukan. Upaya kesehatan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan sudah menjadi prioritas bagi semua daerah untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat besar peranannya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mengimbangi makin ketatnya persaingan bebas pada era global ini.

Untuk mengetahui kesehatan dasar dan kesejahteraan di Kota Denpasar ada beberapa indikator yang dipakai sebagai tolok ukur sebagai berikut.

### **5.1 Jumlah Kelahiran**

Berdasarkan pencatatan data kependudukan dapat diketahui bahwa penambahan penduduk terjadi melalui adanya mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Selain itu penambahan penduduk juga terjadi melalui adanya kelahiran bayi. Kelahiran merupakan penambahan penduduk, yang wajib dicatat dalam kartu keluarga maupun Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akte lahir.

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan kehadiran anak, karena kehadiran anak akan menjadi penerus bagi keluarganya. Dalam siklus kehidupan manusia, kelahiran merupakan fase awal dari sebuah kehidupan, manusia yang baru lahir disebut sebagai bayi berumur 0

tahun pada saat kelahiran. Bayi tersebut kemudian akan mendapatkan identitas baru sebagai manusia yang dilegalisasi melalui pencatatan pada akte kelahiran, yaitu pemberian nama, tanggal lahir dan semua identitas lain yang melekat pada dirinya.

Secara rinci data tentang jumlah kelahiran anak di Kota Denpasar tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada table berikut

**Tabel: 5.1 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 dan 2018**

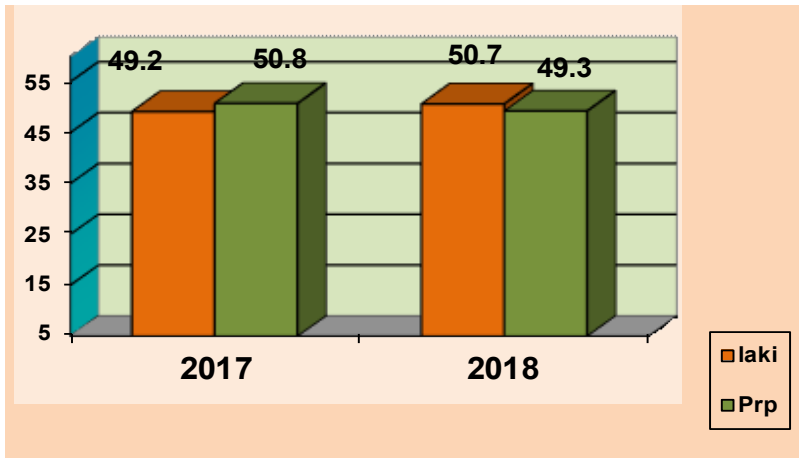
No	Kecamatan	2017		2018	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Timur	857	784	933	870
		612	509	715	669
		<b>1.496</b>	<b>1.283</b>	<b>1.648</b>	<b>1.539</b>
2.	Denpasar Selatan	772	632	940	949
		369	553	523	578
		252	251	337	310
		251	201	290	256
		<b>1.634</b>	<b>1.637</b>	<b>2.090</b>	<b>2.093</b>
3.	Denpasar Barat	1021	994	1.169	1.113
		1402	1460	1.632	1.616
		<b>2.423</b>	<b>2.454</b>	<b>2.801</b>	<b>2.729</b>
4.	Denpasar Utara	574	705	666	638
		642	612	715	707
		526	502	650	622
		<b>1.771</b>	<b>1.819</b>	<b>2.031</b>	<b>1.976</b>

Sumber : Dinas kesehatan Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2018 yang tertuang pada table tersebut di atas tampak bahwa secara keseluruhan kelahiran bayi tahun 2017 di Kota Denpasar adalah 14.882 orang dan tahun 2018 meningkat menjadi 16.907 orang atau

mengalami peningkatan 2.025 orang. Kelahiran bayi ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, kelahiran bayi terbanyak terjadi di Denpasar Barat, dan terendah ditemukan di Denpasar Timur. Dilihat dari perspektif gender, jumlah kelahiran bayi perempuan sedikit lebih banyak daripada bayi laki-laki (2017) dengan perbandingan 7.324 : 7.558 orang. Tetapi di tahun 2018 perubahan terjadi yakni kelahiran bayi laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah bayi perempuan, dengan perbandingan 8.570:8.337orang. Jika dipersentasekan perbandingan jumlah kelahiran bayi laki-laki dan perempuan pada tahun 2017 dan 2018 Kota Denpasar tampak seperti gambar berikut.

**Gambar: 5.1 Persentase Kelahiran Menurut jenis Kelamin Kota Denpasar Tahun 2017, dan 2018**



### 5.2 Kematian Bayi

Menurut Undang-undang No.23 Tentang Kesehatan & Undang-undang No. 20 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran disebutkan Upaya kesehatan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Selain itu, dalam rangka pemenuhan hak kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat selain perilaku hidup bersih dan sehat, maka perlu diketahui indikator derajat kesehatan yang lain yaitu melalui besarnya persentase angka kematian penduduk, ibu melahirkan, bayi. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Oleh sebab itu kesehatan maupun asupan harus menjadi perhatian penting dari orang tuanya, karena masa ini sangat rentan terhadap berbagai penyakit baik yang ringan hingga penyakit yang dapat menyebabkan kematian.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Berikut adalah gambaran tentang angka kematian bayi yang terjadi di Kota Denpasar selama dua tahun terakhir 2017-2018.

**Tabel: 5.2 Jumlah Angka Kematian Bayi dan Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018**

No	Kecamatan	Bayi						Balita					
		2017			2018			2017			2018		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Denpasar Timur	2	0	2	1	1	2	3	0	3	0	0	0
2.	Denpasar Selatan	1	1	2	3	1	4	2	1	3	0	0	0
3.	Denpasar Barat	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1	0	1
4.	Denpasar Utara	3	1	4	1	3	4	4	1	5	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Sumber : Dinas kesehatan Kota Denpasar, 2018

Bayi dan balita adalah dua konsep yang berbeda terutama jika dilihat dari faktor umur atau usia. Menurut Soetjiningsih tahun 2004, bayi adalah sebutan untuk anak usia 0 – 1 tahun, dan balita adalah suatu istilah untuk anak berusia di bawah lima tahun, yang mana pada masa ini anak sudah bisa berjalan, masa yang sangat baik dalam pengembangan tumbuh kembang anak ([hildrenfantasy.blogspot.com /2016/05/ pengertian-bayibatita-dan-balita-serta.html](http://hildrenfantasy.blogspot.com/2016/05/pengertian-bayibatita-dan-balita-serta.html)).

Jika dicermati tabel di atas tampak secara keseluruhan angka kematian bayi tahun 2017 sebanyak 9 orang, mengalami kenaikan sebanyak 3 orang tahun 2018 menjadi 12 orang. Kematian bayi ini tersebar diseluruh kecamatan, dan tertinggi ditemukan di Kecamatan Denpasar Utara, terkecil di Kecamatan Denpasar Barrat. Secara gender selama tahun 2017-2018 kematian bayi laki-laki lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan.

Selanjutnya angka kematian balita mengalami penurunan sangat signifikan selama dua tahun terakhir, yakni dari 12 orang menjadi 1 orang yang ditemukan di Denpasar Barat saja. Kondisi inii penting untuk dipertahankan agar kondisi bayi dan balita agar ke depan angka kematian bayi dan balita bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.

### **5.3 Pemberian ASI Eksklusif**

Menurut para pakar kesehatan, makanan bayi yang paling baik dan paling tepat adalah air susu ibu. Pemberian ASI eksklusif adalah apabila seorang bayi mendapatkan makanan murni dari air susu ibunya selama 6 bulan penuh tanpa ada makanan atau minuman tambahan. Oleh karena itu, setelah melahirkan, ibu pasti direkomendasikan untuk memberikan ASI eksklusif ke anaknya. Sudah banyak lembaga kesehatan dunia, seperti WHO dan UNICEF merekomendasikan ASI eksklusif kepada bayi. Banyak manfaat untuk bayi dan juga ibu yang didapatkan dari pemberian ASI eksklusif. Program pemberian Asi eksklusif telah, sedang dan terus menerua disosialisasikan secara intensif kepada ibu-ibu menyusui, karena telah terbukti bahwa Asi eksklusif dapat membuat daya tahan tubuh anak lebih baik dan memberi kontribusi penting dalam pembentukan sel-sel tubuh anak yang sedang mengalami pertumbuhan, kebaikan yang lain adalah para ibu juga merasakan kedekatan bathin pada saat memberikan ASI pada bayinya. Secara ekonomi pemberian ASI jauh lebih praktis dan murah bila dibandingkan dengan susu formula. Karena harga susu formula relatif mahal bagi sebagian warga masyarakat. Oleh karena itu, pemberian Asi eksklusif dianjurkan kepada ibu menyusui

Berbagai pihak terutama tenaga medis sangat diharapkan peran dan kerja kerasnya untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya pemberian ASI kepada bayinya. Anjuran ini bukan saja



ditujukan kepada para ibu menyusui tetapi juga kepada pihak keluarganya. mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif. Dengan demikian pemberian ASI eksklusif dapat lebih ditingkatkan dan kesehatan bayi dan anak (Balita) diharapkan pula menjadi lebih baik.

Lebih lanjut para pakar kesehatan menegaskan bahwa, makanan bayi yang paling baik dan paling tepat adalah air susu ibu (ASI). Banyak kelebihan yang terkandung dalam ASI yang mendorong bayi dapat tumbuh kembang dengan lebih sempurna dibandingkan makanan lainnya. Setelah bayi berusia 6 bulan, mereka kemudian baru diberikan MPASI (Makanan Pendamping ASI). Namun demikian masih banyak ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemberian ASI eksklusif.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi para ibu menyusui di Kota Denpasar memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dapat dilihat pada table berikut

**Tabel : 5.3 Asi Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018**

No	Kecamatan	Bayi		
		L	P	L+P
1.	Denpasar Timur	739	711	1.450
2.	Denpasar Selatan	1.406	1.320	2.726
3.	Denpasar Barat	256	232	488
4.	Denpasar Utara	610	626	1.236
	Jumlah	3.011	2.889	5.900

Sumber : Dinas kesehatan Kota Denpasar, 2018

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar tahun 2018 sebanyak 5.900 orang bayi. Pemberian ASI eksklusif ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, terbanyak ditemukan di Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sebanyak 2.726 orang, dan terkecil di Denpasar Barat sebanyak 488 orang. Dari perspektif gender tampak pemberian ASI eksklusif

didominasi oleh bayi laki-laki, bisa diduga jumlah bayi laki-laki memang lebih tinggi daripada bayi perempuan atau karena penyebab lainnya.

Hal yang menarik dari table tersebut di atas adalah rendahnya pemberian ASI di Kecamatan Denpasar Barat, yang tentu saja harus dicari penyebabnya. Sementara untuk kecamatan lainnya menunjukkan kondisi cukup menggembirakan mengingat semakin meningkatnya kesadaran ibu-ibu untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayinya meskipun belakangan ini partisipasi perempuan ibu rumah tangga sudah semakin sibuk berperan di ranah public sebagai pencari nafkah. Hal ini juga tidak terlepas dari peran serta unsur-unsur masyarakat terkait seperti, PKK, Konselor Laktasi, AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) yang mempunyai cabang di berbagai kota dan unsur-unsur lain yang terkait.

Berdasarkan asumsi sementara tinggi rendahnya persentase pemberian ASI eksklusif cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemberian ASI eksklusif, kesibukan orang tua (ibu-ibu) bekerja di luar rumah dengan waktu kerja yang panjang dan ketat dan kurang tersedianya fasilitas pojok laktasi di tempat kerja yang mempekerjakan karyawan yang sedang menyusui. Untuk ini perlu lebih disosialisasikan lagi program pemberian ASI pada masyarakat .

#### **5.4 Status Gizi Balita**

Status gizi bayi dan balita sesungguhnya tidak terlepas dari pemberian ASI eksklusif sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Status gizi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang patut diperhatikan menyangkut status gizi balita. Status gizi dibagi menjadi tiga kategori,

yaitu status gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih (menjadi indikasi apakah balita masuk dalam status kecukupan gizi atau tidak). Status gizi normal adalah yang terbaik bagi seorang anak, karena tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut semakin baik pula. Sebaliknya, apabila asupan gizi anak kurang atau lebih, maka pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak menjadi terganggu, sehingga dengan demikian akan mudah bagi kader penggerak untuk membantu penanganannya.

Jika dikaitkan dengan angka pemberian ASI eksklusif sudah relatif tinggi sebagaimana diungkapkan di atas, maka hal ini diduga ada korelasi dengan status gizi anak yang ada di Kota Denpasar . Hal ini dapat dilihat dari angka prevalensi status gizi pada anak Balita. Tabel berikut menunjukkan kondisi status gizi balita di Kota Denpasar tahun 2018.

**Tabel: 5.4 Status Gizi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin tahun 2018**

No	Kecamatan	Status Gizi	L + P
1.	Denpasar Timur	Gizi Baik	65
		Gizi Kurang	4
		Gizi Buruk	0
		Gizi Lebih	8
2.	Denpasar Selatan	Gizi Baik	96
		Gizi Kurang	3
		Gizi Buruk	1
		Gizi Lebih	8
3.	Denpasar Barat	Gizi Baik	82
		Gizi Kurang	2
		Gizi Buruk	0
		Gizi Lebih	6
4.	Denpasar Utara	Gizi Baik	65
		Gizi Kurang	2
		Gizi Buruk	0
		Gizi Lebih	2

Sumber : Dinas kesehatan Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Dinas kesehatan Kota Denpasar, 2018 yang tertuang pada tabel 4.4 tampak jelas bahwa secara umum status gizi anak di Kota Denpasar masih kurang menggembirakan karena saat ini masih ditemukan anak dengan status gizi buruk yakni sebanyak 1 orang yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan. Menurut keterangan perawat di rumah sakit umum daerah Wangaya, bahwa anak yang berstatus gizi buruk ini bukanlah anak dari orang tua yang ber KK Denpasar, tetapi orang tuanya adalah ber KK luar hanya mereka pinjam alamat di rumah saudaranya di Denpasar Selatan. Si bayi dirawat di rumah sakit Wangay sehingga tercatat sebagai warga Denpasar. Begitu juga status gizi kurang dan gizi lebih (keduanya merupakan indikator kesehatan kurang baik) juga cukup tinggi dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar.

Lebih jauh apabila dicermati table 4.4 dari perspektif jenis kelamin, baik pada status gizi baik, gizi kurang, maupun gizi buruk tampaknya tidak bisa diketahui karena belum tersedia data terpilah. Ke depan tentu keberadaan data terpilah menurut jenis kelamin ini sangat penting terutama agar bisa dilakukan pengkajian lebih jauh terkait dengan penyebab terjadinya kondisi tersebut.

## 5.5 Pojok ASI

Pojok ASI (*nursery room*) adalah suatu ruangan yang diperuntukkan bagi karyawan perempuan yang masih berada dalam masa menyusui untuk membantu dan memberikan kenyamanan ketika harus menyediakan ASI bagi buah hatinya (<https://www.google.com/search?q=arti+pojok+asi&rlz=1C1RNPN>). Hal ini juga sangat terkait dengan pemberian ASI eksklusif.

ASI eksklusif merupakan hak semua anak yang terlahir di dunia. Sebagaimana diketahui bahwa ada sejuta manfaat yang diberikan ASI untuk tumbuh kembang anak. Bahkan, memberikan ASI eksklusif juga akan memberikan manfaat bagi Bunda. Hal ini tentu terkait dengan

keterlibatan perempuan yang bekerja di sektor publik sementara masih menyusui bayinya, dewasa ini sudah tidak banyak mengalami kendala dalam pemberian ASI. Karena telah tersedia fasilitas penyimpanan ASI yang tidak langsung dikonsumsi oleh bayinya, hal ini dapat diadakan di rumah ataupun di tempat kerja. Bagi ibu-ibu yang akan menyusui langsung bayinya, di beberapa tempat kerja maupun di tempat-tempat public sudah menyediakan tempat-tempat dimaksud yang disebut dengan POJOK ASI (Laktasi). Pembangunan Pojok ASI (Laktasi) menjadi prioritas dalam pembangunan (<http://m.detik.com/news>).

Di Kota Denpasar berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, tahun 2018 yang dituangkan pada table 4.5 berikut tampak penyediaan pojok ASI sudah cukup banyak, baik yang disediakan oleh perkantoran milik pemerintah, maupun swasta.

Tabel di bawah menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyediaan pojok ASI di Kota Denpasar tahun 2018 sebanyak 83 ruangan, tampak terjadi penambahan 1 ruangan dibandingkan tahun 2017. Pojok ASI ini tersebar di berbagai perkantoran milik pemerintah sebanyak 60 ruangan dan milik swasta sebanyak 23 ruangan. Jika dicermati keberadaan pojok ASI ini sudah cukup representatif pada perkantoran milik pemerintah tetapi masih sangat kurang pada perkantoran/fasilitas umum milik swasta. Ke depan pengadaan pojok ASI ini masih perlu di tingkatkan baik oleh pemerintah maupun swasta, oleh karena pojok ASI mampu memberi kenyamanan bagi ibu-ibu untuk menyusui dan atau memeras air susu. Sehingga pengadaan ruang laktasi atau Pojok ASI merupakan suatu hal yang sangat urgen di tempat-tempat publik.

**Tabel: 5.5 Jumlah Pojok Asi di Kota Denpasar Tahun 2018**

No	Bangunan Perkantoran Milik Pemerintah		Bangunan Perkantoran Milik Swasta (Fasilitas Umum)	
	Lokasi	Jlh Ruang	Lokasi	Jlh ruang
1.	Puskesmas I Den.Bar	1	Terminal Ubung	1
2.	Puskesmas II Den.Bar	1	PasarPeninjoan	1
3.	Puskesmas I Den. Utara	1	Tiara Dewata	1
4.	Puskesmas II Den. Utara	1	Level 21	1
5.	Puskesmas III Den. Utara	1	Plaza Renon	1
6.	Puskesmas I Den. Timur	1	Pasar Poh Gading	1
7.	Puskesmas II Den. Timur	1	Pasar Nyanggelan	1
8.	Puskesmas I, II, III, IV Denpasar Selatan	4	Pasaragung	1
12.	Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya dan RSUP Sanglah.	2	Rumah sakit Swasta dan Klinik di Denpasar	15
13.	Kecamatan Den. Utara	1		
14'	Kecamatan Den. Selatan	11		
15.	Kecamatan Den. Timur	3		
16.	Kecamatan Den. Barat	7		
17.	OPD Pemerintah Kota Denpasar	25		
18	Kantor Imigrasi	1		
<b>JUMLAH TOTAL Tahun 2018</b>				83
<b>Tahun 2017</b>				82

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar ,2018

## 5.6 Imunisasi

Program imunisasi adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karenaa imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit

tersebut. Program imunisasi saat ini bisa dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Imunisasi ini dilakukan, baik secara rutin maupun melalui gebrakan-gebrakan. Mekanisme imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan serum ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi di antaranya adalah hepatitis B, campak, polio, difteri, tetanus, batuk rejan, gondongan, cacar air, tbc, dan sebagainya ([www.organisasi.org](http://www.organisasi.org) – Kesehatan).

Program imunisasi ini bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Bayi yang baru lahir memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut kekebalan pasif, karenanya bayi dan balita masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit, sistem kekebalan tubuh mereka belum terbentuk sempurna, oleh karenanya pemberian imunisasi perlu dilakukan secara efektif pada bayi dan balita, kemudian diberikan pengulangan pada usia awal sekolah dasar. Untuk itu pemerintah secara terus menerus mensosialisasikan pentingnya kesadaran terhadap kesehatan khususnya pemberian vaksinasi.

Pemberian imunisasi untuk masyarakat dilakukan di tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas, posyandu, dan praktek dokter swasta. Tabel berikut menggambarkan persentase bayi di Kabupaten Bangli yang telah mendapat beberapa jenis imunisasi.

Secara rinci persentase imunisasi balita di Kota Denpasar tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel: 5.6 Cakupan Imunisasi Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

Kecamatan	Bayi Diimunisasi						Jlh
	DPT-HB-Hib3	Polio	Campak /MR	Imunisasi Dasar Lengkap	HBO	BCG	
Den. Ut.	3.659	3.680	1.624	3.694	3.854	4.040	20.551
Den. Tim	2.896	2.864	1.220	2.870	3.152	3.169	16.171
Den. Sel	3.615	3.630	1.451	3.460	3.886	3.842	19.884
Den. Bar.	5.133	5.144	2.041	5.190	5.286	5.581	28.375
<b>Jumlah</b>	<b>15.303</b>	<b>15.318</b>	<b>6.336</b>	<b>15.214</b>	<b>16.178</b>	<b>16.632</b>	<b>84.918</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2018

Tabel di atas menggambarkan secara keseluruhan bayi di Kota Denpasar tahun 2018 yang mendapat berbagai jenis imunisasi sebanyak 84.918 orang. Pemberian imusisasi ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Denpasar, dan terbanyak cakupan imunisasi ini berada di Kecamatan Denpasar Barat (28.375 orang bayi), terkecil di Kecamatan Denpasar Timur (16.171 orang bayi). Cakupan imunisasi terbanyak adalah jenis imunisasi BCG (16.632), dan terkecil imunisasi Campak/MR (6.336).

Jika dicermati lebih jauh tabel di atas juga menggambarkan kondisi yang menggembirakan karena bayi di Kota Denpasar sudah mendapatkan imunisasi lengkap, yang mencakup: DPT/HB, Hib3, Polio, Campak/MR, imunisasi dasar, HBO, dan BCG, Polio. Kondisi ini juga menegaskan tingkat kesadaran dan partisipasi ibu-ibu di Kota Denpasar sudah semakin tinggi. Namun di sisi lain hal penting yang belum terungkap adalah cakupan imunisasi bayi dan balita per jenis kelamin karena sampai saat ini belum tersedia data. Untuk itu ke depan penting untuk menyediakan data ini agar bisa diambil kebijakan yang tepat.



## 5.7 Jumlah Dokter

Tugas tenaga kesehatan-khususnya Dokter, tidak hanya mengobati, tetapi bertugas sebagai advokat di bidang kesehatan bagi pasien. Dokter menjadi pendamping bagi pasien, memberikan edukasi, menjelaskan dengan detil apa saja yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien sampai pasien paham, memberikan informasi, memberikan support, memberdayakan pasien, mengajari *problem solving skills*, pendekatan kepada pasien, keluarga pasien, dan komunitasnya. Selain itu, mampu secara holistik melihat pasien secara keseluruhan *biopsikososialculturalspiritual*. Tidak hanya memeriksa, memberikan resep dan memberi obat, tetapi juga berinteraksi berbagai faktor munculnya penyakit, dampak penyakit bagi pasien dan keluarganya. Dokter tersebut juga mampu menangani pasien secara komprehensif yaitu *promotive, preventive, curative, rehabilitative* dan *palliative care*. *Palliative care* untuk pasien terminal (yang tidak bisa disembuhkan) bertujuan untuk mempertahankan kualitas hidup dan mencapai *good death*, hingga memberikan konseling duka cita. Dokter ini berkerja di komunitas dan secara berkesinambungan serta berkelanjutan mengikuti perjalanan kesehatan pasien. Tentunya bekerjasama dengan *primary care, secondary care* dan *tertiary care*. Sehingga pasien yang belum sakit bisa dilakukan upaya promotif dan preventif, ketika sudah sakit dapat dirujuk dengan tepat. Pasien menjadi lebih puas dengan layanan kesehatan primer dan biaya kesehatan bisa ditekan (<https://fk.ugm.ac.id/peran-dokter-layanan-primer-menyehatkan-penduduk-indonesia/>)

Dokter umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia. Dokter umum juga biasa disebut sebagai dokter keluarga ([https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_umum)). Dokter biasanya

Umum melakukan pelayanan medis di poli umum, puskel, pustu, posyandu.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ([http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-dokter\\_gigi.html](http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-dokter_gigi.html)), dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktek kedokteran gigi umum meliputi tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terhadap kondisi gigi dan mulut individu ataupun masyarakat. Tindakan perawatan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter gigi umum antara lain penambalan gigi berlubang, pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, pembuatan gigi tiruan. Seorang dokter gigi seringkali menggunakan sinar-x dalam menegakkan diagnosa. Dokter Gigi : melaksanakan pelayanan medis di poli gigi, puskel, pustu

Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Seorang dokter harus menjalani pendidikan profesi dokter pascasarjana (spesialisasi) untuk dapat menjadi dokter spesialis. Pendidikan dokter spesialis merupakan program pendidikan profesi lanjutan dari program pendidikan dokter dan dokter gigi setelah dokter umum dan dokter gigi menyelesaikan wajib kerja sarjananya dan atau langsung setelah menyelesaikan pendidikan dokter atau dokter gigi ([https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter\\_spesialis](https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter_spesialis)).

**Tabel: 5.7 Jumlah Dokter Umum yang ada di Kota Denpasar Tahun 2017 dan 2018**

No	Kecamatan	2017			2018		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Denpasar Timur	1	5	6	3	7	10
2.	Denpasar Selatan	5	9	14	2	17	19
3.	Denpasar Barat	1	7	8	3	7	10
4.	Denpasar Utara	1	9	10	3	6	9
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar,2018

Memperhatikan data pada tabel 4.8 tampak jelas semua jenis dokter, yakni dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi tersedia di Kota Denpasar. Secara keseluruhan jumlah bergai jenis dokter tersebut pada tahun 2018 mencapai angka 1.640 orang, dan terbanyak adalah dokter spesialis sebanyak 1.174 orang, menyusul kemudian dokter umum 325 orang, serta terkecil adalah dokter gigi sebanyak 141 orang. Seluruh dokter ini tersebar di semua kecamatan yang berada di Kota Denpasar mulai puskesmas, rumah sakit umum pusat, rumah sakit umum daerah, sampai rumah sakit swasta.

**Tabel 5.8 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi (IDI) yang ada di Kota Denpasar Tahun 2018**

Tempat Tugas	Dr Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	
Puskesmas Denpasar Utara	0	0	3	6	1	7	17
Puskesmas Denpasar Timur	0	0	3	7	1	7	18
Puskesmas Denpasar Selatan	0	0	2	17	7	13	39
Puskesmas I Denpasar Barat	0	0	3	7	1	7	18
<b>Sub Total 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>92</b>
RSUP Sanglah	135	63	19	36	1	12	266
RSUD Wangaya	38	14	13	20	1	7	93
RSU Bakti Rahayu	33	17	4	5	0	2	61
RSU Bali Royal	71	32	7	12	2	4	128
RSKM Bali Mandara	3	8	5	9	0	0	25
RS Tk II Udayana	28	13	6	16	2	6	71
RSU Kasih Ibu	59	28	5	13	3	2	110
RS Bhayangkara	20	8	4	8	0	2	42
RSU Manuaba	22	9	1	4	0	3	39
RSU Prima Medika	75	29	11	13	6	2	136
RSKGM Saraswati	0	0	0	0	20	34	54
RSKIA Pucuk Permata Hati	0	3	2	3	0	0	8
RSU Puri Rahaja	46	21	10	7	0	2	86
RSU Dharma Yadnya	28	4	2	2	1	1	38
RSU Surya Husadha Cokro	21	15	3	5	1	4	49
RSU Surya Husadha	52	27	4	7	3	3	96
RSU Bali Med	63	42	6	17	2	4	134
RSIA Harapan Bunda	10	5	2	4	0	0	21
RSIA Puri Bunda	36	17	6	8	0	0	67
RSUD Bali Mandara	26	24	9	20	2	0	81
<b>Sub Total 2</b>	<b>795</b>	<b>379</b>	<b>121</b>	<b>204</b>	<b>44</b>	<b>97</b>	<b>1.640</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar,2018

Ditinjau dari analisis gender, kecuali pada jenis dokter spesialis, jumlah dokter perempuan lebih tinggi daripada dokter laki-laki atau terjadi ketimpangan gender pada laki-laki yang cukup signifikan. Tentu saja kondisi ini perlu didalami dan dicari penyebabnya sehingga untuk menentukan solusi yang terbaik.

### **5.8 Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan Reproduksi dan Mental**

Definisi kesehatan reproduksi telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Keseriusan pemerintah dalam memberi perhatian akan penanganan permasalahan kesehatan reproduksi, dituangkan juga melalui kebijakan lain, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang, dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu.

Di samping itu, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, Pemerintah juga menjamin kesehatan ibu, mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi, dan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (<http://kesga.kemkes.go.id/berita-lengkap.php?id=35>)

Di era milenial saat ini pergaulan antar anak-anak dan remaja sudah semakin tidak ada batas. Perkembangan teknologi sudah semakin luas terutama media massa, media elektronik dan gadget. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak-anak dan

remaja. Seringkali anak-anak menggunakan teknologi ini tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Pergaulan bebas terutama anak remaja umur 15 – 18 tahun sudah sangat mengawatirkan karena mereka masih awam terhadap pentingnya kesehatan reproduksi. Oleh karena itu seringkali terjadi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak atau kasus hamil di luar nikah.

Untuk itulah eksistensi Lembaga atau pusat-pusat layanan kesehatan reproduksi dan mental sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan mengingat banyaknya masyarakat terutama anak-anak yang menghadapi berbagai persoalan seperti tersebut di atas. Di Kota Denpasar telah tersedia lembaga pelayanan semacam itu seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel: 5.9 Lembaga Penyedia Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi dan Mental Tahun 2018**

Lembaga	Tahun		
	2016	2017	2018
PIK Remaja / Mahasiswa	23	23	23
Pusat Konsultasi Psikologi	13	13	13
Ruma Sakit Sanglah	1	1	1
Rumah Sakit Wangaya	1	1	1
PUSKESMAS di Denpasar	11	11	11
Fakultas Kedokteran Unud	1	1	1
Fakultas Kedokteran UNWAR	1	1	1
Bimbingan Konseling			
- SMP	62	62	68
- SMA/K	63	63	60
Jumlah	176	176	179

Sumber : Dinas Kesehatan kota Denpasar 2018

Dari tabel ini tampak bahwa di Kota Denpasar tahun 2018 ada 279 lembaga konsultasi pelayanan dan kesehatan reproduksi dan

mental. Lembaga pelayanan ini terdiri dari berbagai bentuk antara lain PIK Remaja atau mahasiswa 23 buah pusat konsultasi psikologi ada 13 buah dan BK ada 128 buah yang terdiri dari 68 buah bimbingan konseling di SMP, dan 60 buah bimbingan konseling SMA/K. Hampir semua sekolah di Kota Denpasar memiliki jumlah siswa yang cukup banyak. Hampir di setiap sekolah terdapat siswa yang mengalami dan menghadapi persoalan, baik persoalan sekolah maupun pribadi. Oleh karena itu, memang sudah seharusnya di setiap SMP dan SMA disediakan bimbingan dan konseling. Jumlah lembaga ini terutama BK di SMP mengalami penambahan 3 buah dibandingkan tahun sebelumnya.

### **5.9 Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih**

Penyediaan air bersih di wilayah perkotaan tampaknya selalu menjadi persoalan, hal ini disebabkan kebutuhan akan air bersih selalu meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk perkotaan akibat migrasi. Sementara eksploitasi terhadap air juga dilakukan oleh berbagai perusahaan seperti hotel dan perusahaan lainnya. Disamping itu air memiliki beragam manfaat bagi umat manusia diantaranya adalah untuk kebutuhan mandi, cuci, juga untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak makanan. Kebutuhan akan air yang begitu beragam bagi umat manusia menuntut tersedianya air bersih agar manusia dapat menjalani kehidupan secara bersih, sehat, dan sejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih untuk penduduk di Kota Denpasar, pemerintah telah menyediakan sumber air berupa perusahaan daerah air minum (PDAM). Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah rumah tangga yang telah mengakses air bersih seperti tampak pada tabel 4.10 sebagai berikut.

**Tabel: 5.10 Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2017 dan 2018**

Jenis	2017	2018
Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Dari PDAM	422.568	450.174
Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Selain Dari PDAM	491.733	481.802

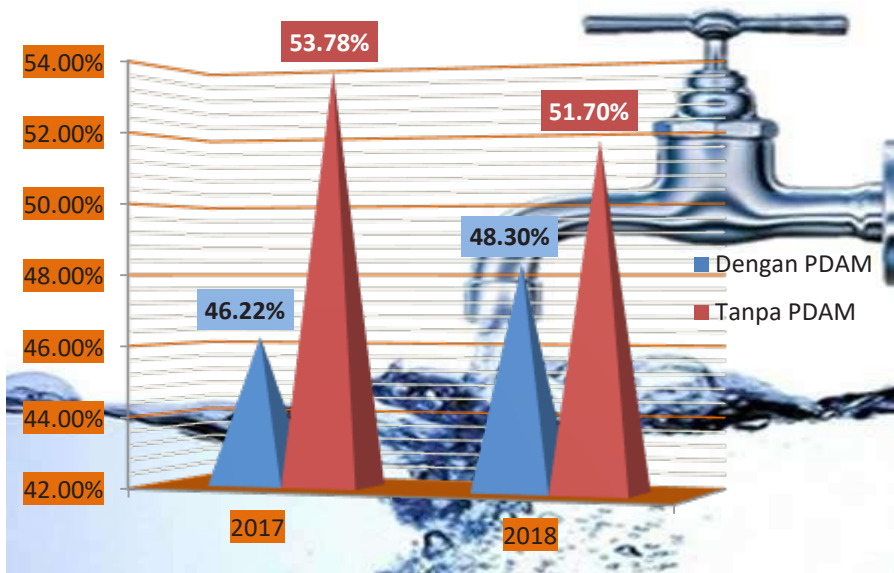
Sumber : PDAM Kota Denpasar,2018

Table 5.2 tampak bahwa jumlah rumah tangga dengan akses air bersih selama periode dua tahun terakhir mencapai jumlah yang relative tinggi yakni mencapai 422.568 rumah tangga tahun 2017 dan meningkat menjadi 450.174 tahun 2018. Ini adalah rumah tangga yang mengakses air bersih dari PDAM. Sementara rumah tangga yang mengakses air bersih dari luar PDAM berjumlah 491.733 rumah tangga di tahun 2017 dan 481.802 tahun 2018. Ini berarti pada tahun 2018 rumah tangga yang menggunakan air bersih di luar PDAM jumlahnya berkurang. Bisa jadi mereka ini sudah beralih ke penggunaan air bersih yang bersumber dari PDAM. Sumber air bersih diluar PDAM bisa jadi bersumber dari air bawah tanah (ABT) dengan menggunakan sumur biasa atau sumur pompa.

Secara persentase rumah tangga dengan akses air bersih di Kota Denpasar periode tahun 2017 dan 2018 seperti tampak pada gambar berikut.



**Gambar: 5.2** Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2017 Dan 2018



Sumber : PDAM Kota Denpasar, 2018

## BAB VI

# EKONOMI

Berbicara mengenai keadaan perekonomian penduduk Kota Denpasar, pembicaraannya tidak akan terlepas dari potensi sumber daya manusia (SDM), baik sebagai subyek maupun obyeknya. Secara konseptual, pengertian sumber daya manusia (SDM) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, mencerminkan sumber daya berkualitas untuk memproduksi jasa dan barang berkualitas pula yang diberikan oleh seseorang. Kedua, SDM berkaitan dengan manusia yg mampu berkerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Berkaitan dengan hal ini, orang dalam usia kerja adalah orang yang dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja ini dinamakan tenaga kerja atau *manpower* (Simanjuntak, 1985). Dalam konteks ini, SDM yang dimanfaatkan dalam proses produksi untuk memberikan jasa atau usaha kerja tidak membedakan berdasarkan atas indikator jenis kelamin, kecuali suatu pekerjaan yang secara khusus memerlukan energi dan kekuatan fisik yang mampu dikerjakan oleh salah satu jenis kelamin saja. Pada dasa warsa terakhir ini, SDM yang tersedia di Kota Denpasar, yang berjenis kelamin perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas tidak kalah bersaing dengan SDM berjenis kelamin laki-laki. Keadaan ini tercipta karena angkatan kerja, mulai dari berpendidikan sekolah menengah dan berpendidikan tinggi relatif mudah diperoleh di Kota Denpasar karena Kota Denpasar juga menjadi pusat pendidikan di Bali.

Kota Denpasar yang berstatus pula sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagang-an, dan pusat pariwisata sehingga berkembang menjadi

salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Bali. Penetapan Kota Denpasar menjadi pengem-bangan pembangunan ekonomi di Bali bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Implikasi penetapan ini dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Bali secara merata sehingga kesenjangan kehidupan warga masyarakat di bidang ekonomi tidak berbeda secara tajam. Dalam konteks ini, sumber daya manusia (SDM) atau *human resources* mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Denpasar.

Kota Denpasar sebagai pusat pendidikan di Bali, menjadi faktor penarik bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Selain itu, relatif banyak juga tamatan SMU, SMK, dan yang sederajat untuk melanjutkan pendidikan di level diploma dan yang sederajat. Setelah mereka berhasil menamatkan pendidikannya, relatif banyak yang tidak kembali ke asalnya, namun mencari kerja di Denpasar.

Dengan demikian, pelaksanaan sensus ekonomi menjadi sangat signifikan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan ekonomi angkatan kerja dengan menanyakan tentang lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan penduduk yang bekerja. Variabel tersebut dikaitkan dengan variabel ekonomi seperti tingkat dan laju GNP (*Gross National Product*/ Produk Nasional Bruto) per kapita dan alokasi GNP per sektor. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor.

Di sini, tidak saja terjadi persaingan secara vertikal antara orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan sedang, dan berpendidikan rendah dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Namun, di antara mereka juga mulai tampak terjadi persaingan secara horizontal, antara orang berjenis kelamin laki-laki dengan berjenis kelamin perempuan yang memiliki derajat pendidikan yang sama. Beberapa tabel dan gambar di bawah ini, menunjukkan tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor sebagai berikut.

### **6.1 Kegiatan Utama Penduduk**

Pada dekade ini, desa-desa di Kota Denpasar semuanya sudah mengota. Desa mengota yang dimaksud adalah masyarakat desa yang sudah banyak ciri-ciri kotanya (Suyono, 1985: 88). Beberapa indikator yang mencirikan desa tersebut mengota antara lain terjadinya perkembangan masyarakat yang bersangkutan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan semakin heterogennya warga masyarakatnya. Heterogenitas warga masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain mata pencaharian, agama, dan etnis (suku bangsa).

Semakin heterogennya warga masyarakat Kota Denpasar disebabkan karena Kota Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat pariwisata sehingga relatif banyak terciptanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini menjadi rebutan bagi pencari kerja di Kota Denpasar. Pencari kerja tersebut tidak saja direbutkan oleh pencari kerja yang berasal dari Kota Denpasar dan luar Kota Denpasar yang masih di lingkungan Pulau Bali, tetapi juga berasal dari luar Bali. Para migran yang merantau ke Kota Denpasar, ternyata bagi yang berhasil sebagian tinggal menetap di Kota Denpasar dan menjadi penduduk kota ini.

Semakin banyak para migran yang tinggal menetap di Bali, baik yang berasal dari Bali maupun luar Bali membawa implikasi terhadap pemanfaatan lahan di Kota Denpasar. Dengan demikian, penyempitan

lahan di Kota Denpasar tidak terbelud lagi sehingga relatif banyak lahan sawah yang subur telah dialihkan fungsinya, yaitu dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana tempat tinggal. Sementara ini, di wilayah Kota Denpasar dijumpai pula lahan pertanian yang belum beralih fungsi yang tampak terbelud karena tidak ada yang menggarap.

Kaum migran yang hidup di Bali, baik yang tinggal sementara maupun tinggal menetap pada umumnya mengambil pekerjaan di sektor informal. Sementara ini, warga lokal Kota Denpasar sangat selektif memilih pekerjaan yang dijadikan mata pencaharian hidupnya. Pada dekade ini pula generasi muda Kota Denpasar sangat jarang yang menekuni profesi menjadi petani sehingga pemilik lahan pertanian merasa kesulitan mencari penggarap atau penyakap. Dewasa ini pula tampak kecenderungan warga lokal Kota Denpasar memilih bekerja di kantor, bank, hotel, restoran, perusahaan, dan tempat-tempat wisata. Selain itu, semakin bertambah banyak juga generasi muda warga lokal Bali yang bekerja di luar negeri dan menjadi karyawan di kapal pesiar.

Berbeda halnya dengan para migran yang mengadu nasib dan menetap di Kota Denpasar, justru tidak begitu memilih pekerjaan di sektor informal yang diabaikan oleh generasi muda warga kota ini. Misalnya, menjadi buruh, tukang batu, tukang gali tanah, pedagang kaki lima keliling, dan pekerjaan *serabutan* lainnya. Bahkan, pedagang kaki lima yang mangkal dan atau menyewa toko di pinggir jalan di empat kecamatan di lingkungan Kota Denpasar semakin banyak didominasi oleh penduduk pendatang.

Dengan semakin bertambah banyaknya migran yang menetap dan bekerja atau mengais rejeki di Kota Denpasar menyebabkan penduduk Kota Denpasar menjadi heterogen, baik dari segi etnis, ras, agama, maupun pekerjaan. Dengan demikian, persaingan untuk

mendapatkan pekerjaan relatif tinggi, baik di sektor formal maupun informal.

Di Kota Denpasar, daya beli masyarakat menjadi relatif tinggi sehingga secara kuantitas mempengaruhi juga pemanfaatan tenaga manusia di sektor informal, antara lain semakin banyak yang menekuni profesi sebagai pedagang, karyawan toko, karyawan kios, karyawan supermarket, dan sejenis. Selain itu, relatif banyak juga di kalangan penduduk lokal dan pendatang membuat bidang usaha sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fakta menunjukkan, penduduk lokal yang pemukimannya di pinggir-pinggir jalan tampak membuat bangunan baru dan atau merubah beberapa bangunan rumahnya yang terletak di pinggir-pinggir jalan tersebut menjadi warung, kios, atau toko. Oleh karena itu, di pinggir-pinggir jalan di empat kecamatan di lingkungan Kota Denpasar tampak relatif banyak adanya warung, kios, dan atau toko. Beberapa tabel dan gambar di bawah ini menguraikan tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor sebagai berikut.

## **6.2 Penduduk Usia 15--59 Tahun Menurut Jenis Kelamin**

Di Indonesia, penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 59 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang produktif. Ketika seseorang sudah berumur 15 tahun apabila ia menempuh pendidikan secara normal maka ia telah menamatkan SLP (Sekolah Lanjutan Pertama). Di Denpasar, sebagian besar di antara mereka yang telah menamatkan SLP biasanya melanjutkan ke SMU atau SMK. Bagi yang melanjutkan ke SMU, sebagian besar akan melanjutkan ke universitas, sedangkan bagi yang melanjutkan ke SMK biasanya melanjutkan ke politeknik atau ke jenjang pendidikan diploma. Terlebih dahulu tabel di bawah ini mencantumkan mengenai Jumlah Penduduk Usia

Produktif (15—59 th) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018.

**Tabel 6.1: Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 59 tahun) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Denpasar Utara	73.370	69.700	143.070
Denpasar Timur	56.640	54.330	110.970
Denpasar Selatan	110.380	105.270	215.650
Denpasar Barat	98.510	93.500	192.010
Jumlah	338.900	322.800	661.700

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2018.

Tabel 6.1 di atas menggambarkan mengenai jumlah secara keseluruhan penduduk yang berusia produktif (15—59 tahun) di Kota Denpasar, yaitu sekitar 661.700 orang. Penduduk yang berusia produktif tersebut didominasi oleh penduduk Kecamatan Denpasar Selatan (215.650 orang), sementara jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Barat (192.010 orang) menduduki peringkat kedua. Jumlah penduduk Kecamatan Denpasar Utara (143.070 orang) dan Kecamatan Denpasar Timur (110.970 orang) masing-masing menduduki peringkat ketiga dan keempat. Dalam tabel 6.1 di atas tidak dijelaskan secara rinci mengenai komposisi penduduk lokal/asli Kota Denpasar dan penduduk pendatang yang menetap di wilayah Kota Denpasar.

Dalam hubungan ini, Kecamatan Denpasar Selatan jumlah penduduk paling banyak karena memang paling luas wilayahnya jika dibandingkan dengan luas wilayah kecamatan yang lain di lingkungan Kota Denpasar. Sementara ini, Denpasar Barat jumlah penduduk menduduki peringkat kedua karena di wilayah ini relatif banyak muncul pemukiman baru yang diuni oleh penduduk pendatang.

Ditinjau dari perspektif jenis kelamin jumlah penduduk yang berusia produktif, ternyata terdapat perbedaan secara signifikan antara jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan di masing-masing kecamatan di lingkungan Kota Denpasar. Dalam hal ini, jumlah jenis kelamin penduduk laki-laki mendominasi di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar. Adapun selisih jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan yang berusia produktif, yaitu 16.000 orang. Ini artinya, terjadi perbedaan yang mencolok jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan yang berusia produktif di Kota Denpasar.

### **6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, penduduk Kota Denpasar setiap tahun jumlahnya semakin bertambah dan semakin bersifat heterogen. Heterogenitas penduduk Kota Denpasar tampak jelas pada bidang ekonomi, terutama lapangan usaha utama yang digelutinya. Penduduk Kota Denpasar ditinjau dari pembagian kerjanya dapat dikatakan semakin kompleks. Terkait dengan hal ini maka sesuai dengan ijazah dan atau keterampilan yang dimilikinya, mereka melamar pekerjaan untuk menjadi pilihan mata pencaharian hidupnya. Selain itu, ada juga sebagian di antaranya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tabel 6.2 berikut ini menunjukkan mengenai kegiatan yang dilakukan penduduk berusia 15 tahun keatas.



**Tabel 6.2: Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Yang Dilakukan 2018**

Jenis Kelamin	Lapangan Usaha Utama					Total
	Per-tanian	Indus-tri	Perda-gangan	Trasportasi Pergudangan dan Komuni-kasi	Jasa Kemasyara-katan, Sosial dan Perorangan	
Laki-Laki	5.719	32.291	114.455	28.170	56.430	237.065
Perem-puan	1.141	34.903	97.177	5.121	59.670	198.012
Jumlah	6.860	67.194	211.632	33.291	116.100	435.077

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2018

Memperhatikan tabel 6.2 di atas ternyata penduduk Kota Denpasar yang berusia 15 tahun keatas jika ditinjau dari lapangan usaha utamanya, yaitu secara mayoritas di bidang perdagangan. Usaha perdagangan ini menjadi pilihan utamanya karena mempunyai prospek yang menjanjikan untuk berkembang lebih maju. Dengan membuka usaha perdagangan tertentu diperlukan modal dan *skill* atau keterampilan yang memadai. Pembentukan lapangan usaha utama di bidang perdagangan akan membuka kesempatan kerja baru.

Penduduk yang terlibat dalam usaha utama di bidang perdagangan ini mempunyai orientasi nilai budaya, yaitu bekerja untuk menambah kesempatan kerja lagi. Penduduk yang memiliki orientasi nilai budaya seperti ini dapat disebut sangat ideal di zaman modern ini karena akan dapat mengatasi pengangguran di Kota Denpasar pada khususnya, dan di Bali pada umumnya. Ditinjau dari perspektif gender, terjadi ketimpangan gender karena bidang usaha

utama mengenai perdagangan ini didominasi secara mencolok oleh penduduk laki-laki.

Di bidang lain, lapangan usaha utama di bidang jasa kemasyarakan, sosial dan perorangan menduduki ranking kedua. Bidang-bidang usaha ini memiliki sub-sub usaha relatif banyak yang mempunyai prospek yang cukup cerah dan menjanjikan sehingga relatif banyak yang menekuni bidang ini. Ditinjau dari perpektif gender, tampak terjadi ketimpangan yang signifikan pula dan bidang usaha ini didominasi pula oleh penduduk laki-laki.

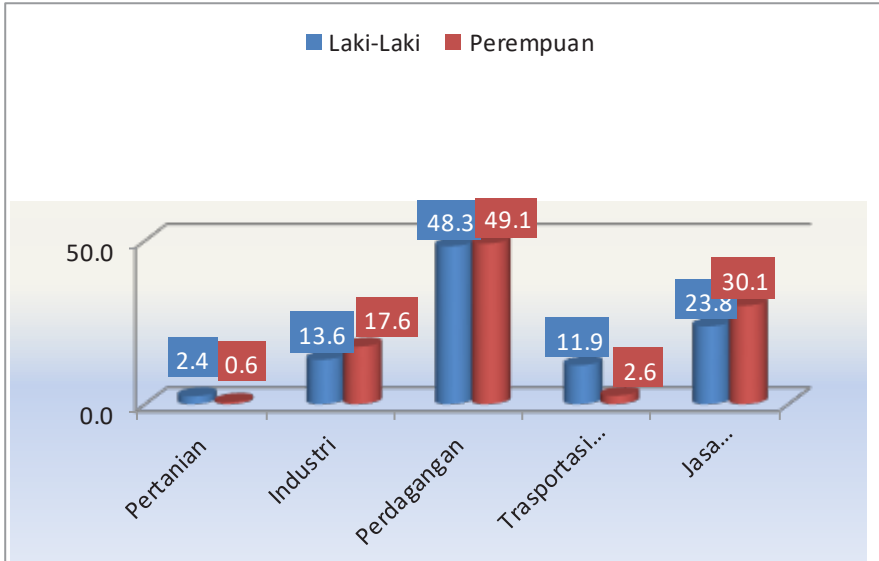
Mencermati kembali tabel 6.2 di atas ternyata terjadi ketimpangan yang sangat mencolok pula pada bidang usaha utama, yaitu di bidang transportasi, pergudangan, dan Komunikasi. Ketimbangan ini memang bisa dipahami karena usaha di bidang ini memerlukan modal yang memadai untuk pengelolaannya agar mampu bertahan dan bersaing di pasaran. Dengan demikian, orang yang menekuni bidang ini harus mempunyai mental yang kuat dan pekerja ulet dalam menghadapi persaingan di dunia pasar.

Terkait dengan lapangan usaha utama yang terurai pada tabel 6.2 di atas, hanya bidang usaha mengenai industri hampir mendekati kesetaraan gender, namun masih tetap didominasi oleh penduduk laki-laki. Walaupun demikian, perbedaan mengenai jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan yang menekuni bidang usaha ini relatif kecil jika dibandingkan dengan bidang usaha yang lain.

Sebagaimana wacana yang berkembang pada beberapa dekade akhir-akhir ini di Bali, demikian pula yang terjadi pada penduduk Kota Denpasar, yaitu generasi mudanya relatif sedikit yang menekuni profesi sebagai petani sehingga relatif sedikit pula yang menekuni usaha di bidang pertanian. Bahkan, sementara ini yang menekuni usaha di bidang pertanian juga mengalami pertimpangan gender yang sangat tajam, yang didominasi oleh penduduk laki-laki. Di bawah ini

disajikan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan yang dilakukannya.

**Gambar 6.1: Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan yang Dilakukan 2018**



Sumber: BPS Kota Denpasar, 2018

Meskipun penduduk Kota Denpasar yang menekuni kegiatan di lapangan usaha pertanian relatif kecil, namun masih ada juga kelompok petani wanita di masing-masing kecamatan di lingkungan Kota Denpasar. Tabel di bawah 6.3 berikut mencantumkan mengenai jumlah kelompok petani di Kota Denpasar tahun 2018.

**Tabel 6.3: Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar**

Kecamatan	Tahun		
	2016	2017	2018
Denpasar Utara	3	3	3
Denpasar Timur	3	3	3
Denpasar Selatan	3	3	3
Denpasar Barat	2	2	2

Sumber : Dinas Pertanian Kota Denpasar

Data yang tertera dalam tabel 6.3 di atas yang diekses dari Dinas Pertanian Kota Denpasar bahwa kelompok wanita tani di Kota Denpasar yang masih bertahan/eksis sampai sekarang ini ditinjau dari segi jumlahnya bersifat stagnan. Artinya, sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak ada mengalami penambahan dan pengurangan mengenai jumlahnya, karena jumlahnya tetap selama tiga tahun terakhir, yaitu 11 kelompok. Data ini merepresentasikan bahwa keterlibatan wanita di bidang usaha utama pertanian relatif kecil di Kota Denpasar.

#### 6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian

Ditinjau dari segi unit usaha utama mengenai sektor pertanian di Kota Denpasar, pemerintah masih tetap memberikan perhatian dan kontribusi yang signifikan. Pemerintah Kota Denpasar yang terkait dengan bidang pertanian melalui media sosial mengimbau supaya pemilik lahan pertanian hendaknya jangan menjual lahan pertanian yang masih produktif. Selain itu, pemerintah juga memasang papan pengumuman di areal-areal persawahan di daerah-daerah tertentu mengenai larangan membangun di areal persawahan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat posisi petani dan meningkatkan pendapatannya dalam upaya meningkatkan

kesejahteraannya. Salah satu kebijakan yang telah direalisasikan kepada petani adalah menugaskan tenaga-tenaga penyuluh di beberapa *subak* yang masih bertahan di Kota Denpasar. Tabel 6.4 di bawah ini menunjukkan jumlah tenaga penyuluh dan jenis kelaminnya yang bertugas memberi penyuluhan dan bimbingan kepada petani di Kota Denpasar.

**Tabel 6.4: Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

Kecamatan	Pertanian		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Denpasar Utara	3	2	5
Denpasar Timur	5	2	7
Denpasar Selatan	4	2	6
Denpasar Barat	2	2	4
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar 2018

Tabel 6.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga penyuluh pertanian di Kota Denpasar sangat sedikit jika dibanding dengan jumlah *subak* yang masih bertahan sampai tahun ini. Secara keseluruhannya jumlah tenaga penyuluh pertanian tersebut hanya 22 orang. Kecamatan Denpasar Timur mendapat penyuluh pertanian paling banyak, yaitu berjumlah tujuh orang, sedangkan kecamatan Denpasar Selatan mendapat penyuluh pertanian sebanyak 6 orang. Sementara ini, Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Timur, masing-masing mendapat tenaga penyuluh pertanian sebanyak lima orang dan empat orang. Ditinjau dari perspektif gender, dijumpai ketimpangan gender yang mencolok juga. Ini berarti, penduduk Kota Denpasar kurang berkenan mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan bercocok tanam. Ada suatu pandangan yang berkembang

bahwa mengambil pekerjaan sebagai petani di Kota Denpasar dikategorikan sebagai pekerjaan yang prospeknya kurang menjanjikan jika dibandingkan dengan beberapa pekerjaan yang lainnya. Petani di Denpasar sebagian besar menggarap tanah relatif sempit. Selain itu, ia baru dapat memetik hasil panen padi biasanya paling banyak tiga kali setahun, padahal kebutuhan uang untuk berbelanja sehari-hari dirasakannya relatif banyak karena hidup di Kota Denpasar semakin konsumtif.

### 6.5 Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei ([duniadinu.blogspot.com](http://duniadinu.blogspot.com)). Dari perspektif gender dipan-dang perlu dikaji mengenai perbandingan antar jenis kelamin untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kota Denpasar.

**Tabel 6.5: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2018**

Jenis Kelamin	Bekerja (Orang)	Tidak Bekerja
Laki- Laki	309.986	5.738
Perempuan	206.656	3.825
Laki- laki + Perempuan	516.642	9.563

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2018

Berdasarkan atas penyajian data yang tertera pada tabel di atas tampak bahwa angkatan kerja penduduk kota Denpasar yang sudah bekerja sebanyak 516.642 orang. Di Kota Denpasar masih dijumpai dan telah tercatat angkatan kerja yang sampai saat ini tidak

bekerja. Adapun jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja, ditinjau dari jumlahnya, yaitu sebanyak 9.563 orang. Jika ditinjau dari perbandingan antar jenis kelaminnya, ternyata penduduk berjenis kelamin laki-laki paling banyak yang tidak bekerja yang jumlahnya sangat mencolok, padahal jumlah penduduk di Kota Denpasar secara keseluruhan perbandingan antara laki-laki dengan perempuan tidak menunjukkan jumlah yang mencolok.

Dalam konteks tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Denpasar ternyata terjadi ketimpangan gender, baik mengenai angkatan kerja yang sudah bekerja maupun tidak bekerja, yaitu didominasi oleh penduduk laki-laki. Untuk menjelaskan terjadinya ketimpangan gender ini diperlukan informasi yang lebih mendalam sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

## **6.6 Tenaga Kerja Asing Pendetang**

Persaingan mencari kesempatan kerja di Kota Denpasar bukan saja terjadi (1) antara sesama warga Kota Denpasar yang menjadi penduduk asli Bali dan (2) antara warga kota Denpasar dengan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, namun terjadi juga antara penduduk Kota Denpasar dengan tenaga kerja asing. Keadaan ini dapat dipahami karena Bali sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang sudah terkenal di dunia sehingga Pulau Bali banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Wisatawan yang berkunjung dan menginap di Bali, maka memerlukan sarana dan prasarana serta jasa yang berlevel internasional. Dengan demikian, jasa tenaga kerja asing sementara ini masih diperlukan pada bidang-bidang tertentu untuk memberikan pelayanan yang berlevel nasional kepada wisatawan, antara lain di hotel dan restoran. Selain itu, pernah juga berembus wacana yang menyebut-nyebut bahwa tenaga kerja asing pendatang juga dipekerjakan dibidang proyek

pembangunan. Tabel 6.6 berikut ini mencantumkan jumlah tenaga kerja asing pendatang yang bekerja di Kota Denpasar.

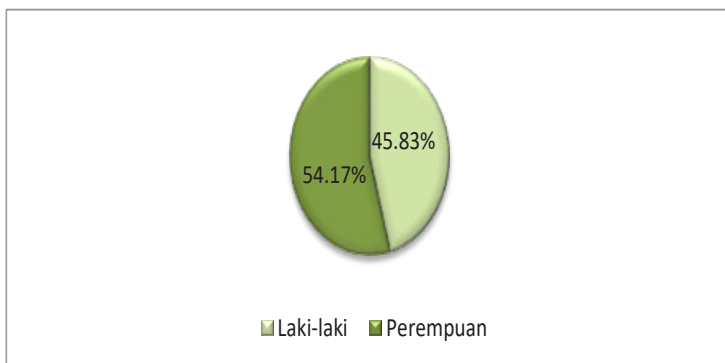
**Tabel 6.6: Tenaga Kerja Asing Pendatang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

Laki- laki	Perempuan	Jumlah
121	143	264

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2018

Setelah mencermati komposisi data pada tabel 6.6 di atas menunjukkan bahwa sementara jumlah tenaga kerja asing pendatang berjumlah 264 orang. Ditinjau dari perspektif gender, terjadi pula ketimpangan gender, namun di sini didominasi oleh perempuan. Selanjutnya gambar berikut ini menggambarkan persentase data tenaga kerja asing pendatang menurut jenis kelamin di Kota Pendatang tahun 2018

**Gambar 6.2: Presentase Data Tenaga Kerja Asing Pendatang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar,2018



## 6.7 Tenaga Kebersihan dan Pertamanan

Hidup sehat sudah menjadi nilai budaya bagi setiap manusia. Berkaitan dengan nilai budaya hidup sehat ini, Pemerintah Kota Denpasar menciptakan sebuah slogan yang di dalamnya menyelipkan kata sehat. Adapun slogan yang dimaksud: “Kota Denpasar BERSERI (Bersih, Sehat, Rindang, dan Indah) yang Berwawasan Budaya”. Makna slogan Kota Denpasar ini sesuai pula dengan makna pada sebuah pepatah yang menyebutkan “hidup bersih pangkal kesehatan”. Pepatah “hidup bersih pangkal kesehatan” ini acapkali dipublikasikan kepada masyarakat, mulai dari pemasangan tulisan yang dipasang di sekolah-sekolah di Denpasar. Selain itu, budaya hidup sehat tersebut juga disosialisasikan oleh instansi-instansi terkait secara langsung kepada masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi budaya hidup sehat itu yang dituangkan dalam slogan Kota Denpasar diharapkan pemandangan Kota Denpasar menjadi bersih, sehat, rindang, dan indah sehingga warga masyarakat akan merasa nyaman dan sehat. Demikian pula, pengunjung dan wisatawan yang berkunjung atau *tour* ke Denpasar meninggalkan kesan dan kenangan yang indah selama berada di Pulau Bali, yang telah populer mendapat berbagai julukan, antara lain Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, Pulau Sorga.

Sebagai ujung tombak untuk mewujudkan Kota Denpasar “BERSERI” yang berwawasan budaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar menjadi ujung tombaknya, yang berwenang mengatur petugas kebersihan untuk menunaikan tugasnya setiap hari, yaitu menyapu, me-ngumpulkan, dan mengangkut sampah organik dan anorganik ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Daerah Pesanggaran Denpasar Selatan. Sampah organik dan anorganik yang terdapat di Kota Denpasar, terutama berasal dari sampah rumah tangga dan pedagang. Bahkan, pada hari-hari raya besar yang dirayakan oleh umat Hindu, tampak terjadi penumpukan sampah yang berasal dari sesaji di tempat-tempat penimbunannya sebelum

diangkut oleh petugas kebersihan ke TPA. Selain itu, pepohonan yang terdapat di pinggir-pinggir jalan raya di seputar Kota Denpasar juga menghasilkan sampah organik, yang setiap hari harus disapu, dikumpulkan, dan diangkut ke TPA. Untuk itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sudah memiliki petugas kebersihan dan pegawai yang sehari-harinya secara khusus menangani sampah dalam upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Denpasar. Tabel 6.7 menunjukkan jumlah tenaga kebersihan di Kota Denpasar menurut jenis kelamin tahun 2018.

**Tabel 6.7: Jumlah Tenaga Kebersihan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018**

Jenis Kelamin	Tahun	
	2017	2018
Laki-laki	805	879
Perempuan	528	518
Jumlah	1.333	1.397

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2018

Dilihat dari sudut komposisi angka-angka dalam tabel 6.7 di atas terjadi penambahan jumlah tenaga kebersihan di Kota Denpasar dari tahun 2017 sampai 2018, yaitu selama satu tahun. Penambahan jumlah tenaga kebersihan tersebut hanya terjadi pada tenaga yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 74 orang. Sebaliknya, terjadi pengurangan jumlah tenaga kebersihan perempuan sebanyak 10 orang sehingga jumlah keseluruhan tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menjadi 1.397 orang, yang didominasi oleh tenaga laki-laki. Kondisi ini menunjukkan terjadinya ketimpangan gender khususnya pada tenaga kebersihan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa bekerja sebagai tenaga kebersihan memerlukan tenaga fisik yang prima, terkecuali yang

bertugas menyapu sampah sehari-hari. Sebagian tenaga kebersihan ini bertugas untuk menaikkan sampah di tempat penampungan yang tersebar di Kota Denpasar dan menurunkan tersebut di tempat pembuangan akhir (TPA) yaitu di Daerah Pesanggaran.

Secara keseluruhan petugas kebersihan yang bertugas menangani kebersihan Kota Denpasar terdiri atas beberapa komponen, yaitu satgas, mandor, tenaga kebersihan, dan tenaga pertamanan. Tabel 6.7 berikut ini menguraikan petugas kebersihan di Kota Denpasar tahun 2019.

**Tabel 6.8: Jumlah Petugas Kebersihan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

Jenis Kelamin	Tahun 2018		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Satgas	44	0	44
Mandor	14	4	18
Tenaga Kebersihan	805	528	1.397
Tenaga Pertamanan	117	4	121
Jumlah	980	536	1.580

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2018

Tabel 6.8 di atas menguraikan mengenai jenis kelamin komponen-komponen petugas kebersihan di Kota Denpasar yang secara keseluruhannya berjumlah 1.580 orang. Dalam hal ini tampak terjadi ketimbang yang sangat mencolok antara petugas yang berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Petugas yang berjenis kelamin laki-laki yang mendominasi semua komponen tersebut, bahkan sama sekali tidak ada yang menjadi mandor berjenis kelamin perempuan. Ketimpangan gender juga terlihat pada tenaga pertamanan, yaitu jumlah personal secara keseluruhan (laki-laki dan perempuan)

sebanyak 121 orang, hanya terdapat 4 orang perempuan yang menjadi tenaga pertamanan di Kota Denpasar.

Dalam rangka mewujudkan: “Kota Denpasar BERSERI (Bersih, Sehat, Rindang, dan Indah) yang Berwawasan Budaya”, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar bersinergi dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Denpasar. Tabel berikut ini menguraikan mengenai tenaga pertanaman yang tercatat Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Denpasar.

**Tabel 6.9: Jumlah Tenaga Pertamanan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sektor Puputan Badung	4	12	16
2	Sektor Perawatan	72	1	73
3	Sektor Penyiraman	32	0	32
4	Tenaga Taman Koridor Gatsu	4	1	5
5	Tenaga Keamanan Youth Park	2	0	2
6	Pengawas Pakan Burung	1	0	1
7	Pemeliharaan Taman Kota Lumintang	18	3	21
Jumlah		133	17	150

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Denpasar

Data yang tertera pada tabel 6.9 di atas yang diakses dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tampak jumlah keseluruhan 150 orang. Sebagaimana yang terjadi pada petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, demikian pula yang terjadi pada tenaga pertamanan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar, yaitu terjadi pertimpangan gender yang sangat mencolok. Sebagai yang tertera pada tabel 6.8 di atas, sesungguhnya keterlibatan tenaga kaum perempuan bisa lebih banyak lagi, namun hanya tercatat 17 orang, sedangkan keterlibatan tenaga laki-laki sebanyak 133 orang. Untuk menjelaskan lebih lanjut terjadinya ketimpangan gender tersebut, baik yang terjadi pada petugas kebersihan maupun tenaga pertamanan diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam

### **6.8 Juru Parkir**

Penduduk Kota Denpasar dalam beberapa dekade ini cenderung bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Akibatnya, pemilik angkutan umum seperti bemo dan taxi mengalami sepi penumpang. Keadaan ini diperparah oleh adanya angkutan umum *on-line*, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Warga Kota Denpasar, baik penduduk asli maupun pendatang yang telah menetap di kota ini pada umumnya memiliki kendaraan roda dua. Oleh karena itu, hampir setiap rumah tangga yang anggota keluarga senang pergi keluar rumah, sebagian besar memiliki kendaraan roda dua (sepeda motor). Selain itu, dengan adanya jual-beli mobil dengan tingkat harga yang bervariasi, yaitu mulai yang paling murah sampai yang termahal dapat menimbulkan arus lalu lintas di kota Denpasar semakin padat, dan sering mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu.

Keadaan seperti tersebut di atas terjadi karena warga kota Denpasar memandang menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian ke suatu tempat lebih praktis dan ekonomis daripada menggunakan angkutan kota (angkot), taksi, ojek, bis, dan sejenisnya. Dampaknya, arus lalu lintas di jalan-jalan Kota Denpasar menjadi padat, dan beresiko tinggi bagi keselamatan pengguna jalan, baik bagi si pengendara maupun pejalan kaki.

Dalam konteks ini, tampak adanya korelasi positif antara jumlah kendaraan bermotor roda dua dan mobil dengan kepadatan arus lalu lintas di jalan dan kebutuhan juru parkir, baik di dalam kota maupun pinggiran Kota Denpasar. Dengan demikian, semakin meningkat jumlah orang yang menggunakan kendaraan pribadi di Kota Denpasar maka semakin meningkat pula diperlukan tempat parkir kendaraan dan juru parkir di tempat-tempat tertentu. Tabel 6.10 di bawah ini menunjukkan jumlah juru parkir di tepi jalan umum dan pelataran menurut jenis kelamin pada di 2017 dan 2017.

**Tabel 6.10: Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelantaran menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017 dan 2018**

Kecamatan	2017			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Denpasar Selatan	86	2	88	90	2	92
Denpasar Timur	99	3	102	106	3	109
Denpasar Barat	75	2	77	94	3	97
Denpasar Utara	91	0	91	119	0	119
Jumlah	351	7	358	409	8	507

Sumber : Kantor PD Parkir Kota Denpasar,2018

Data yang tertara dalam tabel 6.10 yang diakses dari Kantor PD Parkir Kota Denpasar menunjukkan jumlah juru parkir secara keseluruhan di Kota Denpasar pada tahun 2018 adalah 507 orang. Juru parkir tersebut bertugas di empat kecamatan di lingkungan Kota Denpasar, yaitu di Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Denpasar Timur. Sesuai dengan data yang tertera pada tabel tersebut, ternyata di Kecamatan Denpasar Utara jumlah juru parkirnya yang paling banyak, yaitu berjumlah 119 orang, sedangkan jumlah juru parkir di Kecamatan Denpasar Timur menduduki peringkat kedua, yaitu berjumlah 109 orang. Sementara

ini, di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan, jumlah juru parkirnya masing-masing 109 orang dan 92 orang.

Apabila dibandingkan jumlah juru parkir di tahun 2017 dengan tahun 2019 memang mengalami peningkatan, namun peningkatannya relatif kecil dan tidak merata. Misalnya, di Kecamatan Denpasar Selatan hanya mengalami peningkatan 4 orang, Kecamatan Denpasar Timur 7 orang, Kecamatan Denpasar Barat 20 orang, sedangkan Kecamatan Denpasar Utara 18 orang. Dalam hal ini, di Kecamatan Denpasar Barat terjadi peningkatan yang paling tinggi, sedangkan di Kecamatan Denpasar Selatan peningkatan jumlah juru parkirnya paling rendah. Juru parkir ini sebagian besar tersebar di tempat parkir yang terletak di lapangan olah raga, depan toko, swalayan, supermarket, rumah sakit, dan rumah makan.

Angka-angka yang tertera dalam tabel 6.10 di atas menunjukkan juru parkir di Kota Denpasar lebih banyak masih ditekuni atau didominasi oleh orang laki-laki seperti tahun-tahun sebelum. Yang menjadi buktinya, yaitu pada tahun 2017 jumlah juru parkir di Kota Denpasar 358 orang, hanya 7 orang yang berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2018, walaupun terjadi peningkatan jumlah juru parkir sebanyak 49 orang sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 507 orang, hanya terjadi penambahan juru parkir wanita sebanyak 1 orang. Ini artinya jumlah juru parkir perempuan mengalami stagnan. Bahkan, di kecamatan Denpasar Utara tidak ada juru parkir perempuan pada tahun 2017 dan 2018. Dari perspektif gender, berarti masih terjadi ketimpangan gender yang sangat mencolok pada juru parkir di Kota Denpasar.

Ketimpangan gender yang terjadi dengan sangat mencolok ini bisa dimaklumi. Berdasarkan atas pertimbangan bahwa menjadi juru parkir harus pula mempunyai tenaga yang prima. Dalam hal ini, dibutuhkan tenaga kuat atau prima oleh juru parkir, terutama untuk mengatur, yaitu menggeser atau memindahkan kendaraan roda dua di

tempat parkir. Ini terjadi karena pengendara kendaraan bermotor roda dua relatif banyak yang kelihatan kurang disiplin menaruh/menjongkrak kendaraannya di areal parkir sehingga perlu diatur kembali letaknya agar kelihatan teratur dan tidak mengganggu orang lalu-lalang di sekitarnya. Keadaan seperti inilah yang diduga menjadi pertimbangan bagi kaum perempuan untuk memutuskan pilihan menjadi juru parkir sehingga jumlah juru parkir di Kota Denpasar didominasi oleh orang laki-laki.

### **6.9 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata**

Bali disebut-sebut sebagai salah satu tujuan wisata terbaik di dunia, bahkan sudah diakui dari berbagai organisasi internasional, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan *World Tourism Organization* (WTO). Akhirnya berkembang suatu wacana di Bali yang menegaskan bahwa Bali bukan untuk pariwisata, sebaliknya pariwisata untuk Bali. Dengan bermodalkan kebudayaan Bali yang didukung oleh keindahan alamnya maka di Bali dikembangkan jenis pariwisata budaya, yaitu pengembangan pariwisata yang didukung oleh budaya Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu.

Dalam perjalanan waktu, Bali yang ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun asing. Dengan demikian, diperlukan pembangunan sarana dan prasarana wisata yang berlevel internasional supaya mereka merasa senang, gembira, dan meninggalkan kenangan yang indah setelah meninggalkan pulau Bali. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, terutama berupa akomodasi wisata semakin gencar dilakukan di bali Bagian selatan, yaitu di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kota Denpasar letaknya sangat strategis karena berjarak relatif dekat dengan obyek-obyek wisata yang terletak di wilayah Badung, Gianyar, dan Tabanan sehingga di wilayah Kota Denpasar pun berbagai jenis akomodasi



wisata. Jenis-jenis akomodasi yang telah di Bangun di wilayah Kota Denpasar antara lain hotel berbintang, hotel melati, dan pondok wisata. Selain itu, dibangun pula tempat perawatan tubuh agar tetap segar dan sehat. Di sisi lain, juga disuguhkan hiburan, salah satu di antaranya yaitu karaoka. Sampai saat ini jumlah tenaga kerja yang ditampung di beberapa akomodasi wisata dan di panti pijak serta di tempat karaoke dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel: 6.11: Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata di Kota Denpasar tahun 2018**

Jenis Usaha	2017			2018		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Hotel Berbintang	3.161	1.077	4.238	3.161	1.077	4.238
Hotel Melati	1.735	877	2.612	1.730	876	2.606
Pondok Wisata	231	126	357	231	126	357
Panti Pijat	34	211	245	40	304	344
Karaoke	509	127	636	550	197	747
Jumlah	5.670	2.418	8.088	5.712	2.580	8.292

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2018

Mencermati tabel 6.11 yang diakses dari Dinas Pariwisata kota Denpasar dapat dipahami bahwa jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata di Kota Denpasar pada tahun 2018 berjumlah 8.292 orang. Di sini, terjadi penambahan tenaga kerja di sektor ini dari tahun 2017 sampai tahun 2018, yaitu sebanyak 204 orang. Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang berjumlah 8.088 orang di tahun 2017 dan menjadi 8.292 di tahun 2018 sebagian besar tertampung di unit usaha beberapa hotel. Secara rinci di hotel berbintang menampung tenaga sebanyak 4.238 orang di tahun 2017 dan di tahun 2018 jumlah tetap 4.238 orang, berarti tidak ada peningkatan atau penambahan. Di hotel berbintang yang paling

banyak menampung tenaga kerja karena hotel berbintang menerima tamu jauh lebih banyak daripada hotel melati dan pondok wisata.

Demikian pula halnya pada jenis usaha pondok wisata, tidak ada peningkatan jumlah tenaga kerjanya sejak tahun 2017 sampai tahun 2018. Jumlah tenaga kerja yang terserap tetap sebanyak 357 orang.

Sementara ini, hotel melati di Denpasar di tahun 2017 menampung tenaga kerja sebanyak 2.612 orang, kemudian di tahun 2018 jumlahnya justru berkurang menjadi 2.606 orang, berarti jumlahnya berkurang 6 orang. Di unit usaha akomodasi pula yang bernama pondok wisata hanya menampung tenaga kerja sebanyak 357 di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang ditampung juga tetap 357.

Di lain pihak, unit usaha panti pijat menampung tenaga kerja 245 di tahun 2017, lalu di tahun 2018 menampung 344 orang, berarti ada penambahan tenaga sebanyak 99 orang. Sementara, di unit usaha karaoke menampung tenaga kerja di tahun 2017 sebanyak 636 orang, kemudian di tahun 2018 menampung tenaga kerja sebanyak 747 orang, berarti ada penambahannya sebanyak 111 orang.

Ditinjau perspektif gender, tampak terjadi ketimpangan gender mengenai tenaga kerja yang tertampung di unit usaha hotel berbintang, hotel melati, karaoke yang didominasi oleh orang laki-laki secara mencolok. Di lain pihak, hanya di unit usaha panti pijat, tenaga kerjanya didominasi oleh orang perempuan dengan jumlah sangat mencolok juga. Dengan demikian, unit usaha yang bernama panti pijat identik dengan pekerjaan perempuan yang bernuansa kelembutan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, unit usaha yang bernama hotel paling banyak menampung tenaga kerja, pemiliknya didominasi pula oleh orang laki-laki. Tabel 6.12 di bawah ini menjelaskan mengenai pemilik hotel yang terdapat di Kota Denpasar.

**Tabel 6.12: Jumlah Pemilik Hotel di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017/2018**

Kecamatan	2017			2018		
	Lk-lk	Pr	Jml	Lk-lk	Pr	Jml
Denpasar Selatan	93	17	110	119	31	150
Denpasar Timur	22	7	29	22	11	33
Denpasar Barat	41	6	47	41	15	56
Denpasar Utara	38	9	47	41	13	54
Jumlah	194	39	233	223	70	293

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2018

Tabel 6.12 di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Denpasar Selatan paling banyak terdapat pemilik hotel. Hal ini disebabkan karena di Kecamatan Denpasar Selatan terdapat kawasan wisata, tepatnya di wilayah Sanur yang letaknya sangat strategis, yaitu di pinggir Pantai Sanur dan Pantai Mertasari. Dengan demikian, peningkatan jumlah pemilik hotel di Kecamatan Denpasar Selatan cukup tinggi, yakni di tahun 2017 berjumlah 110 orang, kemudian di tahun 2018 menjadi 150 orang. Data ini menunjukkan, selama satu tahu (dari tahun 2017 s.d. 2018) terjadi peningkatan pemilikan hotel sebanyak 40 orang. Terjadinya peningkatan jumlah pemilik hotel di Kecamatan Denpasar Selatan diikuti pula jumlah peningkatan pembangunan hotel.

Sesuai dengan data yang tertera pada tabel 6.12 di atas, ternyata pemilik hotel didominasi oleh kaum laki-laki dengan perbedaan yang sangat mencolok. Ini berarti, dalam hal pemilikan hotel mencerminkan pula budaya patriarkhi, yaitu kaum laki-laki pemegang kuasa dalam kehidupan keluarga. Pernyataan ini didukung oleh data, yaitu di tahun 2017 terdapat sebanyak 233 orang pemilik hotel, hanya sebanyak 39 orang perempuan, sedangkan sebanyak 194 orang laki-laki. Sementara, pada tahun 2018 terjadi penambahan kepemilikan hotel, yaitu sebanyak 223 orang laki-laki, dan sebanyak 70

orang perempuan, namun tampak terjadi peningkatan pemilikan hotel di kalangan orang perempuan di tahun 2018, jika dibandingkan di tahun 2017.

### 6.10 Tenaga Kerja Restoran dan Rumah Makan

Kota Denpasar yang posisinya sangat strategis, yaitu sebagai pusat pariwisata, pusat perekonomian, pusat pendidikan, pusat pemerintah di Bali. Dengan demikian, orang-orang yang datang ke Denpasar tidak hanya sebagai wisatawan, tetapi juga pencari pekerjaan, pencari sekolah atau perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan, dan orang-orang yang sedang mengurus surat menyurat. Hal inilah yang menyebabkan jumlah restoran dan rumah makan di Denpasar termasuk relatif banyak jika dibandingkan dengan daerah-daerah tingkat dua di lingkungan Provinsi Bali. Oleh karena itu, tenaga kerja yang diserap pada bidang usaha restoran dan rumah makan akan menjadi banyak juga pada tahun 2018.

**Tabel 6.13: Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Restoran dan Rumah Makan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018**

Kecamatan	2018		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Denpasar Selatan	1.020	1.019	2.039
Denpasar Timur	472	472	944
Denpasar Barat	538	549	1.087
Denpasar Utara	141	146	287
Jumlah	2.171	2.186	4.357

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2018

Data yang tertera pada tabel 6.13 di atas menunjukkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di restoran dan rumah makan di wilayah Kota Denpasar, paling banyak tertampung di wilayah Denpasar Selatan karena di beberapa wilayah di lingkungan Kecamatan Denpasar

Selatan dikembangkan menjadi kawasan wisata dan daerah tujuan wisata.

Ditinjau dari perspektif gender, jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja perempuan hampir seimbang, namun didominasi oleh kaum perempuan walaupun selisihnya tidak mencolok. Bahkan, khusus di Kecamatan Denpasar timur, pekerja di restoran dan rumah makan jumlahnya sama antara pekerja laki-laki dengan perempuan, yaitu 472 orang. Sementara ini, perbandingan jumlah tenaga kerja laki-laki dengan perempuan di restoran dan rumah makan di Kecamatan Denpasar Selatan hanya terpaut satu orang saja. Dengan demikian, jumlah pekerja di unit usaha restoran dan rumah makan mendekati kesetaraan gender di tahun 2018. Kondisi ini bisa dipahami karena terkait dengan unit usaha restoran dengan rumah makan melibatkan perempuan sebagai pekerja utamanya, yang terkait dengan pekerjaan masak-memasak dan penyajiannya. Jadi, pekerjaan masak-memasak dan penyajiannya terutama identik dengan pekerjaan kaum perempuan pada awalnya. Namun, sekarang ini, semakin banyak kaum laki-laki terlibat dalam kegiatan masak-memasak dan sejenisnya.

### **6.11 Pemilik Usaha Salon Kecantikan**

Warga masyarakat Kota Denpasar, khususnya yang tingkat pendapatannya semakin mapan cenderung semakin banyak yang tumbuh kesadarannya untuk merawat dan mempercantik dirinya. Merawat dan mempercantik diri menjadi bagian dari suatu usaha untuk merawat kesehatan tubuhnya. Dengan demikian, merawat tubuh dengan menggunakan jasa salon kecantikan sudah sepantasnya mendapat perhatian, baik bagi yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

Semakin bertambah banyak orang yang timbul kesadaran dirinya untuk mencari tempat perawatan tubuh maka implikasinya

semakin bertambah banyak pula orang melihat momentum ini sebagai peluang untuk membuka salon kecantikan. Tabel 6.14 di bawah ini mencantumkan data mengenai jumlah usaha salon kecantikan yang tersebar di empat kecamatan di Kota Denpasar.

**Tabel 6.14: Usaha Salon Kecantikan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(Orang)	(Orang)	(Orang)
Denpasar Utara	2	4	6
Denpasar Timur	6	4	10
Denpasar Selatan	5	3	8
Denpasar Barat	0	5	5
Jumlah	13	16	29

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

Data yang tertera dalam tabel 6.14 di atas yang diakses dari Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2018 menunjukkan bahwa kepemilikan usaha salon kecantikan di Kota Denpasar secara merata di empat kecamatan. Sementara ini, data menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pemilik usaha salon tersebut sebanyak 29 orang. Pemilik usaha salon tersebut didominasi oleh kaum perempuan, yaitu sebanyak 16 orang, sedangkan di pihak laki-laki hanya memiliki 13 usaha salon. Ini berarti terjadi ketimpangan gender dalam hal kepemilikan usaha salon kecantikan di Kota Denpasar, walaupun perbedaan jumlahnya tidak begitu mencolok, yaitu hanya 3 orang.

Seorang perempuan sebagai pemilik usaha salon kecantikan biasanya sekaligus pula sebagai pekerja (karyawan) di salon tersebut. Berdasarkan atas pengamatan sepintas, kebanyakan pekerja (karyawan) di sebuah salon kecantikan adalah berjenis kelamin perempuan karena kaum perempuan sementara ini lebih banyak menggunakan jasa salon kecantikan daripada kaum laki-laki.

## BAB VII

# SEKTOR PUBLIK

Sampai saat ini ideologi gender masih tetap mewarnai cara pandang dan cara pikir sebagian masyarakat. Secara umum ideologi gender dapat diartikan sebagai bagaimana menempatkan apa yang pantas dan baik dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Konkretnya, sebut saja eksistensi pandangan bahwa pekerjaan-pekerjaan di luar rumah dan bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga hanya pantas dan menjadi tanggung jawab laki-laki. Sementara pekerjaan di dalam rumah seperti memasak, menyapu, mengasuh anak dan sebagainya hanya pantas dan boleh dilakukan oleh kaum perempuan. Cara pandang seperti ini menggiring mental masyarakat untuk menempatkan perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Ketika perspektif terkait gender ini di sosialisasikan secara terus menerus, akhirnya membentuk sebuah keajegan atas konstruksi gender di masyarakat maka dapat disebut sebagai normalisasi. Fatalnya, hal ini sering diiringi dengan ketimpangan relasi kuasa antaralaki-laki dan perempuan akibat mapannya rezim kenormalan yang bermuara pada dominasi gender laki-laki melalui andil ajaran agama serta rezim budaya patriarki.

Berkenaan dengan perspektif gender, signifikansi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat merambah dunia secara global berimplikasi dalam kehidupan masyarakat termasuk perubahan dalam memandang normalisasi gender. Masyarakat sudah semakin banyak menyadari bahwa dunia atau sektor public tidak semata-mata disediakan dan pantas untuk laki-laki tetapi juga pantas dan dapat dilakukan oleh perempuan. Demikian sebaliknya dengan dunia atau sektor domestik

bukan semata-mata menjadi ranahnya kaum perempuan. Beragam alasan mengiringi terjadinya perubahan cara pandang atau ideologi gender tersebut. Salah satu faktor terpenting yang patut dikemukakan adalah karena akses perempuan terhadap pendidikan sudah sangat terbuka lebar. Bersamaan dengan semakin banyaknya perempuan yang berpendidikan tinggi menjadikan perempuan mampu mengakumulasi berbagai modal sehingga mereka dimungkinkan dan dipercaya melakoni kegiatan di sektor publik.

Dalam konteks mewujudkan Buku Statistik Gender Kota Denpasar 2019, sektor publik dijadikan satu bab tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenal dan mengetahui bagaimana laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Denpasar berkiprah di sektor publik. Sektor publik yang dibahas pada bab ini secara garis besar terklasifikasi ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

## **7.1 Eksekutif**

### **7.1.1 PNS menurut Golongan Kepangkatan**

Eksekutif adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan undang-undang yang diamanatkan oleh Montesquieu selain lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif yang familiar disebut dengan pemerintah merupakan lembaga negara yang paling pokok dan paling mendapat perhatian publik dalam berjalannya pemerintahan di Negara Indonesia. Kinerja eksekutif dapat dinilai dari beberapa faktor yang mudah dilihat dan diukur yaitu dari keadaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain yang semuanya itu dimaksudkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Guna mengetahui peran serta laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar dalam lembaga eksekutif dapat dilihat pada paparan berikut.



**Tabel 7.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan  
Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2018**

Gol	Pegawai Negeri Sipil (PNS)						Jumlah PNS (orang)
	PNS Non Guru (orang)			Guru (orang)			
	L	P	L+P	L	P	L+P	
I	86	53	139	-	-	0	139
II	692	352	1.044	25	36	61	1.105
III	755	1.148	1.903	167	376	543	2.446
IV	254	238	492	450	1.058	1.508	2.000
Jumlah	1.784	1.791	3.578	642	1.470	2.112	5.690

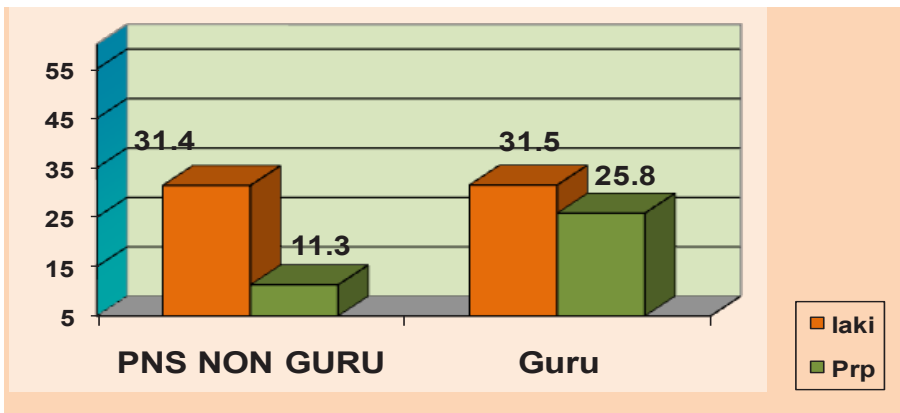
Sumber : BKPSDM Kota Denpasar 2018

Tabel 7.1 di atas menyajikan data terpilah mengenai komposisi PNS menurut golongan kepangkatan tahun 2018. Secara keseluruhan jumlah PNS non guru yang ada di Kota Denpasar sebanyak 3.578 orang dengan rincian laki-laki 1.784 orang dan perempuan 1.791 orang. Secara terperinci jumlah PNS non guru menurut golongan kepangkatan adalah sebagai berikut. Jumlah PNS non guru pada Golongan I sebanyak 139 orang dengan rincian L=86 orang dan P=53 orang; Golongan II sebanyak 1.044 orang dengan rincian L=692 orang dan P=352 orang; Golongan III sebanyak 1.903 orang dengan rincian L=755 orang dan P=1.148 orang. Terakhir Golongan IV sebanyak 492 orang dengan rincian L=492 orang dengan rincian L=254 orang dan P=238 orang. Data tersebut menunjukkan PNS non guru Golongan I dan Golongan IV tidak terjadi ketimpangan gender yang cukup berarti antara pegawai laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, ketimpangan gender sangat signifikan terjadi pada PNS-Non Guru Golongan II dan III. Pada Golongan II jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebaliknya, pada Golongan III pegawai perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel 7.1 di atas menunjukkan jumlah PNS-Guru di Denpasar Tahun 2018 secara keseluruhan adalah 2.112 orang dengan rincian 642 orang laki-laki 1.470 orang perempuan. Terjadi ketimpangan gender yang sangat signifikan antara guru laki-laki dengan guru perempuan dan terjadi di hampir semua Golongan Kepangkatan. Ketimpangan gender paling signifikan terjadi pada 2(dua) golongan yaitu Golongan III dengan jumlah guru sebanyak 543 orang dengan rincian L=167 orang dan P=376 orang. Pada Golongan IV dengan jumlah guru 1.508 orang di mana jumlah guru perempuan 1.058 orang dan guru laki-laki hanya 450 orang.

Ketimpangan gender tersebut dinyatakan kembali lewat perbandingan prosentase PNS-Non Guru dan PNS-Guru laki-laki dan perempuan seperti tampak pada diagram 7.1 di bawah. Diagram tersebut menunjukkan prosentase PNS-Non Guru laki-laki 31.4% dan perempuan 11.3%. Sementara itu, PNS-Guru laki-laki 31.5% dan perempuan 25.8%.

**Diagram 7.1 Persentase Pegawai negeri Sipil menurut Golongan Kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2018**



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2018

### 7.1.2 Pegawai Non PNS

Tabel 7.2 di bawah menggambarkan roda pemerintahan di Kota Denpasar tidak hanya dijalankan oleh pegawai negeri sipil tetapi juga oleh Pegawai-Non PNS yang terklasifikasi atas 2 (dua). *Pertama*, pegawai honorer sebanyak 2.316 orang dengan rincian laki-laki 2.844 orang dan perempuan 1.517 orang. *Kedua*, tenaga harian lepas (THL) sebanyak 24 orang dengan rincian laki-laki 17 orang dan perempuan 7 orang. Dilihat secara gender jumlah Pegawai-Non PNS (honorer dan THL) laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang sangat signifikan. Mengapa ini bisa terjadi, apakah memang tenaga yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut hanya pantas dan tepat diisi oleh laki-laki atau laki-laki memang lebih berkualitas. Hal ini perlu dicermati oleh pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan gender di masa mendatang.

**Tabel 7.2 Komposisi Pegawai Non PNS menurut Jenjang di Kota Denpasar Tahun 2018**

NO	Non PNS						Jumlah Honorer +THL (orang)
	Honorer (orang)			THL (orang)			
	L	P	L & P	L	P	L + P	
1	2.844	1.517	2.316	17	7	24	<b>6.701</b>

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2018

Peningkatan sumber daya manusia terus digalakkan guna mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju semakin cepat. Berbagai hal dapat dilakukan untuk peningkatan SDM tersebut seperti seminar, loka karya, bimbingan

teknis (bimtek), pendidikan dan latihan (diklat), dan sebagainya. Tabel 7.3 di bawah memberi sebuah gambaran secara terpilah tentang jumlah pejabat laki-laki dan perempuan yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat).

**Tabel 7.3 Jumlah Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat menurut Jenis Kelamin Di Kota Denpasar Tahun 2018**

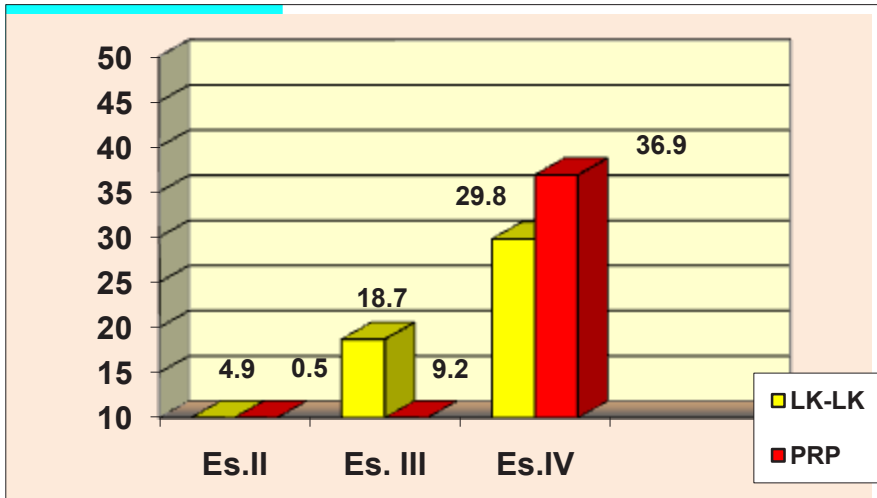
No	Jenis Diklat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	28	3	31
2	Eselon III	108	53	161
3	Eselon IV	172	213	385
	Jumlah	308	269	577

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2018

Merujuk data yang tertera pada Tabel 7.3 di atas menggambarkan klasifikasi jenis diklat yang telah diikuti oleh pejabat laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar Tahun 2018. Secara keseluruhan tercatat 577 orang pejabat laki-laki dan perempuan telah mengikuti diklat dengan rincian L=308 orang dan P=269 orang. Secara gender ada perbedaan tetapi tidak signifikan. Berikut ini secara berurutan digambarkan pejabat yang telah mengikuti Diklat. Pejabat yang telah mengikuti Diklat Eselon II sebanyak 31 orang dengan rincian L=28 orang dan P=3 orang; Diklat Eselon III sebanyak 161 orang dengan rincian L=108 orang dan P=53 orang; dan Eselon IV sebanyak 386 orang dengan rincian L=172 orang dan P=213 orang. Bila dilihat secara gender terjadi ketimpangan gender yang sangat signifikan di mana pejabat laki-laki jauh lebih banyak yang telah mengikuti Diklat Eselon II dan III dari pada pejabat perempuan. Ketimpangan gender

yang cukup signifikan juga terjadi pada pejabat yang telah mengikuti Diklat Eselon IV di mana jumlah pejabat perempuan lebih banyak dibandingkan pejabat laki.

**Diagram 7.2 Persentase Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat menurut Jenis Kelamin Di Kota Denpasar Tahun 2018**



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2018

Diagram 7.2 di atas memberi penegasan kembali terhadap terjadinya ketimpangan gender dalam hal pejabat yang telah mengikuti Diklat Eselon. Prosentase pejabat yang telah mengikuti Diklat Eselon II adalah L=4.9% dan P=0.5%. Berikutnya adalah prosentase pejabat yang mengikuti Diklat Eselon III adalah L=18.7% dan P=9.2%. Terakhir adalah prosentase pejabat yang telah mengikuti Diklat Eselon IV yaitu L=29.8% dan P=36.9%.

### 7.1.3 Pegawai yang Mengikuti Diklat

Usaha-usaha untuk meningkatkan sumberdaya manusia selalu dan terus digalakkan dan didorong melalui berbagai cara. Salah satu cara adalah dengan mengikuti Diklat PIM. Diklat PIM dimaksudkan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan melalui proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan structural (Perka LAN No. 25 Tahun 2015 pasal 1). Diklat ini bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan structural tertentu.

Tabel 7.4 di bawah menunjukkan data terpilah PNS di Kota Denpasar yang telah mengikuti Diklat PIM.

**Tabel 7.4 Proporsi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Diklat	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	PIM IV	209	249	458
2	PIM III	98	39	137
3	PIM II	17	2	19
	Jumlah	324	290	614

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2018

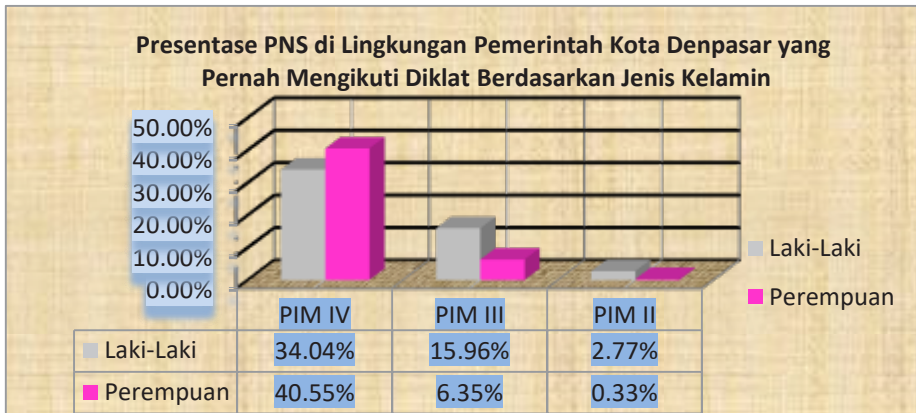
Tabel 7.4 di atas menunjukkan data PNS di Kota Denpasar yang telah mengikuti Diklat PIM. Secara keseluruhan jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat PIM sebanyak 614 orang dengan rincian L=324 orang dan P=290 orang. Berikutnya dijelaskan PNS yang telah mengikuti Diklat PIM sesuai dengan kategori yang ada. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 458 orang dengan rincian L=209

orang dan P=249 orang; Diklat PIM III sebanyak 137 orang dengan rincian L=98 orang dan P=39 orang; dan Diklat PIM II sebanyak 614 orang dengan rincian L=19 orang dan P=2 orang.

Data di atas menunjukkan terjadinya ketimpangan gender pada PNS yang mengikuti Diklat PIM IV meski tidak signifikan. Sebaliknya, ketimpangan gender yang sangat signifikan terjadi pada PNS yang mengikuti Diklat PIM II dan Diklat PIM III. Di mana jumlah PNS laki-laki jauh lebih banyak yang telah mengikuti Diklat PIM II dan III dibandingkan dengan PNS perempuan.

Ketimpangan gender tersebut lebih jelas dapat dilihat pada Diagram 7.3 di bawah. Pada Diagram 7.3 digambarkan bahwa prosentase PNS yang telah mengikuti Diklat PIM IV yaitu laki-laki 34.04% dan perempuan 40.55%; Diklat PIM III laki-laki 15.96% dan perempuan 6.35%; dan Diklat PIM II laki-laki 2.77% dan perempuan 0.33%. Artinya, masih terjadi ketimpangan gender yang cukup signifikan bagi PNS yang mengikuti Diklat PIM IV dan terutama Diklat PIM III, dan II

**Diagram 7.3**



Sumber : Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota DenpasarR

### 7.1.4 PNS berdasarkan Unit Kerja

Tabel 7.5 di bawah menunjukkan jumlah PNS secara terpisah menurut jenis kelamin di Kota Denpasar yang berugas di sejumlah unit kerja di Kota Denpasar. Unit-unit kerja tersebut meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Taman Kanak-Kanak TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). SKPD merupakan perangkat pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. SKPD sebagai pelaksana fungsi eksekutif saling berkoordinasi agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Taman Kanak-kanak (TK) merupakan jenjang pendidikan dalam bentuk formal bagi anak-anak usia dini. Kurikulumnya lebih menekankan pada rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sebagai upaya untuk menyiapkan mereka menyongsong pendidikan lebih lanjut. Sekolah Dasar sebagai jenjang paling dasar pada jenjang pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu mulai kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam). Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah dinyatakan lulus sekolah dasar atau sederajat. SMP ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun yaitu kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga).

**Tabel 7.5 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2018**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah	(% )
		L	p		
1	SKPD Kota Denpasar	1.730	1.716	3.446	60,56
2	Taman Kanak-kanak	0	85	85	1,49
3	Sekolah Dasar	516	1.107	1.623	28,52
4	Sekolah menengah Pertama	183	353	536	9,42%
	JUMLAH	2.429	3.261	5.690	100,00

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2018



Data pada Tabel 7.5 di atas menunjukkan Tahun 2018 terdapat 5.690 orang (L=2.429 orang dan P=3.261 orang) PNS di Kota Denpasar yang bertugas di beberapa unit kerja. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Denpasar paling banyak bertugas di unit kerja SKPD yaitu 3.446 orang dengan rincian L=1.716 orang dan P=1.730 orang mencapai prosentase 60,56%. Selanjutnya di Sekolah Dasar sebanyak 1.623 orang dengan rincian P=1.107 orang dan L=516 orang (28,52%); di Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 536 orang dengan rincian P=353 orang dan L=183 orang (9,42%), dan Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 85 orang (1,49%) semuanya perempuan.

Bila data tersebut dicermati, secara keseluruhan jumlah PNS perempuan di Kota Denpasar lebih banyak dibandingkan laki-laki. Demikian juga pada PNS guru, jumlah guru perempuan jauh lebih banyak dari pada guru laki-laki, terutama di tingkat Taman Kanak-kanak dan di Sekolah Dasar. Jadi, data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan gender yang sangat signifikan. Sementara itu jumlah PNS laki-laki dan perempuan yang bertugas di SKPD cukup seimbang, artinya di sini telah ada keseimbangan gender.

#### **7.1.5 PNS Menurut Eselon**

Selanjutnya Tabel 7.6 di bawah menggambarkan secara terpilah komposisi PNS menurut golongan kepegawaian di Kota Denpasar Tahun 2017-2018

**Tabel 7.6 Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan Kepegawaian di Kota Denpasar Tahun 2017 dan 2018**

Golongan	2017 ( Per 30 September )				2018			
	Jenis Kelamin				Jenis Kelamin			
	L	P	Jlh	%	L	P	Jlh	%
I	91	55	146	2.42%	86	53	139	2,44%
II	779	486	1.265	20.97%	717	388	1.105	19,42%
III	956	1.522	2.478	41.09%	922	1.524	2.446	42,99%
IV	741	1.401	2.142	35.52%	704	1.296	2.000	35,15%
Jlh	2.567	3.464	6.142	100.00%	2.429	3.261	5.690	100,00%

Sumber : Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2018

Data pada Tabel 7.6 di atas menunjukkan secara keseluruhan jumlah PNS di Kota Denpasar Tahun 2017 sebanyak 6.142 orang dengan rincian L=2.567 orang dan P=3.464 orang. Bila dirinci berdasarkan golongan kepangkatannya adalah sebagai berikut. Pegawai Negeri Sipil yang terkategori Golongan I berjumlah 146 orang (2.42%) dengan rincian L=91 orang dan P=55 orang; Golongan II sebanyak 1.265 orang (20.97%) dengan rincian L=779 orang dan P=486 orang; Golongan III berjumlah 2.478 orang (41.09%) dengan rincian L=956 orang dan P=1.522 orang; Golongan IV sebanyak 2.142 orang (35,52%) dengan rincian L=741 orang dan P=1.401 orang.

Data ini menunjukkan keadaan yang cukup menggembirakan sekaligus menyedihkan. Dikatakan menggembirakan karena jumlah PNS perempuan jauh lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki. Artinya, bahwa kaum perempuan sudah dapat menunjukkan kemampuannya untuk mengakses, mengisi, dan mengemban tugas sebagai PNS. Sebaliknya, dikatakan menyedihkan karena data di atas menunjukkan ketimpangan gender sebab jumlah PNS perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Data jumlah PNS menurut golongan kepangkatan di Kota Denpasar Tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah di setiap Golongan Kepangkatan. Secara terperinci penurunan jumlah tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. Pegawai Negeri Sipil yang terkategori Golongan I berjumlah 139 orang (2.44%) dengan rincian L=86 orang dan P=53 orang; Golongan II sebanyak 1.105 orang (19.42%) dengan rincian L=717 orang dan P=388 orang; Golongan III sebanyak 2.446 orang (42.99%) dengan rincian L=704 orang dan P=1.196 orang; dan Golongan IV berjumlah 2.000 orang (35.15%) dengan rincian L=704 orang dan P=1.296 orang.

Secara gender data Tahun 2018 menunjukkan keadaan yang sama dengan data Tahun 2017. Meskipun terjadi penurunan jumlah (kuantitas) tetapi secara kualitas datanya sama, yaitu cukup menggembirakan sekaligus menyedihkan. Dikatakan menggembirakan karena jumlah PNS perempuan jauh lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki. Artinya, bahwa kaum perempuan sudah dapat menunjukkan kemampuannya untuk mengakses, mengisi, dan mengemban tugas sebagai PNS. Sebaliknya, dikatakan menyedihkan sebab data di atas menunjukkan ketimpangan gender di mana jumlah PNS perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki.

**Tabel 7.7 Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017-2018**

Eselon	2017			%	2018			%
	L	P	jlh		L	P	Jlh	
II	25	3	28	3.47	28	3	31	4,01%
III	122	50	172	21.29	108	53	161	20,80%
IV	293	312	605	74.88	280	299	579	74,81%
V	2	1	3	0.37	2	1	3	0,39%
	<b>442</b>	<b>366</b>	<b>808</b>	<b>100.00</b>	<b>418</b>	<b>356</b>	<b>774</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, 2018

Tabel 7.7 di atas menggambarkan data pejabat yang telah menduduki eselon tertentu pada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Secara keseluruhan pejabat di Kota Denpasar Tahun 2017 yang menduduki eselon sebanyak 808 orang dengan rincian L=442 orang dan P=366 orang. Secara berturut-turut dipaparkan jumlah pejabat yang berada pada eselon-eselon tertentu. Dimulai dai jumlah pejabat yang telah berada pada posisi Eselon II ada 28 orang (3.47%) dengan rincian L=25 orang dan P=3 orang; Eselon III sebanyak 172 orang (21.19%) dengan rincian L=122 orang dan P=50 orang; Eselon IV sebanyak 605 orang (74.88%) dengan rincian L=293 orang dan P=312 orang; dan terakhir Eselon IVsebanyak 3 orang (0.37%) dengan rincian L=2 orang dan P=1 orang.

Menyimak data yang tertera di atas, secara keseluruhan pejabat yang menduduki Eselon masih terjadi ketimpangan gender yang cukup signifikan. Dikarenakan jumlah pejabat laki-laki yang menduduki jabatan Eselon masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Ketimpangan gender yang sangat signifikan terjadi pada semua jenjang Eselon. Jumlah pejabat laki-laki pada jenjang Eselon II dan III jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebaliknya, pada jenjang Eselon IV jumlah pejabat perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Artinya, semakin tinggi jenjang jabatan Eselon semakin sedikit perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

Selanjutnya data Tahun 2018 menunjukkan secara keseluruhan pejabat yang menduduki Eselon sebanyak 774 orang dengan rincian L=418 orang dan P=356 orang. Pejabat yang berada pada jenjang Eselon II sebanyak 31 orang (4.01%) dengan rincian L=28 orang dan P=3 orang; Eselon III sebanyak 161 orang (20.80%) dengan rincian L=108 orang dan P=53 orang; Eselon IV sebanyak 579 orang (74.81%) dengan rincian L=280 orang dan P=299 orang; dan Eselon V sebanyak 3 (tiga) orang (4.01%) dengan rincian 2 orang laki-laki dan seorang perempuan.

Dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah pejabat di Kota Denpasar yang menduduki jabatan Eselon pada Tahun 2018 mengalami perubahan. Pada jenjang Eselon II jumlah pejabat laki-laki mengalami peningkatan menjadi 28 orang sementara perempuan masih tetap 3 orang. Jenjang Eselon III juga berubah di mana jumlah pejabat laki-laki mengalami penurunan dari 122 orang menjadi 108 orang sedangkan pejabat perempuan meningkat dari 50 orang menjadi 53 orang. Selanjutnya pada jenjang Eselon IV jumlah pejabat laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami penurunan. Pejabat laki-laki semula 293 orang menjadi 280 orang dan perempuan dari 312 orang menjadi 299 orang. Sementara itu jumlah pejabat pada jenjang eselon V masih tetap 3 orang dengan rincian laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang. Mudah-mudahan terjadinya penurunan jumlah pejabat pada eselon-eselon di atas baik pejabat laki-laki maupun perempuan disebabkan karena mereka purnabhakti.

Disimak secara gender data di atas masih seperti data Tahun 2017. Artinya, masih menunjukkan adanya ketimpangan gender yang sangat signifikan terutama pada jenjang Eselon II dan III. Dikarenakan jumlah pejabat laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Pada jenjang Eselon IV juga terjadi ketimpangan gender meskipun tidak signifikan karena jumlah pejabat perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

## **7.2 Legislatif**

Legislatif merupakan lembaga yang bertugas memproduksi dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan juga mengatur keuangan negara. Lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam yudikatif adalah MPR, DPR (DPRD Tk I dan DPRD Tk. II) dan DPD. Pemilihan anggota legislatif ini melalui proses politik yang sangat panjang dan melelahkan sama seperti proses pemilihan pejabat pemerintah lainnya mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakilnya. Proses ini lah yang harus melibatkan lembaga-lembaga tertentu seperti Partai Politik, Panwaslu, Bawaslu, PPK dan sebagainya yang dijelaskan di bawah ini.

### **7.2.1 Keanggotaan DPRD**

Tabel 7.8 di bawah menyajikan data terpilah mengenai jumlah keanggotaan DPRD Kota Denpasar menurut partai politik Tahun 2014-2019. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Tercatat ada 7 (tujuh) partai politik yang berhasil mengantarkan kadernya menduduki kursi DPRD Kota Denpasar. Ketujuh partai politik dengan perolehan kursinya masing-masing adalah PDIP (18 kursi), Golkar (8 kursi), Demokrat (6 kursi), Gerindra (5 kursi), Hanura (4 kursi), PKS (3 kursi), dan Nasdem (1 kursi).

Data yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum tersebut menunjukkan kesenjangan gender yang amat sangat signifikan. Dikarenakan dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang ternyata hanya ada 1 (satu) orang perempuan saja dan itu berasal dari Partai Golkar yang bisa menjadi anggota DPRD Kota Denpasar. Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sebagai partai pemenang Pemilu yang berhasil merebut 18 kursi ternyata tidak mampu mengantarkan satu orang perempuan pun sebagai anggota DPRD di Kota Denpasar. Akhirnya perlu dipertanyakan bagaimana komitmen dan keberhasilan dari 30% kuota untuk perempuan. Kondisi seperti ini perlu disikapi mengingat dalam negara demokrasi, isu kesetaraan gender seharusnya galak digaungkan dan tidak sekadar retorika melainkan aksi nyata. Peran partai politik sebagai instrumen sistem demokrasi sudah semestinya mengambil langkah tegas dalam melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang posisi mereka terkait isu kesetaraan gender. Proses sosialisasi dan edukasi

semacam itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya langkah konkret kaderisasi baik anggota, caleg maupun upaya meloloskan perempuan dalam posisi strategis yang notabena lebih sulit meraih sektor publik akibat dominasi sistem patriarki.

**Tabel 7.8 Proporsi Keanggotaan DPRD menurut Partai Periode 2014-2019 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar**

Partai	Periode 2014-2019		
	L	P	JLH
PDIP	18	0	18
Golkar	8	1	8
Demokrat	6	0	6
Gerindra	5	0	5
Hanura	4	0	4
PKS	3	0	3
Nasdem	1	0	1
Jumlah	44	1	45

Sumber : KPU Kota Denpasar, 2018

### 7.2.2 Pimpinan Partai Politik

Berikutnya pada Tabel 7.9 di bawah tertera secara terpilah jumlah pimpinan partai politik di Kota Denpasar Tahun 2018. Di Kota Denpasar tercatat 31 partai politik. Dari jumlah tersebut tercatat ada 16 partai politik yang mempunyai pemimpin dan 15 partai lainnya tanpa pemimpin. Partai politik (16) yang memiliki pemimpin yaitu Hanura, Gerindra, PKPI, PKS,PAN, Nasdem, PKB, Garuda, PSI, Golkar, PPP, PBB, PDIP, Partai Berkarya, Demokrat dan Perindo. Semua partai ini dipimpin oleh masing-masing 1 (satu) orang laki-laki kecuali PSI dan PBB dipimpin oleh masing-masing seorang perempuan. Jadi, di sini terjadi ketimpangan gender sangat signifikan karena pimpinan partai politik hampir semuanya berada di tangan laki-laki hanya PSI dan PBB dipimpin perempuan.

Ada 15 partai politiklainnya yang tercatat tidak memiliki pemimpin, yaitu PNBK, PDS, PRN, PPDI, PMB, PKP, PNIM, PPI, Partai Persatuan Daeran, PIB, PBN, PPRN, PPPI, PKPB. Pertanyaannya adalah mengapa ada partai politik tanpa ada pemimpinnya?

**Tabel 7.9 Jumlah Pimpinan Partai Politik (Parpol) menurut Nama Partaidan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

No.	Nama Partai Politik	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	-
2	Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB)	-	-
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	-	-
4	Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN)	-	-
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1	-
6	Partai Barisan Nasional (PBN)		-
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	-
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	-
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	-
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)	-	-
11	Partai NasDem	1	-
12	Partai Persatuan Daerah	-	-
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	-
14	Partai Pemuda Indonesia(PPI)	-	-
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM)	-	-
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	-	-
17	Partai Karya Perjuangan (PKP)	-	-
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	-	-
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	-	-
20	Partai Garuda	1	-
21	Partai Republika Nusantara (PRN)	-	-
22	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	-
23	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	-
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	-



No.	Nama Partai Politik	Jenis Kelamin	
		L	P
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	-	-
26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK)	-	-
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	1
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1	-
29	Partai Berkarya	1	-
30	Partai Demokrat	1	-
31	Partai Perindo	-	1
	Jumlah	14	2

Sumber : KPU Kota Denpasar, 2018

Tabel 7.10 di bawah ini menggambarkan jumlah pengurus partai secara terpilah yang ada di Kota Denpasar Tahun 2018. Data pada tabel tersebut ada 15 partai politik yang memiliki pengurus partai dengan pengurus sebanyak 45 orang dengan rincian L=32 orang dan P=13 orang. Partai politik yang memiliki pengurus masing-masing yaitu Hanura 3 orang (L=2 dan P=1), PKPI 3 orang (L=2 dan P=1), PKS 3 orang (L=3 dan P=0), PAN 3 orang (L=1 dan P=2), Nasdem 3 orang (L=3 dan P=0), PKB 3 orang (L=3 dan P=0), Garuda 3 orang (L=1 dan P=2), PSI 3 orang (L=1 dan P=2), Golkar 3 orang (L=3 dan P=0), PPP 3 orang (L=1 dan P=2), PBB 3 orang (L=2 dan P=1), PDIP 3 orang (L=3 dan P=0), Partai Berkarya 3 orang (L=3 dan P=0), Demokrat 3 orang (L=3 dan P=0), dan Perindo 3 orang (L=1 dan P=2). Dari 16 partai politik yang memiliki pengurus 8 (delapan) di antaranya telah mempercayakan kepada 1 (satu) atau 2 (dua) orang perempuan sebagai pengurus partainya. Sedangkan 7 (tujuh) partai lainnya tidak menempatkan perempuan sebagai pengurus partai termasuk PDIP perjuangan sebagai pemenang pemilu dan memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kota Denpasar. Patut diapresiasi adalah PSI sebagai partai pendatang baru dalam percaturan politik Indonesia telah menempatkan 2 orang

perempuan sebagai pengurus partainya di Kota Denpasar. Masih terjadi ketimpangan gender dalam kepengurusan partai politik yang terdaftar di Kota Denpasar di mana jumlah laki-laki jauh lebih banyak sebagai pengurus partai dibandingkan perempuan.

**Tabel 7.10 Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

No.	Nama Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2	1	3
2	Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB)	-	-	-
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	-	-	-
4	Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN)	-	-	-
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	-	-	-
6	Partai Barisan Nasional (PBN)	-	-	-
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2	1	3
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	-	3
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	2	3
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)	-	-	-
11	Partai NasDem	3	-	3
12	Partai Persatuan Daerah	-	-	-
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	-	3
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	-	-	-
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM)	-	-	-
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	-	-	-
17	Partai Karya Perjuangan (PKP)	-	-	-
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	-	-	-
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	-	-	-
20	Partai Garuda	1	2	3
21	Partai Republika Nusantara (PRN)	-	-	-
22	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	2	3
23	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	-	3
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	2	3

No.	Nama Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	-	-	-
26	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia (PNBK)	-	-	-
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	1	3
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	-	3
29	Partai Berkarya	3	-	3
30	Partai Demokrat	3	-	3
31	Partai Perindo	1	2	3
	Jumlah	32	13	45

Sumber : KPU Kota Denpasar, 2018

### 7.2.3 Anggota Panwaslu

Tabel 7.12 di bawah menggambarkan jumlah anggota Panwaslu Pileg, Pilpres dan Pilkada di Kota Denpasar Tahun 2018. Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu merupakan panitia yang dibentuk untuk melancarkan agenda pemilihan umum seperti pileg, pilkada, dan pilpres. Adapun tugas dan wewenang utama dari Panwaslu adalah mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu. Di Kota Denpasar Tahun 2018 dibentuk Panwaslu Pileg, Pilkada dan Pilpres dengan jumlah anggota 5 (lima) orang dan semuanya adalah laki-laki. Dengan demikian dalam konteks ini terjadi ketimpangan gender yang sangat signifikan karena sama sekali tidak ada keterlibatan perempuan. Angka-angka tersebut tidak hanya sekadar jumlah melainkan merefleksikan kondisi sosial budaya bagaimana partisipasi masyarakat pada sektor publik masih terdominasi oleh laki-laki. Sehingga diperlukan upaya guna mendorong perempuan sebagai gender yang setara untuk menghindari polarisasi homogenitas gender dalam sektor publik, tentu saja langkah ini juga akan menjadi langkah konkret untuk menghindari normalisasi

perspektif dikotomis perempuan sebagai gender “domestik” dan laki-laki merambah sektor “publik”.

**Tabel 7.11 Jumlah Anggota Panwaslu Pileg, Pilpres dan Pilkada di Kota Denpasar Tahun 2018**

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Denpasar	5	-	5
Jumlah		5	-	5

Sumber : Banwaslu Kota Denpasar,2018

Tabel 7.13 di bawah menunjukkan jumlah anggota Bawaslu dan PPL di Kota Denpasar Tahun 2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan suatu lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk dan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ini diatur di dalam bab IV Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Tabel 7.12 Jumlah Anggota Banwaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		L (orang)	P(orang)	
1	Denpasar Utara			
	PPL	8	3	11
2	Denpasar Timur			
	PPL	5	6	11
3	Denpasar Selatan			
	PPL	9	1	10
4	Denpasar Barat			
	PPL	2	9	11
Jumlah		24	19	43

Sumber :Banwaslu Kota Denpasar

Tabel 7.13 di atas memerinci jumlah panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kota Denpasar Tahun 2018 sebagai berikut. Secara keseluruhan jumlah PPL di Kota Denpasar sebanyak 43 orang dengan rincian 24 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Di Denpasar Utara jumlah PPL sebanyak 11 orang (L=8 orang dan P=3 orang); Denpasar Timur sebanyak 11 orang (L=5 orang dan P=6 orang); Denpasar Selatan 10 orang (L=9 orang dan P=1 orang); dan Denpasar Barat 11 orang (L=1 orang dan P=9 orang).

Data tersebut menggambarkan partisipasi perempuan sebagai anggota PPL cukup bagus. Meskipun demikian bila diperhatikan dengan baik di sana terjadi ketimpangan gender terutama di Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Selatan dan Denpasar Barat. Di Denpasar Selatan dan Denpasar Utara jumlah laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebaliknya, di Denpasar Barat jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hanya di Denpasar Timur jumlah PPL laki-laki hampir serimbang dengan perempuan dan ini menunjukkan terjadinya kesetaraan gender.

**Gambar: 7.4 Presentase Anggota Panwaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

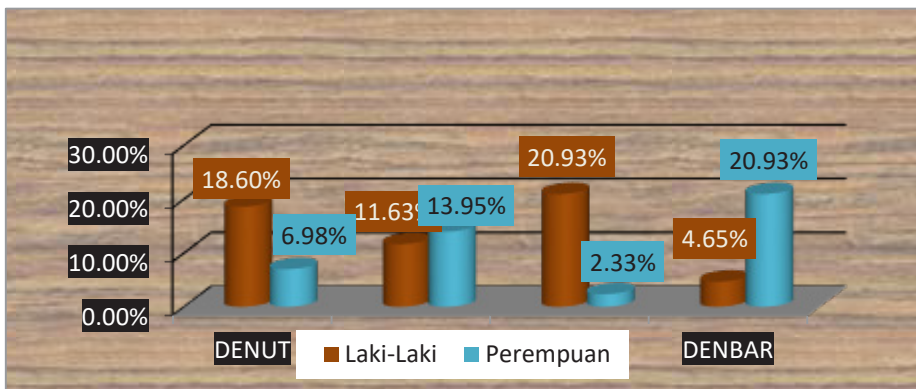


Diagram 7.4 di atas menggambarkan perbandingan prosentase anggota PPL laki-laki dan perempuan di kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Di Kecamatan Denpasar Utara prosentase anggota PPL laki-laki 18.60% dan perempuan 6.98%. Di Denpasar Timur laki-laki 11.63% dan perempuan 13.93%; Denpasar Selatan laki-laki 20.93% dan perempuan 2.33%; dan di Denpasar Barat laki-laki 4.65% dan perempuan 20.93%. Data tersebut sifatnya menguatkan data pada tabel 7.13 di atas bahwa terjadi ketimpangan gender terkait dengan keanggotaan PPL di Kota Denpasar Tahun 2018.

#### 7.2.4 Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Jumlah anggota PPK di Kota Denpasar seperti terpapar pada Tabel 14 berikut ini.

**Tabel 7.13 Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar 2018**

No.	Kecamatan	Pileg & Pilpres & Pilkada 2018		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Denpasar Utara	4	1	5
2	Denpasar Timur	4	1	5
3	Denpasar Selatan	4	1	5
4	Denpasar Barat	4	1	5
Jumlah		16	4	20

Sumber :KPU Kota Denpasar

Tabel 7.14 di atas menggambarkan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Denpasar Tahun 2018. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan panitia yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Tugas, wewenang dan kewajibannya telah diatur

berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Secara keseluruhan jumlah PPK di Kota Denpasar Tahun 2018 sebanyak 20 orang dengan rincian 16 orang laki-laki dan hanya 4 orang perempuan. Di masing-masing kecamatan ada 5 (lima) orang anggota PPK dengan rincian L=4 orang dan P=1 orang. Jadi jumlah anggota PPK laki-laki lebih banyak dibandingkan anggota PPK perempuan. Dalam konteks ini terjadi ketimpangan gender yang cukup signifikan.

**Tabel 7.14 Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut Kelamin di Kota Denpasar 2018-2019**

No.	Kecamatan	2018			2019		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Denpasar Utara	33	0	33	33	0	33
2	Denpasar Timur	28	5	33	28	5	33
3	Denpasar Selatan	27	3	30	27	3	30
4	Denpasar Barat	30	3	33	30	3	33
Jumlah		118	11	129	118	11	129

Sumber :KPU Kota Denpasar

Tabel 7.15 di atas menunjukkan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Denpasar Tahun 2018 dan 2019. PPS adalah panitia pemungutan suara yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain. Tugas, wewenang dan kewajibannya telah diatur berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah anggota panitia PPS di 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Tahun 2018 jumlah anggota PPS secara keseluruhan sebanyak 129 orang terdiri dari L=118 orang dan P=11 orang. Sebarannya di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut. Di Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 33 orang dan semuanya laki-laki. Di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 33 orang dengan rincian L=28 orang dan P=5 orang;

Denpasar Selatan sebanyak 30 orang dengan rincian L=27 orang dan P=3 orang; dan di Denpasar Barat 33 orng dengan rincian L=30 orang dan P=3 orang. Tahun 2019 jumlah anggota PPS dan sebarannya di masing-masing kecamatan masih tetap sama seperti tahun 2018.

Memperhatikan data di atas tampak jelas jumlah anggota PPS laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Secara gender terjadi ketimpangan gender yang sangat signifikan dalam hal keanggotaan PPS di Kota Denpasar.

### 7.3 Lembaga Yudikatif

Yudikatif sebagai lembaga yang bertugas mengawal dan memantau pelaksanaan perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut *adjudication function*. Fungsi dari yudikatif adalah sebagai lembaga pengawal dan pemantau jalannya roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuannya. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Tabel 7.16 di bawah menunjukkan prosentase para penegak hokum di Kota Denpasar Tahun 2018.

**Tabel 7.15 Prosentase Profesi Sektor Penegak Hukum menurut Jenis Profesi dan Jenis Kelamin Tahun 2018**

Penegak Hukum	2018	
	Laki-laki	Perempuan
Hakim	72%	28%
Jaksa	49%	51%
Polisi	94%	6%
Advokat	65%	35%
Notaris	60%	40%

Sumber: Kntor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta, 2018



Tabel 7.16 di atas menggambarkan data secara terpilah mengenai prosentase penegak hukum sesuai dengan profesinya. Perbandingan prosentase penegak hukum laki-laki dan perempuan yang berprofesi sebagai Hakim adalah L=72% dan P=28%. Penegak hukum yang berprofesi sebagai Jaksa L=49% dan P=51%. Penegak hukum yang berprofesi sebagai Polisi L=94% dan P=6%; Advokat L=65% dan P=35%; dan Notaris L=60% dan P=40%.

Memperhatikan data di atas secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa perempuan telah mampu merambah dan bersaing dengan laki-laki merebut sektor public meskipun masih belum mencapai kesetaraan. Artinya masih terjadi ketimpangan gender yang sangat signifikan terutama pada profesi polisi karena prosentase polisi laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Ketimpangan gender juga terjadi cukup signifikan pada profesi hakim, notaris, advokat karena prosentase laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dan hanya pada profesi jaksa prosentase laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan.

## **BAB VIII**

### **LAIN-LAIN**

Bab VIII ini merupakan bab terakhir dari Buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar 2019 yang memuat tentang lain-lain. Lain-lain yang dimaksudkan pada bab ini adalah beberapa hal yang terkait dengan profil gender yang tidak terklasifikasi dan tidak dapat dimuat di dalam bab-bab terdahulu namun dipandang sangat penting untuk dibahas dan disajikan untuk melengkapi isi buku ini. Kelengkapan tersebut dirasa akan mampu menampilkan isi buku lebih berwarna, lebih komprehensif dan lebih holistik. Beberapa hal yang dimaksudkan tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### **8.1 Alat/Cara KB yang Digunakan**

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah Republik Indonesia yang dirancang secara nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Secara khusus KB juga dirancang untuk menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program Keluarga Berencana diatur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Adapun salah satu wujud dari program Keluarga Berencana ini adalah pemakaian alat kontrasepsi yang dimaksudkan untuk menunda/mencegah kehamilan. Berbagai alat kontrasepsi diproduksi untuk dapat dipilih dan digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Bilamana dilihat dari sisi efektivitasnya alat kontrasepsi dapat dibagi menjadi alat kontrasepsi yang bersifat temporer (sementara) dan alat kontrasepsi permanen (selamanya). Dilihat dari jenisnya ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang diharapkan akan dapat menjadi

pilihan bagi seorang suami atau istri yang dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan, perasaan nyaman dan aman pemakainya. Pada tabel 8.1 di bawah ada 7 (tujuh) jenis alat kontrasepsi yang dapat dijadikan pilihan bagi laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar tahun 2018, yaitu MOW/tubektomi; AKDR/IUD/Spiral, Suntikan KB;MOP; Pil KB; Kondom/karet KB' dan Implan.

**Tabel 8.1. Jumlah Perempuan Pernah Kawin Usia15 - 49 yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan**

Alat / Cara KB yang Digunakan	2018
MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi	4.489
AKDR/IUD/Spiral	24.450
Suntikan KB	18.898
MOP	89
Pil KB	7.649
Kondom/Karet KB	3.540
IMPLAN	838
Total	59.953

Sumber: Kantor PPPAPPKB Kota Denpasar, 2019

Tabel 8.1 di atas menunjukkan jumlah penggunaan alat kontrasepsi oleh laki-laki dan perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun yang berstatus kawin tahun tahun 2018. Secara umum dapat dikatakan bahwa tahun 2018 di Kota Denpasar jumlah laki-laki dan perempuan yang terkategori seperti judul tabel tersebut menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 59.953 orang. Apabila dicermati secara detail ternyata pilihan penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah AKDR/IUD/Spiral sebanyak 24.450 orang. AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim) atau IUD (*intra uterine device*) atau spiral adalah alat kontrasepsi yang berupa perangkat plastik berbentuk huruf T yang diletakkan di dalam rahim dengan maksud untuk menghadang

sperma agar tidak membuahi sel telur. Satu kelebihan dari AKDR adalah pemakaiannya cukup satu kali saja tetapi berlaku untuk jangka waktu yang cukup panjang.

Suntikan KB merupakan alat kontrasepsi yang mejadi pilihan terbanyak kedua bagi perempuan yaitu sebanyak 18.898 orang. Suntikan KB ada yang digunakan untuk menunda kehamilan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan ada pula yang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Oleh karenanya alat kontrasepsi ini termasuk kategori temporer dan tergolong murah. Alat kontrasepsi Pil KB menjadi pilihan perempuan di Kota Denpasar berikutnya. Pil KB yang merupakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang khusus diperuntukkan bagi perempuan. Pil KB digunakan oleh perempuan di Kota Denpasar sebanyak 7.649 orang. Selanjutnya adalah MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi sebanyak 4.489 orang. MOW/tubektomi adalah salah satu metode kontrasepsi permanen bagi perempuan yang dapat dilakukan melalui prosedur pembedahan. Perempuan yang menggunakan metode MOW/tubektomi sebanyak 4.489 orang – 89 orang = 4.400 orang. Alat kontrasepsi Implan atau sering disebut Susuk KB paling sedikit digunakan oleh perempuan di Kota Denpasar yaitu sebanyak 383 orang. Implan adalah salah satu alat kontrasepsi berupa tabung plastic kecil (sebesar korek api) dan bersifat fleksibel yang berisi hormon untuk mencegah kehamilan. Cara pemakaiannya adalah dengan dimasukkan (di implan) ke dalam kulit lengan atas.

Alat kontrasepsi lainnya yang sangat familiar di kalangan pasangan suami-istri adalah kondom. Kondom sebagai alat kontrasepsi terbuat dari bahan karet latex berbentuk silinder. Sesungguhnya kondom digunakan dan atau dipakaikan pada alat kelamin laki-laki maupun wanita tetapi pada kenyataannya paling familiar digunakan oleh laki-laki. Data pada tabel 8.1 di atas menunjukkan kondom digunakan oleh 3.540 orang tanpa memilah secara gender. Dalam buku ini diasumsikan bahwa pengguna alat

kontrasepsi jenis kondom semuanya adalah laki-laki. MOP/vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen yang diperutukkan bagi laki-laki melalui operasi kecil untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis sehingga sangat efektif mencegah kehamilan. Metode kontrasepsi inipaling sedikit dipilih dan digunakan yaitu hanya sebanyak 89 orang laki-laki.

Memperhatikan tabel 8.1 di atas, ada 7 (tujuh) jenis alat dan metode kontrasepsi yang telah dipilih dan digunakan oleh laki-laki dan perempuan yang terkategori seperti pada judul tabel tersebut. Ketujuh alat kontrasepsi tersebut, 5 (lima) di antaranya yaitu AKDR/IUD/Spiral, Suntikan KB, Pil KB, MOW/tubektomi dan Implan merupakan alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi perempuan. Sementara itu 2 (dua) yang lainnya yaitu MOP/vasektomi dan Kondom merupakan alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi laki-laki. Berdasar atas hal tersebut secara gender data pada tabel di atas menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak berpartisipasi dalam program KB (menggunaan alat kontrasepsi) dibandingkan laki-laki yaitu perempuan sebanyak 56.235 orangsedangkan laki-laki hanya 3.629 orang. Banyak alasan yang menyertai mengapa hal seperti itu terjadi. Selain alasan masih sangat kuat dan kentalnya kekuasaan laki-laki (patriarkhi) juga karena pilihan terhadap jenis alat kontrasepsi bagi perempuan lebih banyak serta kesadaran dan kemauan kaum perempuan untuk ber KB lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena berbagai pertimbangan. Jadi, data tersebut menunjukkan masih terjadi ketimpangan gender yang sangat signifikan. Oleh karenanya, instansi terkait dan masyarakat luas perlu terus menyosialisasikan dan menggalakkan agar penggunaan alat kontrasepsi bagi kaum laki-laki dapat ditingkatkan.

## 8.2 Kekerasan

Isu-isu kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak masih selalu mewarnai wajah kehidupan masyarakat

Indonesia termasuk di Kota Denpasar dengan derajat dan intensitas yang beragam. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (pelecehan, penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk membuat penderitaan atau menyakiti orang lain. Banyak motif yang mendasari terjadinya kekerasan meskipun telah diproduksi undang-undang yang mengatur kekerasan yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Guna mengetahui fenomena kekerasan yang terjadi di Kota Denpasar, di bawah ini disajikan data terpilah tentang pelaku dan korban kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan dan kelompok umur sebagai pelaku dan korban kekerasan.

**Tabel 8.2. Korban dan Pelaku Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

Korban/Pelaku Kekerasan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Korban Kekerasan	17	97	114
Pelaku Kekerasan	81	42	123

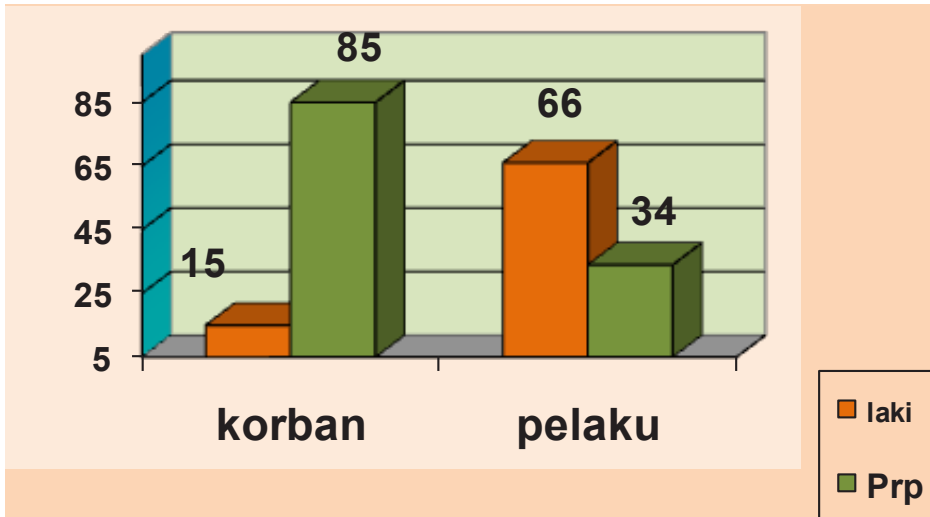
Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2018

Tabel 8.2 di atas menunjukkan jumlah korban dan pelaku kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2018. Data tersebut sangat menarik untuk dicermati karena dari 114 orang yang menjadi korban kekerasan lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki yaitu laki-laki 17 orang dan perempuan 97 orang. Meskipun secara fisik mayoritas laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan namun laki-laki juga sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan. Sebaliknya, berkenaan dengan pelaku kekerasan juga lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Dari 123 orang pelaku kekerasan, 81 orang di antaranya adalah laki-laki dan 42 orang. Perempuan yang diasumsikan

oleh masyarakat luas sebagai makhluk penyayang dan lemah lembut ternyata mampu sebagai pelaku tindak kekerasan.

Korban dan pelaku kekerasan di atas bila diprosentasikan tampak pada diagram 8.1 di bawah ini. Pada diagram tersebut ditunjukkan bahwa yang menjadi korban kekerasan lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki yaitu 85% perempuan dan 15% laki-laki. Yang menjadi pelaku kekerasan lebih banyak juga laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 66% laki-laki dan 34% perempuan. Jadi, diagram 8.1 sifatnya lebih menguatkan data tabel 8.2 di atas.

**Gambar: 8.1 Persentase Korban dan Pelaku Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**



Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2018

Guna mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2019 berikut ini akan dilengkapi dengan data tentang ciri-ciri pelaku dan korban kekerasan.

**Tabel 8.3 Ciri – Ciri Pelaku dan Korban Kekerasan menurut Umur di Kota Denpasar Tahun 2018**

Umur	Ciri - Ciri Pelaku			Ciri-Ciri Korban		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	L	P	L + P	L	P	L + P
0 – 17 Th	39	35	74	38	4	42
18 – 24 Th	0	0	0	0	2	2
25 – 59 Th	3	46	49	59	11	70
60 th +	0	0	0	0	0	0
Jumlah	42	81	123	97	17	114

Sumber:PPTPPA Kota Denpasar, 2018

Data mengenai ciri-ciri pelaku dan korban kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2018 disajikan secara terpilah pada Tabel 8.4 di atas. Para pelaku kekerasan terbanyak adalah mereka yang berada pada rentang usia 0-17 tahun yaitu sebanyak 74 orang (L=39 orang dan P=35 orang). Bila kemudian data ini dikaitkan dengan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban yaitu kekerasan psikis (lihat Tabel 8.3 di atas) menjadi masuk akal. Mengapa, karena pada rentang usia itu lah banyak remaja yang saling melancarkan kekerasan psikis dengan cara *bullying*. Saat ini kekerasan psikis semakin menggejala lebih-lebih dengan hadirnya beragam jenis media sosial. Para remaja semakin berani saling menyerang yang disebut dengan *bullying* termasuk mem-*bully* masalah fisik atau *body shaming*. Kemudian kelompok usia yang rentan sebagai pelaku kekerasan adalah kelompok usia 25-59 tahun yaitu sebanyak 49 orang (L=3 orang dan P=46 orang). Menarik untuk diketahui lebih jauh mengapa pada kelompok usia ini perempuan lebih banyak sebagai pelaku kekerasan dibandingkan pria.

Korban kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2018 paling banyak berada pada rentang usia 25-59 tahun yaitu sebanyak 70 orang dengan rincian laki-laki 59 orang dan perempuan 11 orang. Korban



kekerasan juga banyak menimpa kelompok usia 0-17 tahun yaitu sebanyak 42 orang dengan rincian laki-laki 38 orang dan perempuan 4 orang. Kelompok usia 18-24 tahun yang menjadi korban kekerasan hanya ada 2 (dua) orang perempuan dan tidak ada kekerasan yang menimpa kelompok usia 60+. Jadi kelompok usia 1-17 tahun dan 25-59 sangat rentan menjadi pelaku dan korban kekerasan.

**Tabel 8.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2017/2018**

Bentuk kekerasan	2017			2018		
	L	P	L + P	L	P	L + P
Fisik	5	7	12	2	14	16
Psikis	0	20	20	5	26	31
Seksual	4	5	9	2	14	16
Penelantaran	1	11	12	30	0	30
Pencurian	-	-	-	2	15	17
Perdagangan Orang	0	0	0	0	0	0
Eksplorasi	14	2	16	0	0	0
Lainnya	9	12	21	11	3	14
T o t a l	33	57	90	52	72	124

Sumber: PPTPPA Kota Denpasar, 2017/2018

Tabel 8.3 di atas menunjukkan ada 7 (tujuh) bentuk kekerasan yang dialami oleh para korban. Pada tahun 2017 secara keseluruhan jumlah korban kekerasan mencapai 90 orang dimana perempuan lebih banyak mengalami kekerasan. dengan rincian L= 33 orang dan P= 57 orang. Bentuk kekerasan lainnya paling banyak dialami para korban yaitu sebanyak 21 orang dengan rincian L=9 orang dan P=12 orang. Di sini perempuan lebih banyak mengalami kekerasan lainnya. Berikutnya sebanyak 20 orang korban mengalami kekerasan psikis dan semuanya perempuan. Kekerasan psikis adalah kekerasan yang tidak

menyerang atau menimpa fisik. Kekerasan psikis atau psikologis di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 7 menyebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/penderitaan psikis berat pada seseorang. Berikut ini secara berturut-turut bentuk kekerasan yang dialami korban yaitu eksploitasi sebanyak 16 orang (L=14 dan P=2); Penelantaran 12 orang (L=1 dan P=11) dan kekerasan fisik 12 orang (P=5 dan P=7). Sementara itu data tidak ada menunjukkan korban kekerasan karena pencurian dan perdagangan orang.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 jumlah korban kekerasan di Kota Denpasar Tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu dari 90 orang menjadi 124 orang (L= 52 orang dan P= 72 orang). Memperhatikan tabel 8.3 di atas Tahun 2018 kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah berupa kekerasan psikis sebanyak 31 orang dengan rincian laki-laki 26 orang dan perempuan 26 orang. Berikutnya secara berturut-turut kekerasan yang dialami korban adalah penelantaran sebanyak 30 orang dan semuanya laki-laki. Kemudian pencurian sebanyak 17 orang (L=2 orang dan L=15 orang); Fisik 16 orang (L=2 orang dan P=14 orang); kekerasan seksual 16 orang (L=2 orang dan P=14 oran); kekerasan lainnya 14 orang (L=11 orang dan P=3 orang). Kekerasan eksploitasi dan perdagangan orang syukur tidak ada.

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan sebagai korban kekerasan paling banyak mengalami kekerasan dalam bentuk psikis (26 orang), pencurian (30 orang), fisik (14 orang), dan kekerasan seksual (14 orang). Sebaliknya, korban laki-laki lebih banyak mengalami kekerasan dalam bentuk penelantaran (30 orang) dan kekerasan lainnya (11 orang). Jadi, perempuan tetap menjadi lebih

rentan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuknya dibandingkan dengan laki-laki.

**Tabel 8.5 Presentase Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2017 dan 2018**

Tahun	L	P
2017	36.6%	63.4%
2018	19.6%	80.4%

Sumber: PPTPPA Kota Denpasar, 2019

Tabel 8.5 di atas menyajikan prosentase korban kekerasan menurut jenis kelamin di Kota Denpasar tahun 2017 dan 2018. Tahun 2017 prosentase korban kekerasan yang dialami laki-laki sebanyak 36.6% dan perempuan 63.4%. Jadi, perempuan jauh lebih banyak menjadi korban kekerasan dibandingkan laki-laki. Kondisi Tahun 2018 tetap sama di mana perempuan yang menjadi korban kekerasan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu laki-laki 19.6% dan perempuan 80.4%. Data 2 (dua) tahun terakhir di atas menunjukkan bahwa di satu sisi yaitu prosentase korban kekerasan untuk laki-laki mengalami penurunan. Sebaliknya, di sisi lain prosentase korban kekerasan untuk perempuan mengalami peningkatan.

### 8.3 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Gelandangan dan pengemis yang kemudian disingkat menjadi gepeng sesungguhnya merujuk 2 (dua) kondisi yang berbeda. Gelandangan merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap serta hidup mengembara di tempat-tempat umum. Kondisi dan cara hidup demikian dianggap menyalahi dan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan pada umumnya.

Pengemis merujuk pada seseorang atau kelompok orang yang penghasilannya didapatkan dari meminta-minta yang dilakukan dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Jadi gepeng adalah seseorang yang menjalani kehidupannya secara menggelandang sekaligus mengemis. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjalani kehidupan menjadi gepeng, baik faktor internal, eksternal, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tabel 8.5 di bawah menunjukkan jumlah gepeng yang terjaring dalam Operasi Satpol PP selama tahun 2017 dan 2018.

**Tabel 8.6 Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin Yang terjaring dan Telah di Bina di Pulangkan ke daerah asal, Tahun 2017 dan 2018**

Kelompok Umur	2017			2018		
	L	P	Jlh	L	P	Jlh
0-4 Tahun	3	0	3	3	0	3
5-9 Tahun	2	0	2	2	0	2
10-14 Tahun	0	0	0	2	1	3
15-18 Tahun	2	0	2	0	0	0
19 Tahun ke Atas	31	75	106	30	34	64
Jumlah	38	75	113	37	35	72

Sumber : Dinas Sosial , 2018

Data yang tersaji dalam tabel 8.6 di atas diperoleh dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar. Data terpilah mengenai gepeng yang telah dibina dan dipulangkan Tahun 2017 berjumlah 113 orang dengan rincian laki-laki 38 orang dan perempuan 75 orang. Berdasarkan data tersebut jumlah gepeng perempuan jauh lebih banyak dibandingkan gepeng laki-laki. Data ini menunjukkan perbedaan gender yang cukup signifikan mengenai jumlah gepeng yang dibina dan telah dipulangkan.

Berdasarkan kelompok umur, gepeng yang telah dibina dan dipulangkan paling banyak dari kelompok umur 19 tahun ke atas sebanyak 106 orang, dengan rincian L=31 orang dan P=75 orang. Kemudian kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 3 orang semua laki-laki, kelompok umur 5-9 tahun dan kelompok umur 15-18 tahun masing-masing 2 orang dan semuanya laki-laki. Sementara itu pada kelompok umur 10-14 tahun tidak ada gepeng yang dibina dan dipulangkan.

Data terpilah mengenai gepeng yang telah dibina dan dipulangkan Tahun 2018 berjumlah 72 orang dengan rincian laki-laki 37 orang dan perempuan 35 orang. Artinya, dari segi jumlah tidak ada perbedaan gender mengenai jumlah gepeng yang dibina dan telah dipulangkan. Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan jumlah gepeng perempuan yang sangat signifikan dan jauh lebih banyak (30 orang) dibandingkan penurunan gepeng laki-laki yang hanya 1 orang saja.

Berdasarkan kelompok umur, gepeng yang telah dibina dan dipulangkan paling banyak dari kelompok umur 19 tahun ke atas sebanyak 64 orang, dengan rincian L=30 orang dan P=34 orang. Kemudian kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 3 orang dan semuanya laki-laki dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 3 orang dengan rincian L=2 orang dan P=1 orang, kelompok umur 5-9 tahun 2 orang semuanya laki-laki. Sedangkan pada kelompok umur 15-18 tahun tidak ada gepeng yang dibina dan dipulangkan.

**Tabel 8.7 Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2018**

NO	KERCAMATAN	USIA 60 TAHUN		Total
		L	P	
1	Denpasar Utara	7.535	6.872	16.407
2	Denpasar Timur	5.814	5.302	11.116
3	Denpasar Selatan	10.011	10.039	21.050
4	Denpasar Barat	9.938	9.064	19.002
JUMLAH		34.298	31.277	65.576

Sumber :Dinas Kesehatan Kota Denpasar,2018

Data yang tertera pada Tabel 8.8 di atas jumlah lansia yang ada di Kota Denpasar Tahun 2018. Secara keseluruhan jumlah lansia (penduduk yang berusia di atas 60 tahun) di Kota Denpasar sebanyak 65.576 orang dengan rincian laki-laki 34.298 orang dan perempuan 31.277 orang. Jumlah lansia laki-laki lebih banyak dibandingkan lansia perempuan. Jumlah lansia tersebut tersebar di 4 (empat) kecamatan masing-masing di Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 16.407 orang (L=7.535 orang dan P=6.872 orang). Di Kecamatan Denpasar Timur terdapat lansia sebanyak 11.116 orang (L=5.814 orang dan P=5.303 orang). Di Kecamatan Denpasar Selatan jumlah lansia tercatat sebanyak 21.050 orang (L=10.011 orang dan P=10.039 orang) dan di Kecamatan Denpasar Barat tercatat 19.002 orang lansia (L=9.938 orang dan P=9.064 orang).

Jumlah lansia terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Selatan. Sebaliknya, jumlah lansia paling sedikit terdapat di kecamatan Denpasar Timur. Kondisi seperti ini boleh jadi disebabkan karena jumlah penduduk di Denpasar Selatan paling banyak dibandingkan di kecamatan lainnya. Sebaliknya, jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Timur paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya. Namun satu hal yang sama terjadi di ke 4 (empat) kecamatan tersebut

adalah jumlah lansia laki-laki lebih banyak dibandingkan lansia perempuan.

Tahun 2018 di Kota Denpasar tidak ada perbedaan berarti antara jumlah lansia laki-laki dan perempuan, baik secara keseluruhan maupun di masing-masing kecamatan.

## BAB IX

# PENUTUP

### 9.1 Simpulan

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa simpulan yang dapat diambil dari seluruh uraian di atas. Jika dilihat dari realitas data yang tersaji pada masing-masing indikator, secara umum tampak bahwa di Kota Denpasar masih terjadi kesenjangan gender pada beberapa aspek pembangunan. Isu gender yang masih cukup menonjol antara lain adalah sebagai berikut.

Di bidang pendidikan:

- Secara umum APK, APS dan APM di semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan kesenjangan gender yang signifikan.
- siswa laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan siswa perempuan baik pada jenjang pendidikan SD, SMP maupun SMA namun kesenjangan tidak terlalu menonjol.
- Masih ada 4 siswa putus sekolah di SD dan 1 di SMP.
- Kesenjangan gender masih tampak jelas pada keberadaan guru baik di TK, SD maupun SMP yang didominasi oleh perempuan.

Di Bidang kesehatan:

- Masih terjadi angka kematian bayi dan balita di tahun 2018 sebanyak 13 orang yang terdiri dari 6 bayi perempuan dan 7 bayi laki-laki.
- Masih ada bayi yang berstatus gizi buruk dan gizi kurang.
- Sudah tersedia 83 pojok ASI yang tersebar diberbagai tempat.
- Kesenjangan gender masih tampak pada keberadaan dokter, dokter umum dan dokter gigi lebih banyak perempuan sementara dokter spesialis didominasi oleh laki-laki.



### Di Bidang Ekonomi

- Kesenjangan gender yang masih menonjol tampak pada keberadaan Tenaga penyuluh pertanian yang didominasi laki-laki. Demikian juga TPAK perempuan masih lebih rendah dari TPAK laki-laki.
- Tenaga kebersihan, tenaga pertamanan dan juru parkir masih didominasi oleh laki-laki.
- Di sector pariwisata kesenjangan gender masih terjadi di usaha perhotelan baik sebagai pemilik maupun sebagai karyawan didominasi oleh laki-laki.

### Di Sektor Publik

- Kesenjangan gender masih tampak di sector public baik dalam jumlah PNS guru dan non guru maupun tenaga honorer dan THL yang masih didominasi oleh laki-laki. Demikian juga dalam hal jabatan structural terutama eselon II dan III persentase perempuan lebih kecil dari laki-laki.
- Di legislatif (DPRD) kesenjangan gender masih sangat menonjol, demikian juga pada kepengurusan partai didominasi oleh laki-laki.
- Di yudikatif terutama hakim, polisi, advokat dan notaris masih menunjukkan kesenjangan gender yang cukup signifikan.

### Lain-Lain

Sampai saat ini kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga umumnya masih menyasar kaum perempuan, demikian juga persoalan gepeng sampai saat ini masih belum bisa diatasi. Para gepeng yang berkeliaran di Kota Denpasar sebagian besar adalah perempuan ibu rumah tangga dan anak-anaknya.

## 9.2 Rekomendasi

Berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan di Kota Denpasar, dapat disarankan sebagai berikut.

- (1) Ketimpangan gender yang terjadi pada beragam aspek dan jenjang pendidikan, perlu mendapat perhatian secara lebih intensif dari semua pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang ketimpangan gender paling tidak dapat diminimalkan.
- (2) Walaupun jumlah siswa putus sekolah di Kota Denpasar relatif sedikit (lima orang), hal ini rupanya perlu mendapat perhatian secara lebih serius, sehingga pada masa yang akan datang tidak ada lagi siswa yang mengalami nasib seperti itu.
- (3) Ketimpangan gender yang terjadi pada beragam aspek bidang kesehatan, perlu mendapat penanganan secara lebih serius, sehingga keadaan itu dapat diminimalkan pada masa yang akan datang.
- (4) Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan bayi dan anak Balita, khususnya dalam menekan angka kematian dan gizi buruk, perlu dilakukan penanganan secara lebih serius dari pihak terkait.
- (5) Untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, penting dilakukan pendidikan politik bagi kaum perempuan, baik melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun partai politik yang ada di Kota Denpasar.
- (6) Untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender secara cepat, maka pelatihan penyusunan perencanaan yang responsive gender (PPRG) dan penganggaran yang responsive gender (ARG) perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh OPD yang berkompeten.
- (7) Penyusunan statistik dan analisis gender perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga isu-isu gender yang ada bisa diidentifikasi. Selanjutnya isu yang muncul diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender secara berkesinambungan sehingga kesetaraan gender bisa terwujud.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arjani, dkk. 2005. "Profil Gender Bidang Pendidikan Provinsi Bali." (laporan penelitian). Denpasar: Pusat Studi Wanita UNUD.
- Atmadja, Nengah Bawa, Astiti, TIP,, Arjani, Ni Luh dan Sudarta, I Wayan, 2009. *Gender dalam Perspektif Budaya Bali*. Denpasar: Swasta Nulus
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Denpasar Dalam Angka*. Denpasar: Bappeda.
- Bachtiar, Harsja W. 1977. "Pengamatan sebagai suatu Metode Penelitian" dalam *Koentjaraningrat* (ed.). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bhasin, K. 1996. *Menggugat Patriarkhi, Pengantar Tentang persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan* (Nug Kantjasungkana, penterjemah). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Eja Yuarsi, Susi. 1997. "Wanita dan Akar Kultural Ketimpangan Gender" dalam Irwan Abdullah (ed.). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansur. 1966. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidz, Wardah. 1995. "Pola Relasi Gender dan Permasalahannya" paper disampaikan pada diskusi Gender Suatu Tinjauan Multidimensi. Yogyakarta. 29 April.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Surya Dharma (ed.). Malang: UMM Press.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2005. "Panduan dan Bunga Rampai Pembelajaran Pengarusutamaan Gender". Jakarta: KPP, BKKBN dan UNFPA.

Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.



ISBN 978-623-7559-29-0



9 786237 559290